

7.5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

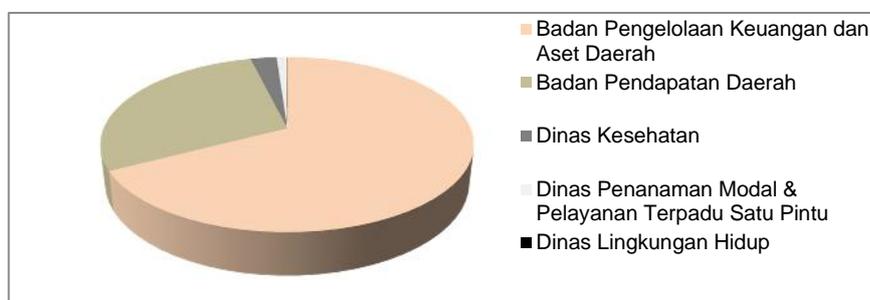
7.5.1 Penjelasan Pos Pos Laporan Realisasi Anggaran

| | TA 2018 | TA 2017 |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 7.5.1.1 Pendapatan | Rp3.428.479.729.162,65 | Rp3.416.355.218.701,10 |

Pemerintah Kota Makassar untuk Tahun Anggaran 2018 menganggarkan Pendapatan sebesar Rp3.892.235.958.000,00 yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.503.411.219.000,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp2.238.256.139.000,00 dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp150.568.600.000,00. Dari target tersebut telah direalisasikan sebesar Rp3.428.479.729.162,65 atau sebesar 88,09%. Pencapaian target Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.185.453.010.989,65, Pendapatan Transfer Rp2.098.135.622.513,00 dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp144.891.095.660,00.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan realisasi pendapatan tertinggi yaitu sebesar Rp2.209.562.552.479,65 atau 64,45% dari total realisasi Pendapatan TA. 2018. Kecamatan Ujung Tanah merupakan OPD dengan realisasi pendapatan terendah yaitu sebesar Rp345.112.000. OPD dengan realisasi pendapatan TA 2018 disajikan dalam diagram berikut.

Gambar 1 Diagram OPD dengan Realisasi Pendapatan Tertinggi TA 2018



| | TA 2018 | TA2017 |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| 7.5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah | Rp1.185.453.010.989,65 | Rp1.337.231.094.232,10 |

Nilai tersebut merupakan pendapatan murni yang dihasilkan dari pengelolaan sumber daya yang berasal dari Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2018 sebesar 78,85% dari jumlah anggaran Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.503.411.219.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 11,35% atau Rp151.778.083.242,45 dari realisasi Tahun Anggaran 2017 yang mencapai nilai sebesar Rp1.337.231.094.232,10. Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar meliputi:



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

7.5.1.1.1 Pajak Daerah

| TA 2018 | TA 2017 |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Rp942.551.891.961,00 | Rp938.796.384.191,06 |

Realisasi Pajak Daerah TA 2018 sebesar Rp942.551.891.961,00 atau 81,54% dari target sebesar Rp1.155.991.478.000,00. Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017, realisasi Pajak Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp3.755.507.769,94 atau 0,40% dari realisasi Tahun 2017 yang mencapai nilai realisasi sebesar Rp938.796.384.191,06.

Realisasi Jenis Pajak Daerah yang dipungut Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar selama Tahun Anggaran 2018 meliputi:

Tabel 12 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2018

| Jenis pajak | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|-----------------------------|---------------------------|--------------|
| Pajak Hotel | 130.000.000.000,00 | 103.142.302.558,00 | 79,34 |
| Pajak Restoran | 156.000.000.000,00 | 166.283.919.526,00 | 106,59 |
| Pajak Hiburan | 70.000.000.000,00 | 38.710.026.743,00 | 55,30 |
| Pajak Reklame | 38.000.000.000,00 | 44.880.644.293,00 | 118,11 |
| Pajak Penerangan Jalan | 210.000.000.000,00 | 212.023.911.244,00 | 100,96 |
| Pajak Pengambilan Tambang Galian Gol. C | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pajak Parkir | 91.891.478.000,00 | 16.907.817.225,00 | 18,40 |
| Pajak Air Bawah Tanah | 4.000.000.000,00 | 2.764.086.466,00 | 69,10 |
| Pajak Sarang Burung Walet | 100.000.000,00 | 47.026.000,00 | 47,03 |
| Pajak BPHTB | 300.000.000.000,00 | 210.360.574.161,00 | 70,12 |
| Pajak Bumi dan Bangunan Sek. P2 | 155.000.000.000,00 | 147.431.583.745,00 | 95,12 |
| Jumlah | 1.155.991.478.000,00 | 942.551.891.961,00 | 81,54 |

Realisasi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebesar Rp212.023.911.244,00 terdiri atas PPJ PLN sebesar Rp211.996.518.593,00,00 dan PPJ Non PLN sebesar Rp27.392.651,00.

7.5.1.1.2 Retribusi Daerah

| TA 2018 | TA2017 |
|----------------------------|----------------------------|
| Rp57.277.225.805,00 | Rp72.788.075.037,56 |

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2018 mencapai 41,98% dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp136.430.940.000,00. Dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2017 nilai tersebut mengalami penurunan 21,31% atau sebesar Rp15.510.849.232,56 dari jumlah realisasi Tahun 2017 yang mencapai Rp72.788.075.037,56. Jenis retribusi yang memberikan kontribusi terbesar adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang mencapai 52,22% dari total Retribusi Daerah.

Realisasi Jenis Retribusi yang dipungut Pemerintah Kota Makassar selama Tahun Anggaran 2018 meliputi:



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Tabel 13 Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah TA 2018

| Jenis Retribusi | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------|
| Retribusi Pelayanan Kesehatan | 4.135.244.000,00 | 2.972.996.350,00 | 71,89 |
| Retribusi Penyediaan/Penyedotan Kakus | 519.000.000,00 | 362.345.000,00 | 69,82 |
| Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 41.068.626.000,00 | 6.790.917.623,00 | 16,54 |
| Retribusi Pelayanan Alat Pemadam Kebakaran | 470.000.000,00 | 540.552.000,00 | 115,01 |
| Retribusi I M B | 75.000.000.000,00 | 29.911.658.500,00 | 39,88 |
| Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 2.414.990.000,00 | 1.814.820.709,00 | 75,15 |
| Retribusi Penyeberangan diatas Air | 25.000.000,00 | 28.654.000,00 | 114,62 |
| Retribusi Izin Trayek | 177.000.000,00 | 79.623.800,00 | 44,99 |
| Retribusi Pelayanan Pelayanan/Kebersihan | 9.572.199.000,00 | 11.588.313.283,00 | 121,06 |
| Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat | 543.600.000,00 | 548.800.000,00 | 100,96 |
| Retribusi Tempat Pelelangan Ikan | 1.205.281.000,00 | 1.264.806.000,00 | 104,94 |
| Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol | 800.000.000,00 | 1.010.000.000,00 | 126,25 |
| Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing | 500.000.000,00 | 363.738.540,00 | 72,75 |
| Jumlah | 136.430.940.000,00 | 57.277.225.805,00 | 41,98 |

7.5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

| | TA 2018 | TA 2017 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| | Rp49.463.120.625,29 | Rp45.023.066.147,08 |

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2018 merupakan bagi hasil atas penyertaan modal/deviden yang terealisasi sebesar 98,92% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp50.002.154.000,00. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2017 nilai tersebut mengalami peningkatan 9,86% atau sebesar Rp4.440.054.478,21 dari realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp45.023.066.147,08. Pendapatan ini sepenuhnya dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar. Realisasi Bagi hasil atas Penyertaan Modal dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 14 Realisasi Bagi Hasil TA 2018 dan 2017

| Nama Perusahaan | Nilai Bagi Hasil TA 2018 (Rp) | Nilai Bagi Hasil TA 2017 (Rp) | Trend % |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| Perusahaan Daerah | | | |
| PDAM | 41.591.065.653,50 | 35.224.130.377,15 | 18,08 |
| BPR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PD. Pasar Makassar Raya | 256.025.000,00 | 250.000.000,00 | 2,41 |
| PD. RPH | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PD. Parkir | 1.093.581.936,79 | 1.299.840.531,00 | 15,87 |
| PD. Terminal | 0,00 | 166.013.895,85 | 100,00 |



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

| Nama Perusahaan | Nilai Bagi Hasil TA 2018 (Rp) | Nilai Bagi Hasil TA 2017 (Rp) | Trend % |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Perusahaan Pemerintah | | | |
| PT. Bank SULSEL | 6.246.770.479,00 | 7.782.620.020,08 | 19,73 |
| PT. Kima Makassar | 170.077.556,00 | 135.461.323,00 | 25,55 |
| Perusahaan Swasta | | | |
| PT. GMTD | 105.600.000,00 | 165.000.000,00 | 36,00 |
| Jumlah | 49.463.120.625,29 | 45.023.066.147,08 | 9,86 |

7.5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah

| TA 2018 | TA2017 |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Rp136.160.772.598,36 | Rp280.623.568.856,40 |

Merupakan pendapatan daerah yang sah diluar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meliputi hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, pendapatan BLUD, pendapatan UPTD, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan dari pengembalian, dana kapitasi JKN pada FKTP dan hasil penerimaan pihak ketiga . Nilai tersebut direalisasikan 84,58% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp160.986.647.000,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2017, nilai tersebut mengalami penurunan 51,48% atau sebesar Rp144.462.796.258,04 dari realisasi Tahun 2017 sebesar Rp280.623.568.856,40.

Tabel 15 Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

| Jenis Lain-Lain PAD yang Sah | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------|
| Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD | 91.452.459.000,00 | 60.417.541.185,00 | 66,06 |
| Pendapatan UPTD Bank Sampah | 3.000.000.000,00 | 2.190.695.400,00 | 73,02 |
| Penerimaan Jasa Giro | 6.500.000.000,00 | 9.190.032.362,00 | 141,39 |
| Penerimaan TP / TGR | 3.702.534.000,00 | 4.189.224.434,34 | 113,14 |
| Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 273.000.000,00 | 2.844.139.449,00 | 1.041,81 |
| Penerimaan dari Pengembalian | 9.160.000.000,00 | 7.899.940.375,00 | 86,24 |
| Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan | 1.421.174.000,00 | 1.005.297.718,00 | 70,74 |
| Lain-lain PAD yang sah Lainnya | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Bunga Deposito | 14.000.000.000,00 | 21.012.328.623,02 | 150,09 |
| Dana Kapitasi JKN pada FKTP | 28.437.480.000,00 | 24.877.970.502,00 | 87,48 |
| Hasil Penerimaan Pihak Ketiga | 3.000.000.000,00 | 2.533.602.550,00 | 84,45 |
| Jumlah | 160.986.647.000,00 | 136.160.772.598,36 | 84,58 |



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

7.5.1.1.2 **Pendapatan Transfer**

| TA 2018 | TA2017 |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Rp2.098.135.622.513,00 | Rp2.047.105.605.669,00 |

Pendapatan Transfer TA 2018 sebesar Rp2.098.135.622.513,00 merupakan realisasi transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, dan Transfer Pemerintah Provinsi sebesar 93,74% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp2.238.256.139.000,00. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017, nilai ini mengalami peningkatan 2,49% atau sebesar Rp51.030.016.844,00 dari jumlah realisasi tahun 2017 yang mencapai nilai sebesar Rp2.047.105.605.669,00. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 16 Realisasi Pendapatan Transfer TA 2018

| Jenis Pendapatan Transfer | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan | 1.878.090.139.000,00 | 1.808.260.589.494,00 | 96,28 |
| Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya | 35.750.000.000,00 | 17.875.000.000,00 | 50,00 |
| Transfer Pemerintah Propinsi | 324.416.000.000,00 | 272.000.033.019,00 | 83,84 |
| Jumlah | 2.238.256.139.000,00 | 2.098.135.622.513,00 | 93,74 |

7.5.1.1.2.1 **Pendapatan Transfer – Dana Perimbangan**

| TA 2018 | TA 2017 |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Rp1.808.260.589.494,00 | Rp1.672.967.166.403,00 |

Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2018 sebesar Rp1.808.260.589.494,00 merupakan realisasi transfer dari pemerintah pusat selama TA 2018 yang mencapai 96,28% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1.878.090.139.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 nilai tersebut mengalami peningkatan 8,09% atau sebesar Rp135.293.423.091,00 dari realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2017 yang mencapai nilai sebesar Rp1.672.967.166.403,00, dengan rincian Dana Perimbangan sebagai berikut:

a. Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Pajak dari Pusat mencapai nilai Rp102.913.565.625,00 atau sebesar 72,60% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp141.759.833.000,00, bila dibandingkan dengan Tahun 2017 maka nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 10,50% atau sebesar Rp12.067.888.337,00, dari jumlah yang dicapai selama Tahun 2017 sebesar Rp114.981.453.962,00.

Secara lebih rinci dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel berikut.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Tabel 17 Realisasi Bagi Hasil Pajak TA 2018

| Bagi Hasil Pajak | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------|
| Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan | 7.695.255.000,00 | 7.155.019.177,00 | 92,98 |
| Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21 | 134.064.578.000,00 | 95.758.546.448,00 | 71,43 |
| Jumlah | 141.759.833.000,00 | 102.913.565.625,00 | 72,60 |

b. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Dana tersebut telah direalisasikan sebesar Rp4.366.784.880,00 atau sebesar 91,82% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp4.755.663.000,00 Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 16,90% atau sebesar Rp631.389.702,00 dari jumlah yang terealisasi selama Tahun 2017 sebesar Rp3.735.395.178,00. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dapat dirinci dalam tabel berikut. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 225/PMK.07/2017 bahwa Pemerintah Kota Makassar mendapatkan pagu anggaran Bagi Hasil Sumber Daya Hutan sebesar Rp157.152.402,00, namun hanya di transfer sebesar Rp50.096.529,00. Sehingga terdapat kurang salur sebesar Rp107.055.873,00. Namun Pemerintah Kota Makassar tidak mengakui piutang di Neraca karena dimungkinkan adanya perubahan PMK oleh Pemerintah Pusat.

Tabel 18 Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/
Sumber Daya Alam TA 2018

| Jenis Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------|
| Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan | 28.897.000,00 | 50.096.529,00 | 173,36 |
| Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) | 2.551.083.000,00 | 2.752.536.010,00 | 107,90 |
| Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan | 943.027.000,00 | 701.234.591,00 | 74,36 |
| Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi | 0,00 | 74.650,00 | 100,00 |
| Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi | 1.232.656.000,00 | 862.843.100,00 | 70,00 |
| Jumlah | 4.755.663.000,00 | 4.366.784.880,00 | 91,82 |

c. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum selama Tahun Anggaran 2018 terealisasi sebesar Rp1.299.554.321.692,00 atau 99,91% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1.300.764.306.000,00. Bila dibandingkan dengan Tahun 2017 nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 0,09% atau sebesar Rp1.209.984.308,00 dari realisasi Dana Alokasi Umum Tahun 2017 sebesar Rp1.300.764.306.000,00.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

d. Dana Alokasi Khusus

Dana ini direalisasikan sebesar Rp401.425.917.297,00 atau 93,18% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp430.810.337.000,00. Bila dibandingkan dengan Tahun 2017, realisasi Tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 58,36% atau sebesar Rp147.939.906.034,00 dari realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2017 sebesar Rp253.486.011.263,00.

7.5.1.1.2.2 **Pendapatan Transfer
 Pemerintah Pusat Lainnya**

| TA 2018 | TA 2017 |
|----------------------------|---------------------------|
| Rp17.875.000.000,00 | Rp7.500.000.000,00 |

Nilai tersebut merupakan realisasi transfer dari Pemerintah Pusat yang terdiri dari Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus. Dana ini direalisasikan sebesar Rp17.875.000.000,00 atau 50,00% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp35.750.000.000,00. Bila dibandingkan dengan Tahun 2017, realisasi Tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 138,33% atau sebesar Rp10.375.000.000,00 dari realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2017 sebesar Rp7.500.000.000,00.

7.5.1.1.2.3 **Pendapatan
 Transfer
 Pemerintah
 Provinsi**

| TA 2018 | TA 2017 |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Rp272.000.033.019,00 | Rp366.638.439.266,00 |

Nilai tersebut merupakan realisasi transfer dari Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak. Nilai tersebut tercapai sebesar Rp272.000.033.019,00 atau 83,84% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp324.416.000.000,00 Realisasi transfer Pemerintah Provinsi selama Tahun 2018 secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 19 Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi TA 2018

| Jenis Penerimaan Bagi Hasil Pajak | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Rasio (%) |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------|
| Pajak Kendaraan Bermotor | 110.000.000.000,00 | 93.851.093.423,00 | 85,32 |
| BBN Kendaraan Bermotor | 95.000.000.000,00 | 66.029.781.585,00 | 69,51 |
| Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor | 78.000.000.000,00 | 66.825.260.946,00 | 85,67 |
| Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABT/AP | 1.200.000.000,00 | 740.449.533,00 | 61,70 |
| Pajak Cukai Hasil Tembakau | 216.000.000,00 | 219.833.000,00 | 101,77 |
| Pajak Rokok | 40.000.000.000,00 | 44.333.614.532,00 | 110,83 |
| Jumlah | 324.416.000.000,00 | 272.000.033.019,00 | 83,84 |

Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 maka nilai ini mengalami penurunan 25,81% atau sebesar Rp94.638.406.247,00 dari jumlah realisasi Tahun 2017 sebesar Rp366.638.439.266,00.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

| Lain-Lain | TA 2018 | TA 2017 |
|---|-----------------------------|----------------------------|
| 7.5.1.1.3 Pendapatan Daerah yang Sah | Rp144.891.095.660,00 | Rp32.018.518.800,00 |

Lain-lain Pendapatan yang Sah untuk Tahun 2018 terealisasi sebesar Rp144.891.095.660,00 atau 96,23% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp150.568.600.000,00. Nilai ini mengalami peningkatan 352,52% atau sebesar Rp112.872.576.860,00 dari realisasi Tahun 2017 sebesar Rp32.018.518.800,00. Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri atas Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya.

| | TA 2018 | TA2017 |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 7.5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah | Rp128.588.743.987,00 | Rp15.000.000.000,00 |

Pendapatan Hibah Tahun 2018 terealisasi sebesar Rp128.588.743.987,00 atau 96,75% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp132.904.600.000,00. Pendapatan Hibah merupakan pendapatan dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

| | TA 2018 | TA2017 |
|-------------------------------------|---------------|----------------------------|
| 7.5.1.1.3.2 Bantuan Keuangan | Rp0,00 | Rp17.018.518.800,00 |

Bantuan keuangan untuk Tahun 2018 tidak dianggarkan. Adapun realisasi Bantuan Keuangan pada Tahun 2017 yaitu sebesar Rp17.018.518.800,00 yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

| | TA 2018 | TA2017 |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------|
| 7.5.1.1.3.3 Pendapatan Lainnya | Rp16.302.351.673,00 | Rp0,00 |

Pendapatan Lainnya untuk Tahun 2018 terealisasi sebesar Rp16.302.351.673,00 atau 92,29% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp17.664.000.000,00. Pendapatan lainnya Tahun Anggaran 2018 berasal dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri atas Dana Kesehatan Gratis sebesar Rp16.302.351.673,00.

| | TA 2018 | TA2017 |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 7.5.1.2 Belanja | Rp3.522.986.464.897,09 | Rp3.312.532.290.887,44 |

Pada Tahun Anggaran 2018 Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp4.086.495.359.000,00 sampai dengan pelaksanaan akhir Tahun 2018 dapat direalisasikan sebesar Rp3.522.986.464.897,09 atau 86,21%. Realisasi Belanja TA



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

2018 mengalami peningkatan 6,35% atau sebesar Rp210.454.174.009,65 dibandingkan realisasi Belanja TA 2017 sebesar Rp3.312.532.290.887,44.

7.5.1.2.1 Belanja Operasi

| TA 2018 | TA2017 |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Rp2.776.033.750.162,00 | Rp2.679.955.886.282,04 |

Realisasi Belanja Operasi Tahun 2018 adalah sebesar Rp2.776.033.750.162,00 atau 88,68% dari rencana Belanja Tahun 2018 sebesar Rp3.130.387.867.449,00. Belanja Operasi terdiri dari:

Tabel 20 Belanja Operasi Tahun Anggaran 2018 dan 2017

| Jenis Belanja Operasi | TA2018 (Rp) | TA2017 (Rp) |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Belanja Pegawai | 1.208.192.744.067,00 | 1.193.157.695.155,00 |
| Belanja Barang | 1.430.119.739.515,00 | 1.409.619.453.503,66 |
| Belanja Bunga | 0,00 | 254.324.108,38 |
| Belanja Subsidi | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Hibah | 137.256.266.580,00 | 76.924.413.515,00 |
| Belanja Bantuan Sosial | 465.000.000,00 | 0,00 |
| Jumlah | 2.776.033.750.162,00 | 2.679.955.886.282,04 |

7.5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

| TA 2018 | TA2017 |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Rp1.208.192.744.067,00 | Rp1.193.157.695.155,00 |

Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp1.306.340.510.682,00 dan terealisasi sebesar Rp1.208.192.744.067,00 atau 92,49%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp98.147.766.615,00 atau 7,51%. Realisasi Belanja Pegawai mengalami kenaikan 1,26% atau sebesar Rp15.035.048.912,00 dari realisasi Belanja Pegawai TA 2017 sebesar Rp1.193.157.695.155,00. Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 21 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2018

| No | Kelompok Belanja | Anggaran (Rp) | Realisasi 2018 (Rp) | Rasio % | Sisa Anggaran (Rp) | Realisasi 2017 (Rp) |
|----|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | Gaji dan Tunjangan | 997.863.293.100,00 | 939.130.898.242,00 | 94,11 | 58.732.394.858,00 | 933.175.568.485,00 |
| 2 | Belanja Honor Pegawai | 207.608.658.000,00 | 191.872.882.578,00 | 92,42 | 15.735.775.422,00 | 192.952.014.512,00 |
| 3 | Tambahan Penghasilan PNS | 1.647.000,00 | 1.339.800,00 | 81,35 | 307.200,00 | 2.228.047.889,00 |
| 4 | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH | 11.075.000.000,00 | 10.674.592.500,00 | 96,38 | 400.407.500,00 | 14.171.789.433,00 |
| 5 | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 5.075.720.625,00 | 1.243.549.210,00 | 24,50 | 3.832.171.415,00 | 4.978.461.600,00 |
| 6 | Insentif Pemungutan Pajak Daerah | 46.534.681.000,00 | 33.890.578.215,00 | 72,83 | 12.644.102.785,00 | 38.248.309.966,00 |
| 7 | Belanja Pegawai Dana BOS | 8.613.734.698,00 | 6.936.899.967,00 | 80,53 | 1.676.834.731,00 | 7.403.503.270,00 |
| 8 | Belanja Pegawai BLUD | 29.567.776.259,00 | 24.442.003.555,00 | 82,66 | 5.125.772.704,00 | 0,00 |
| | JUMLAH | 1.306.340.510.682,00 | 1.208.192.744.067,00 | 92,49 | 98.147.766.615,00 | 1.193.157.695.155,00 |



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

7.5.1.2.1.2 Belanja Barang

| TA 2018 | TA 2017 |
|------------------------|------------------------|
| Rp1.430.119.739.515,00 | Rp1.409.619.453.503,66 |

Belanja Barang dan Jasa direncanakan sebesar Rp1.674.786.356.767,00 dan terealisasi sebesar Rp1.430.119.739.515,00 atau 85,39%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp244.666.617.252,00 atau 14,61%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa mengalami peningkatan 1,45% atau sebesar Rp20.500.286.011,34 dari realisasi TA 2017 sebesar Rp1.409.619.453.503,66,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 22 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2018

| No | Kelompok Belanja | Anggaran (Rp) | Realisasi 2018 (Rp) | Rasio % | Lebih/Kurang (Rp) | Realisasi 2017 (Rp) |
|----|--|--------------------|---------------------|---------|-------------------|---------------------|
| 1 | Belanja Bahan Habis Pakai | 118.307.183.893,00 | 96.474.382.072,00 | 81,55 | 21.832.801.821,00 | 151.266.138.542,00 |
| 2 | Belanja Bahan/Material | 58.342.120.812,00 | 48.437.673.673,00 | 83,02 | 9.904.447.139,00 | 66.430.150.924,00 |
| 3 | Belanja Jasa Kantor | 729.504.254.760,00 | 648.030.785.502,00 | 88,83 | 81.473.469.258,00 | 552.191.825.263,00 |
| 4 | Belanja Premi Asuransi | 52.862.892.702,00 | 41.702.221.596,00 | 78,89 | 11.160.671.106,00 | 44.720.671.051,66 |
| 5 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 99.018.286.155,00 | 74.175.916.475,00 | 74,91 | 24.842.369.680,00 | 75.507.607.133,00 |
| 6 | Belanja cetak dan Penggandaan | 53.999.514.745,00 | 43.243.200.528,00 | 80,08 | 10.756.314.217,00 | 53.497.706.408,00 |
| 7 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 8.084.954.000,00 | 6.454.252.959,00 | 79,83 | 1.630.701.041,00 | 5.425.587.000,00 |
| 8 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 2.345.100.000,00 | 731.093.540,00 | 31,18 | 1.614.006.460,00 | 2.777.430.000,00 |
| 9 | Belanja Sewa Alat Berat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Belanja Sewa perlengkapan dan Peralatan Kantor | 26.021.030.000,00 | 24.690.505.750,00 | 94,89 | 1.330.524.250,00 | 29.179.988.700,00 |
| 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 146.731.176.050,00 | 130.926.169.871,00 | 89,23 | 15.805.006.179,00 | 141.886.280.702,00 |
| 12 | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 7.159.875.000,00 | 6.613.729.600,00 | 92,37 | 546.145.400,00 | 6.326.068.000,00 |
| 13 | Belanja Pakaian Kerja | 8.549.796.300,00 | 8.037.002.550,00 | 94,00 | 512.793.750,00 | 7.706.126.800,00 |
| 14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari | 9.188.085.000,00 | 8.462.128.300,00 | 92,10 | 725.956.700,00 | 8.073.344.200,00 |
| 15 | Belanja Perjalanan Dinas | 96.984.524.950,00 | 80.847.385.191,00 | 83,36 | 16.137.139.759,00 | 77.990.367.861,00 |
| 16 | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 100,00 | 0,00 | 175.000.000,00 |
| 17 | Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis | 8.438.660.000,00 | 6.106.497.950,00 | 72,36 | 2.332.162.050,00 | 5.351.952.900,00 |
| 18 | Belanja Pemeliharaan | 27.117.565.599,00 | 21.787.229.630,00 | 80,34 | 5.330.335.969,00 | 23.662.921.861,00 |
| 19 | Belanja Jasa Konsultasi | 20.256.484.575,00 | 14.374.714.500,00 | 70,96 | 5.881.770.075,00 | 22.329.666.900,00 |
| 20 | Belanja Barang yang akan dijual Kepada Masyarakat | 523.800.000,00 | 509.272.500,00 | 97,23 | 14.527.500,00 | 0,00 |
| 21 | Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 3.797.003.816,00 | 1.964.954.816,00 | 51,75 | 1.832.049.000,00 | 0,00 |
| 22 | Belanja Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan Kepada Masyarakat | 188.500.000,00 | 153.900.000,00 | 81,64 | 34.600.000,00 | 0,00 |



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

| No | Kelompok Belanja | Anggaran (Rp) | Realisasi 2018 (Rp) | Rasio % | Lebih/Kurang (Rp) | Realisasi 2017 (Rp) |
|---------------|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|
| 23 | Belanja Bantuan Sosial yang akan diserahkan Kepada Masyarakat | 31.000.000,00 | 30.618.700,00 | 98,77 | 381.300,00 | 0,00 |
| 24 | Belanja Barang dan Jasa Dana Kesehatan Gratis | 5.519.199.900,00 | 5.088.061.428,00 | 92,19 | 431.138.472,00 | 4.801.249.720,00 |
| 25 | Uang untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 3.575.100.000,00 | 2.311.300.000,00 | 64,65 | 1.263.800.000,00 | 3.478.600.000,00 |
| 26 | Belanja Barang dan Jasa Dana Bantuan Operasi Kesehatan | 23.728.979.000,00 | 23.339.758.400,00 | 98,36 | 389.220.600,00 | 18.276.737.752,00 |
| 27 | Belanja Barang dan Jasa Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional | 13.843.391.900,00 | 10.819.625.957,00 | 78,16 | 3.023.765.943,00 | 18.840.386.527,00 |
| 28 | Belanja Barang dan Jasa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) | 89.798.341.029,00 | 89.795.270.763,00 | 100,00 | 3.070.266,00 | 89.723.645.259,00 |
| 29 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 60.669.536.581,00 | 34.812.087.264,00 | 57,38 | 25.857.449.317,00 | 0,00 |
| JUMLAH | | 1.674.786.356.767,00 | 1.430.119.739.515,00 | 85,39 | 244.666.617.252,00 | 1.409.619.453.503,66 |

7.5.1.2.1.3 Belanja Bunga

| TA 2018 | TA2017 |
|---------------|-------------------------|
| Rp0,00 | Rp254.324.108,38 |

Pada Tahun Anggaran 2018, Belanja Bunga tidak dianggarkan dan tidak terealisasi sampai dengan akhir Desember 2018.

7.5.1.2.1.4 Belanja Subsidi

| TA 2018 | TA2017 |
|---------------|---------------|
| Rp0,00 | Rp0,00 |

Pada Tahun Anggaran 2018, Belanja Subsidi tidak dianggarkan dalam anggaran pokok maupun anggaran perubahan, dan tidak terealisasi sampai dengan akhir Desember 2018.

7.5.1.2.1.5 Belanja Hibah

| TA 2018 | TA2017 |
|-----------------------------|----------------------------|
| Rp137.256.266.580,00 | Rp76.924.413.515,00 |

Belanja Hibah Pemerintah Kota Makassar TA 2018 dianggarkan pada PPKD dan OPD sebesar Rp148.751.000.000,00 yang direalisasikan sebesar Rp137.256.266.580,00 atau 92,27% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp11.494.733.420,00 atau 7,73%. Realisasi Belanja Hibah berupa uang dan barang tersebut mengalami kenaikan 78,43% atau sebesar Rp60.331.853.065,00 dari realisasi TA 2017 sebesar Rp76.924.413.515,00.

Hibah tersebut terdiri dari realisasi Belanja Hibah berupa uang dan berupa barang. Belanja Hibah berupa uang antara lain Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi, Belanja Hibah kepada masyarakat/perorangan dan belanja Bantuan Operasional PAUD. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah berupa uang dan barang disajikan dalam tabel berikut.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Tabel 23 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2018

| No | Jenis Belanja Hibah | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Rasio % |
|---------------|--|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi | 128.510.000.000,00 | 119.911.666.580,00 | 93,31 |
| 2 | Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat | 7.335.000.000,00 | 6.385.000.000,00 | 87,05 |
| 3 | BOP PAUD Masyarakat | 12.906.000.000,00 | 10.959.600.000,00 | 84,92 |
| Jumlah | | 148.751.000.000,00 | 137.256.266.580,00 | 92,27 |

Atas realisasi Belanja Hibah tersebut, diantaranya terdapat Belanja Hibah dalam rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 senilai Rp43.325.000.000,00 kepada KPU Kota Makassar sesuai NPHD Nomor 900/00153/NPHD/BPKAD/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 yang belum dipertanggungjawabkan oleh pihak penerima hibah.

7.5.1.2.1.6 Belanja Bantuan Sosial

| TA 2018 | TA 2017 |
|-------------------------|---------------|
| Rp465.000.000,00 | Rp0,00 |

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp510.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp465.000.000,00 atau 91,18%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp45.000.000,00 atau 8,82%.

7.5.1.2.2 Belanja Modal

| TA 2018 | TA2017 |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Rp746.832.060.455,09 | Rp625.019.873.537,40 |

Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp953.107.491.551,00 dan terealisasi sebesar Rp746.832.060.455,09 atau 78,36%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp206.275.431.095,91 atau 21,64%. Realisasi Belanja Modal mengalami peningkatan 19,49% atau sebesar Rp121.812.186.917,69 dari realisasi Belanja Modal TA 2017 sebesar Rp625.019.873.537,40,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 24 Belanja Modal TA 2018 dan 2017

| Jenis Belanja Modal | TA 2018 (Rp) | TA 2017 (Rp) |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Belanja Tanah | 1.287.268.520,00 | 3.861.152.420,00 |
| Belanja Peralatan dan Mesin | 148.311.772.459,00 | 182.790.683.855,40 |
| Belanja Gedung dan Bangunan | 148.354.692.939,00 | 113.572.141.933,00 |
| Belanja Jalan Irigasi, dan Jaringan | 412.524.720.881,00 | 286.102.528.031,00 |
| Belanja Aset Tetap Lainnya | 32.061.129.098,09 | 35.628.111.498,00 |
| Belanja Aset Lainnya | 4.292.476.558,00 | 3.065.255.800,00 |
| Jumlah | 746.832.060.455,09 | 625.019.873.537,40 |

7.5.1.2.2.1 Belanja Tanah

| TA 2018 | TA 2017 |
|---------------------------|---------------------------|
| Rp1.287.268.520,00 | Rp3.861.152.420,00 |

Belanja Tanah TA 2018 dianggarkan sebesar Rp7.430.045.800,00 dan terealisasi sebesar Rp1.287.268.520,00 atau 17,33%. Terdapat sisa anggaran



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

sebesar Rp6.142.777.280,00 atau 82,67%. Realisasi Belanja Tanah pada TA 2018 mengalami penurunan 66,66% atau sebesar Rp2.573.883.900,00 dibandingkan realisasi Belanja Tanah TA 2017 sebesar Rp3.861.152.420,00.

Tabel 25 Belanja Tanah TA 2018 dan 2017

| Jenis Belanja | TA 2018 (Rp) | TA 2017 (Rp) |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor | 975.983.200,00 | 62.400.000,00 |
| Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum rumah potong hewan | 0,00 | 55.677.400,00 |
| Belanja Modal Pengadaan Tanah sarana umum tempat pembuangan akhir sampah | 0,00 | 42.425.000,00 |
| Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya | 311.285.320,00 | 3.700.650.020,00 |
| Jumlah | 1.287.268.520,00 | 3.861.152.420,00 |

7.5.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin

| TA 2018 | TA 2017 |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Rp148.311.772.459,00 | Rp182.790.683.855,40 |

Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp188.952.542.333,00 dan terealisasi sebesar Rp148.311.772.459,00 atau 78,49%. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin mengalami penurunan 18,86% atau sebesar Rp34.478.911.396,40 dari realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2017 sebesar Rp182.790.683.855,40.

Tabel 26 Belanja Peralatan dan Mesin TA 2018 dan 2017

| Jenis Belanja | TA 2018 (Rp) | TA 2017 (Rp) |
|--|-------------------|-------------------|
| Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat | 27.843.487.050,00 | 10.523.567.537,00 |
| Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor | 37.937.127.552,00 | 36.356.466.865,00 |
| Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | 296.025.000,00 | 303.277.000,00 |
| Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor | 554.250.000,00 | 579.142.100,00 |
| Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tidak Bermotor | 110.000.000,00 | 0,00 |
| Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin | 2.930.783.750,00 | 4.019.403.090,00 |
| Belanja modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Perikanan, Pertanian dan Peternakan | 43.475.000,00 | 0,00 |
| Belanja modal Pengadaan Alat Ukur | 311.110.000,00 | 708.169.400,00 |
| Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan | 58.500.000,00 | 94.220.000,00 |
| Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga | 0,00 | 0,00 |
| Belanja modal Pengadaan Komputer | 15.695.402.236,00 | 14.815.075.286,00 |
| Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 0,00 | 3.225.056.553,00 |
| Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor | 1.616.268.340,00 | 106.700.000,00 |
| Belanja Modal Perlengkapan Kantor | 6.815.192.950,00 | 35.600.356.350,00 |
| Belanja Modal Pengadaan Mebeleur | 6.387.831.628,00 | 7.835.831.469,40 |
| Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur | 1.308.537.300,00 | 2.187.564.800,00 |
| Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga | 663.904.000,00 | 0,00 |



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

| Jenis Belanja | TA 2018 (Rp) | TA 2017 (Rp) |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Belanja modal Pengadaan Alat Studio | 9.984.516.568,00 | 12.456.981.755,00 |
| Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi | 1.263.844.500,00 | 13.763.716.400,00 |
| Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran | 11.159.918.027,00 | 31.217.177.766,00 |
| Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium | 188.500.000,00 | 222.000.000,00 |
| Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota | 20.818.775.500,00 | 0,00 |
| Belanja Modal BLUD | 571.837.558,00 | 0,00 |
| Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan rumah Tangga | 304.126.000,00 | 7.393.529.384,00 |
| Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium | 0,00 | 0,00 |
| Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah | 0,00 | 14.900.000,00 |
| Belanja modal Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api | 844.119.500,00 | 1.367.548.100,00 |
| Belanja Modal Pengadaan Rambu-rambu | 0,00 | 0,00 |
| Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Modal Pengadaan Papan Reklame | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Modal Pengadaan Plat Himbauan | 604.240.000,00 | 0,00 |
| Jumlah | 148.311.772.459,00 | 182.790.683.855,40 |

7.5.1.2.2.3 **Belanja Gedung dan Bangunan**

| TA 2018 | TA 2017 |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Rp148.354.692.939,00 | Rp113.572.141.933,00 |

Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp192.254.053.465,00 dan terealisasi sebesar Rp148.354.692.939,00 atau 77,17%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp43.899.360.526,00 atau 22,83%. Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2018 mengalami peningkatan 30,63% atau sebesar Rp34.782.551.006,00 dibandingkan dengan realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2017 sebesar Rp113.572.141.933,00.

Tabel 27 Belanja Gedung dan Bangunan TA 2018 dan 2017

| Jenis Belanja | TA 2018 (Rp) | TA 2017 (Rp) |
|--|--------------------|-------------------|
| Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 142.371.906.551,00 | 93.377.678.092,00 |
| Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 321.488.823,00 | 3.498.864.121,00 |
| Belanja modal Pengadaan konstruksi tempat berjualan | 780.859.500,00 | 9.304.526.000,00 |
| Belanja modal Pengadaan konstruksi pertanian | 78.818.000,00 | 168.817.000,00 |
| Belanja modal Pengadaan konstruksi peternakan | 65.950.000,00 | 0,00 |
| Belanja modal Pengadaan bangunan tidak permanen | 856.662.500,00 | 4.301.780.000,00 |
| Belanja modal Pengadaan konstruksi areal pemakaman | 483.720.898,00 | 0,00 |
| Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan | 0,00 | 170.062.700,00 |



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

| Jenis Belanja | TA 2018 (Rp) | TA 2017 (Rp) |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Patok tanah/wilayah | 373.220.617,00 | 0,00 |
| Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana dan Prasarana Olahraga | 2.635.638.050,00 | 2.696.311.020,00 |
| Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Taman dan Jalur | 386.428.000,00 | 54.103.000,00 |
| Jumlah | 148.354.692.939,00 | 113.572.141.933,00 |

7.5.1.2.2.4 **Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan**

| TA 2018 | TA2017 |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Rp412.524.720.881,00 | Rp286.102.528.031,00 |

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp524.624.080.580,00 dan terealisasi sebesar Rp412.524.720.881,00 atau 78,63%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp112.099.359.699,00 atau 21,37%. Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2018 mengalami kenaikan 44,19% atau sebesar Rp126.422.192.850,00 dibandingkan realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2017 sebesar Rp286.102.528.031,00.

Tabel 28 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2018 dan 2017

| Jenis Belanja | TA 2018 (Rp) | TA 2017 (Rp) |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Belanja modal Pengadaan Jalan | 316.222.748.325,00 | 224.262.758.717,00 |
| Belanja modal Pengadaan Jembatan | 2.692.357.060,00 | 2.962.852.550,00 |
| Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi | 89.115.185.436,00 | 57.207.656.764 |
| Belanja modal Pengadaan Jaringan Air Minum | 0,00 | 1.531.160.000,00 |
| Belanja modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon | 770.256.060,00 | 138.100.000,00 |
| Belanja modal Pengadaan Jalan, Taman | 3.724.174.000,00 | |
| Jumlah | 412.524.720.881,00 | 286.102.528.031,00 |

7.5.1.2.2.5 **Belanja Aset Tetap Lainnya**

| TA 2018 | TA 2017 |
|----------------------------|----------------------------|
| Rp32.061.129.098,09 | Rp35.628.111.498,00 |

Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp35.024.524.273,00 terealisasi sebesar Rp32.061.129.098,09 atau 91,54%. Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2018 mengalami penurunan 10,01% atau sebesar Rp3.566.982.399,91 dibandingkan Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2017 sebesar Rp35.628.111.498,00.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Tabel 29 Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2018 dan 2017

| Jenis Belanja | TA 2018 (Rp) | TA 2017 (Rp) |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Belanja modal Pengadaan Buku | 540.544.000,00 | 428.517.910,00 |
| Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan | 62.000.000,00 | 156.082.750,00 |
| Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman | 0,00 | 1.675.645.750,00 |
| Belanja Modal Dana BOS | 31.458.585.098,09 | 33.367.865.088,00 |
| Jumlah | 32.061.129.098,09 | 35.628.111.498,00 |

7.5.1.2.2.6

Belanja Aset Lainnya

| TA 2018 | TA2017 |
|---------------------------|---------------------------|
| Rp4.292.476.558,00 | Rp3.065.255.800,00 |

Belanja Aset Lainnya Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp4.822.245.100,00 terealisasi sebesar Rp4.292.476.558,00,00 atau 89,01%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp529.768.542,00,00 atau 10,99%. Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2018 mengalami peningkatan 40,04% atau sebesar Rp1.227.220.758,00 dibandingkan Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2017 sebesar Rp3.065.255.800,00. Belanja Aset lainnya merupakan Belanja Aset Tak Berwujud antara lain berupa Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM), Aplikasi Berbasis *Website* dan *Mobile*, SIM BLUD, dan Software Integrasi CCTV.

7.5.1.2.3

Belanja Tidak Terduga

| TA 2018 | TA2017 |
|-------------------------|---------------------------|
| Rp120.654.280,00 | Rp7.556.531.068,00 |

Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp120.654.280,00 atau 4,02%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.879.345.720,00 atau 95,98%. Belanja Tidak Terduga tahun 2018 merupakan terdiri atas:

Tabel 30 Belanja Tidak Terduga TA 2018

| NO | URAIAN | NAMA PENERIMA | JUMLAH |
|----|--|---------------|-----------------------|
| 1 | Pengembalian atas penyetoran BPHTB | Wahyuliana | 78.550.000,00 |
| 2 | Pengembalian kesalahan Transfer Taspen | Taspen | 42.104.280,00 |
| | Jumlah | | 120.654.280,00 |



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

7.5.1.3 Transfer

| TA 2018 | TA2017 |
|---------------------------|---------------------------|
| Rp3.094.538.000,00 | Rp1.091.333.000,00 |

Transfer Tahun 2018 direncanakan sebesar Rp3.094.538.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.094.538.000,00 atau 100,00%. Realisasi Transfer mengalami peningkatan dari realisasi Transfer TA 2017 sebesar Rp2.003.205.000,00 atau 183,56%. Belanja transfer sendiri terdiri atas transfer bantuan keuangan.

7.5.1.3.1 Transfer Bagi Hasil Ke Kelurahan

| TA 2018 | TA2017 |
|---------------|---------------|
| Rp0,00 | Rp0,00 |

Pada Tahun Anggaran 2018, transfer bagi hasil ke kelurahan tidak dianggarkan dalam anggaran pokok maupun anggaran perubahan dan tidak terealisasi sampai dengan akhir Desember 2018.

7.5.1.3.2 Transfer Bantuan Keuangan

| TA 2018 | TA2017 |
|---------------------------|---------------------------|
| Rp3.094.538.000,00 | Rp1.091.333.000,00 |

Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2018 direncanakan sebesar Rp3.094.538.000,00 terealisasi sebesar Rp3.094.538.000,00 atau 100,00%. Belanja Bantuan Keuangan diperuntukkan sebagai bantuan kepada Provinsi dan Partai Politik. Adapun anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Keuangan tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 31 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2018

| No. | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Rasio % |
|-----|--|----------------|----------------|---------|
| 1 | Belanja Bantuan Kepada Partai Golongan Karya | 159.435.000,00 | 159.435.000,00 | 100,00 |
| 2 | Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 92.080.000,00 | 92.080.000,00 | 100,00 |
| 3 | Belanja Bantuan Kepada Partai Amanat Nasional | 88.608.000,00 | 88.608.000,00 | 100,00 |
| 4 | Belanja Bantuan Kepada Partai Keadilan Sejahtera | 82.649.000,00 | 82.649.000,00 | 100,00 |
| 5 | Belanja Bantuan Kepada Partai Persatuan Pembangunan | 98.836.000,00 | 98.836.000,00 | 100,00 |
| 6 | Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrat | 160.739.000,00 | 160.739.000,00 | 100,00 |
| 8 | Belanja bantuan Kepada Partai Hanura | 84.458.000,00 | 84.458.000,00 | 100,00 |
| 9 | Belanja bantuan Kepada Partai Gerindra | 134.063.000,00 | 134.063.000,00 | 100,00 |
| 11 | Belanja bantuan Kepada Partai Bulan Bintang | 38.623.000,00 | 38.623.000,00 | 100,00 |
| 14 | Belanja bantuan Kepada Partai Nasional Demokrat | 110.077.000,00 | 110.077.000,00 | 100,00 |
| 15 | Belanja bantuan Kepada Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 44.970.000,00 | 44.970.000,00 | 100,00 |



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

| No. | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Rasio % |
|---------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 16 | Belanja Bantuan Kepada Provinsi | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 100,00 |
| Jumlah | | 3.094.538.000,00 | 3.094.538.000,00 | 100,00 |

| 7.5.1.3 | Pembiayaan | TA 2018 | TA 2017 |
|---------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | Rp272.358.289.419,35 | 169.622.344.605,69 |

Dalam Tahun Anggaran 2018, Pembiayaan Netto direncanakan sebesar Rp197.353.939.000, dan terealisasi sebesar Rp272.358.289.419,35 atau 138,00%. Pos pembiayaan daerah yang terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan

| 7.5.1.3.1 | Penerimaan Pembiayaan | TA 2018 | TA2017 |
|-----------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Rp272.358.289.419,35 | Rp173.412.430.770,73 |

Penerimaan Pembiayaan direncanakan sebesar Rp272.353.939.000,00 dapat direalisasi sebesar Rp272.358.289.419,35 atau 100% terdapat selisih kurang Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp4.350.419,35 atau 0,001%.

Kelompok Penerimaan Pembiayaan dibagi menurut jenis Penerimaan Pembiayaan yang terdiri atas:

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dianggarkan sebesar Rp272.353.939.000,00 dan terealisasi sebesar Rp272.353.939.419,35 atau 100%.
- Penerimaan Kembali Pinjaman Modal/Dana Bergulir tidak dianggarkan namun dapat terealisasi sebesar Rp4.350.000,00.

| 7.5.1.3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | TA 2018 | TA2017 |
|-----------|------------------------|---------------|---------------------------|
| | | Rp0,00 | Rp3.790.086.165,04 |

Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp75.000.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

| 7.5.1.3.3 | SILPA | TA 2018 | TA2017 |
|-----------|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Rp174.757.015.684,91 | Rp272.353.939.419,35 |

Sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) Tahun Anggaran 2018 yaitu sebesar Rp174.757.015.684,91 mengalami penurunan dari Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp97.596.923.734,44 atau sebanyak 35,83%. Silpa tersebut terdiri dari:



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Tabel 32 Rincian Silpa TA 2018

| No | Uraian | Nilai |
|---------------|------------------------------|---------------------------|
| 1 | Kas di Kas Daerah | 163.894.359.620,58 |
| 2 | Kas di Bendahara Pengeluaran | 4.333.124.383,00 |
| 3 | Kas di Bendahara JKN | 1.018.371.115,00 |
| 4 | Kas di BLUD | 4.453.663.884,00 |
| 5 | Kas di BOS | 1.057.496.682,33 |
| Jumlah | | 174.757.015.684,91 |



7.5.2 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

7.5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Saldo Anggaran Lebih awal tahun 2018 adalah sebesar Rp272.353.939.419,35.

7.5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. Tahun 2018 Penggunaan SAL merupakan Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp272.353.939.419,35.

7.5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2018 adalah sebesar Rp174.757.015.684,91.

a. Surplus/Defisit – LRA

Merupakan selisih lebih/kurang antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

Surplus/Defisit – LRA tahun 2018 sebesar Rp97.601.273.734,44 dan pada tahun 2017 sebesar Rp102.731.594.813,66.

b. Pembiayaan Netto

Adalah selisih antara Penerimaan Pembiayaan setelah dikurangi Pengeluaran Pembiayaan selama satu periode pelaporan. Pembiayaan Netto tahun 2018 sebesar Rp272.358.289.419,35 atau naik 60,56% sebesar Rp102.735.944.813,66 dari tahun 2017.

7.5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Merupakan koreksi kesalahan pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya. Untuk tahun 2018 tidak terdapat koreksi kesalahan pembukuan.

7.5.2.5 Saldo Anggaran lebih pada Tahun 2018 sebesar Rp174.757.015.684,91



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

7.5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan serta menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pada tanggal tertentu.

7.5.3.1 Aset

| | 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| | Rp27.060.353.343.958,00 | Rp26.523.128.827.783,70 |

Aset adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya, terdiri dari:

Tabel 33 Rincian Aset Per 31 Desember 2018 dan 2017

| No. | Uraian | 31 Desember 2018 (Rp) | 31 Desember 2017 (Rp) |
|-----|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 | Aset Lancar | 708.477.735.910,65 | 574.687.715.429,29 |
| 2 | Investasi Jangka Panjang | 740.892.292.395,80 | 743.190.974.478,73 |
| 3 | Aset Tetap | 25.445.272.602.925,10 | 25.037.408.151.902,10 |
| 4 | Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Aset Lainnya | 165.710.712.726,36 | 167.841.985.973,58 |
| | Jumlah | 27.060.353.343.958,00 | 26.523.128.827.783,70 |

7.5.3.1.1 Aset Lancar

| | 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|--|------------------------------|-----------------------------|
| | Rp.708.477.735.910,65 | Rp574.687.715.429,29 |

Aset Lancar meliputi Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, Piutang Lainnya dan Persediaan. Nilai Aset Lancar Pemerintah Kota Makassar per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp708.477.735.910,65 dan Rp574.687.715.429,29 sebagai berikut.

Tabel 34 Rincian Aset Lancar Per 31 Desember TA 2018 dan 2017

| No. | Uraian | 31 Desember 2018 (Rp) | 31 Desember 2017 (Rp) |
|-----|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Kas di Kas Daerah | 163.894.359.620,58 | 269.166.326.216,93 |
| 2 | Kas di Bendahara Pengeluaran | 4.333.124.383,00 | 0,00 |
| 3 | Kas di Bendahara Penerimaan | 0,00 | 0,00 |



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

| No. | Uraian | 31 Desember 2018 (Rp) | 31 Desember 2017 (Rp) |
|-----|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 4 | Kas di Bendahara JKN | 1.018.371.115,00 | 589.541.288,00 |
| 5 | Kas di BLUD | 4.453.663.884,00 | 2.025.302.612,00 |
| 6 | Kas Dana BOS | 0,00 | 1.287.019.391,27 |
| 7 | Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran | 1.487.139.856,98 | 166.174.844,00 |
| 7 | Piutang Pajak | 423.765.655.006,50 | 307.663.661.114,09 |
| 8 | Piutang Retribusi | 22.749.598.980,00 | 16.587.299.443,00 |
| 9 | Piutang Deviden | 44.532.083.159,67 | 1.953.283.273,25 |
| 10 | Piutang Dana Bagi Hasil Pajak | 112.209.388.826,00 | 67.425.425.289,00 |
| 11 | Belanja Dibayar Dimuka | 146.783.359,16 | 1.062.957.858,83 |
| 12 | Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi | 1.536.522.736,01 | 1.899.815.791,90 |
| 13 | Piutang Lainnya | 55.943.814.382,32 | 3.912.419.859,48 |
| 14 | Piutang BLUD | 21.166.004.130,00 | 9.108.434.320,00 |
| 15 | Penyisihan Piutang Tak Tertagih | (209.883.836.907,57) | (166.280.859.760,35) |
| 16 | Persediaan | 61.125.063.379,00 | 58.120.913.887,89 |
| | Jumlah | 708.477.735.910,65 | 574.687.715.429,29 |

7.5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

| 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Rp163.894.359.620,58 | Rp269.166.326.216,93 |

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp163.894.359.620,58 dan Rp269.166.326.216,93 sebagai berikut.

Saldo Kas/Setara Kas per 31 Desember 2018 terdiri dari:

- Saldo awal 1 Januari 2018 (*Audited*) Rp 269.166.326.216,93
- Penurunan Kas Bersih Periode 1
Januari s.d. 31 Desember 2018 Rp 105.271.966.596,35 -

Saldo Akhir Kas di BUD Rp 163.894.359.620,58

Rincian saldo pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai berikut.

Tabel 35 Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2018 dan 2017

| No. | Nama Bank | Nama Bank Nomor Rekening | Saldo Rekening | |
|-----|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 31 Desember 2018 (Rp) | 31 Desember 2017 (Rp) |
| 1. | Bank SulSelBar Cabang Utama Makassar | Bank Sulselbar 130-001-000003414 3 | 163.894.359.620,58 | 169.166.326.216,93 |



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

| No. | Nama Bank | Nama Bank Nomor Rekening | Saldo Rekening | |
|---------------|--|--|---------------------------|---------------------------|
| | | | 31 Desember 2018 (Rp) | 31 Desember 2017 (Rp) |
| 2. | Deposito (Bank BRI Cabang Ahmad Yani Makassar) | Bank Rakyat Indonesia 0050-01-00851- 40-4 | 0,00 | 100.000.000.000,00 |
| 3. | Deposito (Bank BRI Cabang Somba Opu Makassar) | Bank Rakyat Indonesia 3050-01-000765-40-8 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | | | 163.894.359.620,58 | 269.166.326.216,93 |

Secara rinci dapat dilihat pada *Lampiran 1*.

| 7.5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran | 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|---|------------------|---------------------------|
| | | Rp4.333.124.383,00 |

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp4.333.124.383,00 dan Rp0,00. Adapun rincian Kas di Bendahara Penerimaan dapat dilihat pada *Lampiran 2*.

| 7.5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan | 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|--|------------------|------------------|
| | | 0,00 |

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00 dan saldo Kas Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00.

Adapun rincian Kas di Bendahara Penerimaan dapat dilihat pada *Lampiran 3*.

| 7.5.3.1.1.4 Kas di Bendahara JKN | 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|----------------------------------|------------------|---------------------------|
| | | Rp1.018.371.115,00 |

Sisa kas di Bendahara JKN per 31 Desember 2018 pada Puskesmas selaku penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terdapat sisa kas sebesar Rp1.018.371.115,00 yang merupakan sisa kas di rekening masing-masing puskesmas sebesar Rp1.018.371.115,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 36 Kas di Bendahara JKN Puskesmas Per 31 Desember 2018

| NO | NAMA PUSKESMAS | NO REKENING | RINCIAN SALDO AKHIR 31/12/2018 | |
|----|----------------|---------------------|--------------------------------|-------------|
| | | | SALDO BANK | SALDO TUNAI |
| 1 | ANDALAS | 130-002-000030127-1 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ANTANG | 130-002-000030128-9 | 117.312.556,00 | 0,00 |
| 3 | ANT.PERUMNAS | 130-002-000030129-7 | 9.618.405,00 | 0,00 |
| 4 | ANTARA | 130-002-000030130-1 | 330,00 | 0,00 |



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

| NO | NAMA PUSKESMAS | NO REKENING | RINCIAN SALDO AKHIR 31/12/2018 | |
|---------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|-------------|
| | | | SALDO BANK | SALDO TUNAI |
| 5 | BAROMBONG | 130-002-000030132-7 | 367.349.364,00 | 0,00 |
| 6 | BATUA | 130-002-000030133-5 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | BIRA | 130-002-000030134-3 | 35.173.740,00 | 0,00 |
| 8 | DAHLIA | 130-002-000030136-0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | KARUWISI | 130-002-000030140-8 | 25.960.334,00 | 0,00 |
| 10 | LAYANG | 130-002-000030142-4 | 199.102.470,00 | 0,00 |
| 11 | MACCINI SAWAH | 130-002-000030143-2 | 181.041.900,00 | 0,00 |
| 12 | MALIMONGAN BARU | 130-002-000030145-9 | 26.521.087,00 | 0,00 |
| 13 | MANGASA | 130-002-000030147-5 | 17.626.664,00 | 0,00 |
| 14 | MARADEKAYA | 130-002-000030148-3 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | PANAMBUNGAN | 130-002-000030151-3 | 183,00 | 0,00 |
| 16 | TABARINGAN | 130-002-000030157-2 | 2.400,00 | 0,00 |
| 17 | TAMALANREA | 130-002-000030159-9 | 300,00 | 0,00 |
| 18 | TAMANGAPA | 130-002-000030161-1 | 600,00 | 0,00 |
| 19 | TARAKAN | 130-002-000030162-9 | 18.488,00 | 0,00 |
| 20 | BARRANG LOMPO | 130-002-000030163-7 | 5.175.910,00 | 0,00 |
| 21 | KAPASA | 130-002-000030164-5 | 941.890,00 | 0,00 |
| 22 | KODINGARENG | 130-002-000030165-3 | 82.000,00 | 0,00 |
| 23 | BULUROKENG | 130-002-000030168-8 | 32.442.294,00 | 0,00 |
| 24 | BANGKALA | 130-002-000030166-1 | 200,00 | 0,00 |
| 25 | BALLAPARANG | 130-002-000030484-9 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | TODDOPULI | 130-002-000030485-7 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | TAMALANREA JAYA | 130-002-000030486-5 | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH | | | 1.018.371.115,00 | 0,00 |

Sesuai Perpres Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, pada Pasal 7 ayat (3) dinyatakan bahwa saldo kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN tidak harus disetorkan ke Rekening Kas Daerah dan dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya. Sisa kas tersebut tidak disetor ke rekening kas daerah karena rekening masing-masing puskesmas merupakan bagian dari kas daerah, yang penggunaannya langsung dengan penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) oleh Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang secara rinci dapat dilihat pada *Lampiran 4*.

7.5.3.1.1.5 Kas di BLUD

| 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|---------------------------|---------------------------|
| Rp4.453.663.884,00 | Rp2.025.302.612,00 |

Sisa Kas per 31 Desember 2018 pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas terdapat sisa kas



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

sebesar Rp4.453.663.884,00 yang merupakan sisa kas di rekening BLUD sesuai dengan laporan keuangan BLUD. Rincian sisa kas di BLUD sebagai berikut.

Tabel 37 Rincian Kas di BLUD per 31 Desember 2018 dan 2017

| NO | Satuan Kerja | Nama Bank Nomor Rekening | Saldo Rekening | |
|----|---|--|--------------------------|--------------------------|
| | | | 31 Desember 2018 (Rp) | 31 Desember 2017 (Rp) |
| 1 | Kas Di Bendahara Penerimaan | Bank Rakyat Indonesia 0403-01-000273-30-2 | 10.365.373,00 | 2.023.410.088,00 |
| 2 | Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Daya | Bank Sulselbar 130-002-000020623-5 | 816.180.172,00 | 1.892.524,00 |
| 3 | Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Bara Baraya | Bank Sulselbar 130-002-000030131-9 | 317.918.050,00 | 0,00 |
| 4 | Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Cendrawasih | Bank Sulselbar 130-002-000030135-1 | 174.095.200,00 | 0.00 |
| 5 | Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Jongaya | Bank Sulselbar 130-002-000030137-8 | 357.803.397,00 | 0.00 |
| 6 | Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Jumpandang Baru | Bank Sulselbar 130-002-000030138-6 | 170.013.400,00 | 0.00 |
| 7 | Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Kaluku Bodoa | Bank Sulselbar 130-002-000030139-4 | 156.702.210,00 | 0.00 |
| 8 | Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Kassi Kassi | Bank Sulselbar 130-002-000030141-6 | 372.489.249,00 | 0.00 |
| 9 | Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Makkasau | Bank Sulselbar 130-002-000030144-1 | 110.590.654,00 | 0.00 |
| 10 | Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Mamajang | Bank Sulselbar 130-002-000030146-7 | 146.263.425,00 | 0.00 |
| 11 | Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Minasa Upa | Bank Sulselbar 130-002-000030149-1 | 192.680.370,00 | 0.00 |
| 12 | Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Pampang | Bank Sulselbar 130-002-000030150-5 | 117.590.750,00 | 0.00 |
| 13 | Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Pattingalloang | Bank Sulselbar 130-002-000030152-1 | 15.759.124,00 | 0.00 |
| 14 | Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Pertiwi | Bank Sulselbar 130-002-000030153-0 | 143.845.604,00 | 0.00 |



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

| NO | Satuan Kerja | Nama Bank Nomor Rekening | Saldo Rekening | |
|---------------|---|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 31 Desember 2018 (Rp) | 31 Desember 2017 (Rp) |
| 15 | Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Rappokalling | Bank Sulselbar 130-002-000030154-8 | 88.653.150,00 | 0.00 |
| 16 | Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Sudiang | Bank Sulselbar 130-002-000030155-6 | 224.453.760,00 | 0.00 |
| 17 | Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Sudiang Raya | Bank Sulselbar 130-002-000030156-4 | 173.016.800,00 | 0.00 |
| 18 | Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Tamalate | Bank Sulselbar 130-002-000030158-1 | 238.095.025,00 | 0.00 |
| 19 | Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Tamamaung | Bank Sulselbar 130-002-000030160-2 | 227.735.676,00 | 0.00 |
| 20 | Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Paccerakkang | Bank Sulselbar 130-002-000030167-0 | 182.990.610,00 | 0.00 |
| 21 | Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Maccini Sombala | Bank Sulselbar 130-002-000030126-2 | 216.421.885,00 | 0.00 |
| Jumlah | | | 4.453.663.884,00 | 2.025.302.612,00 |

Adapun rincian kas di BLUD dapat dilihat pada *Lampiran 5*.

7.5.3.1.1.6 Kas Dana Bos

| 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|------------------|---------------------------|
| Rp0,00 | Rp1.287.019.391,27 |

Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan sisa kas di Bendahara Dana BOS pada tiap sekolah Lingkup Pemerintah Kota Makassar mulai tingkat SD dan SMP dengan total nilai sebesar Rp1.487.139.856,98. Kas Dana BOS disajikan sebagai bagian dari Kas Lainnya sesuai Bultek 14 PSAP.

**7.5.3.1.1.6 Kas Lainnya di
Bendahara
Pengeluaran**

| 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|---------------------------|-------------------------|
| Rp1.487.139.856,98 | Rp166.174.844,00 |

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.487.139.856,98 merupakan kas dana BOS, dimana sebesar Rp998.288.662,00 merupakan sisa kas di bank dan sebesar Rp488.851.194,98 merupakan sisa kas tunai di Bendahara BOS (dapat dilihat pada *Lampiran 6*). Adapun Kas Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp166.174.844,00 merupakan utang PFK pada 9 SKPD seperti pada rincian berikut:

**Tabel 38 Rincian Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
per 31 Desember 2018 dan 2017**



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

| NO | Satuan Kerja | Nama Bank Nomor Rekening | Saldo Rekening | |
|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | 31 Desember 2018 (Rp) | 31 Desember 2017 (Rp) |
| 1 | Dinas Pemadam Kebakaran | Bank Sulselbar 130-002-000015305-1 | 0,00 | 750.000,00 |
| 2 | Dinas Perhubungan | Bank Sulselbar 130-002-000018551-3 | 0,00 | 545.454,00 |
| 3 | BPBD | Bank Sulselbar 130-002-000027538-5 | 0,00 | 3.855.277,00 |
| 4 | DPMP TSP | Bank Sulselbar 130-002-000019235-8 | 0,00 | 293.409,00 |
| 4 | Dinas Perpustakaan | Bank Sulselbar 130-002-000031635-9 | 0,00 | 900.000,00 |
| 5 | Dinas Perumahan dan Permukiman | Bank Sulselbar 130-002-000029984-5 | 0,00 | 6.810.000,00 |
| 6 | Kecamatan Tamalate | Bank Sulselbar 130-002-000015379-4 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 7 | Kecamatan Mariso | Bank Sulselbar 130-002-000015569-0 | 0,00 | 71.222.000,00 |
| 8 | Kecamatan Bontoala | Bank Sulselbar 130-002-000015413-8 | 0,00 | 1.060.000,00 |
| 9 | Kecamatan Ujung Pandang | Bank Sulselbar 130-002-000015407-3 | 0,00 | 77.738.704,00 |
| 10 | Kas Dana BOS | | 1.487.139.856,98 | 0,00 |
| Jumlah | | | 1.487.139.856,98 | 166.174.844,00 |

7.5.3.1.1.7 Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima oleh Pemerintah Kota Makassar dan/atau hak Pemerintah Kota Makassar yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, kewenangan pemerintah Kota Makassar berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima Pemerintah Kota Makassar dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

7.5.3.1.1.7 Piutang Pajak

| 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|-----------------------------|------------------------------|
| Rp423.765.655.006,50 | Rp 307.663.661.114,09 |

Saldo Piutang pajak per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp423.765.655.006,50 dan sebesar Rp307.663.661.114,09. Saldo piutang ini dicatat berdasarkan nilai nominal sesuai Surat Ketetapan Pajak Daerah yang diterbitkan, yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dan belum dilunasi oleh wajib pajak. Rincian penyesuaian saldo awal dan mutasi penambahan dan pengurangan pajak selama tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Tabel 39 Rincian Mutasi dan Penyesuaian Saldo Awal Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2018

| No | JENIS PAJAK | SALDO AKHIR 31/12/2017 | MUTASI | | SALDO AKHIR PER 31/12/2018 |
|---------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | | | PENAMBAHAN | PENGURANGAN | |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 = (6+7-8) |
| 1 | Pajak Hotel | 364.304.332,00 | 3.990.809.426,17 | 0,00 | 4.355.113.758,17 |
| 2 | Pajak Hiburan | 1.102.588.043,00 | 8.578.014.346,44 | 0,00 | 9.680.602.389,44 |
| 3 | Pajak Air Bawah Tanah | 255.431.180,00 | 461.486.563,00 | 82.235.940,00 | 634.681.803,00 |
| 4 | Pajak Restoran | 1.295.108.789,00 | 980.441.984,36 | 3.000.000,00 | 2.272.550.773,36 |
| 5 | Pajak Parkir | 41.531.050,00 | 1.645.740.092,20 | 2.875.000,00 | 1.684.396.142,20 |
| 6 | PPJ Non Jalan | 6.696.222,00 | 0,00 | 0,00 | 6.696.222,00 |
| 7 | PPJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Pajak Reklame | 7.153.142.226,09 | 2.785.412.299,00 | 2.751.729.997,00 | 7.186.824.528,09 |
| 9 | PBB | 297.444.859.272,00 | 115.463.451.649,24 | 14.963.521.531,00 | 397.944.789.390,24 |
| JUMLAH | | 307.663.661.114,09 | 133.905.356.360,41 | 17.803.362.468,00 | 423.765.655.006,50 |

Saldo Awal Piutang Pajak Daerah pada 1 Januari 2018 sebesar Rp307.663.661.114,09. Saldo tersebut di tahun 2018 mengalami mutasi penambahan akibat belum terealisasi atau belum terbayarkan senilai Rp133.905.356.360,41 dan terdapat pula pengurangan sebesar Rp17.803.362.468,00 yang disebabkan karena pengurangan akibat pelunasan piutang pajak tahun sebelumnya yang tercatat dalam neraca tahun anggaran 2018, sehingga saldo akhir piutang pajak per 31 Desember 2018 berjumlah sebesar Rp423.765.655.006,50.

| Penyisihan Piutang Pajak | 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|--------------------------|------------------|-------------------------------|
| | | (Rp191.203.736.109,23) |

Atas Piutang Pajak Daerah tersebut di atas dilakukan analisis umur piutang. Nilai penyisihan piutang per 31 Desember 2018 sebesar Rp191.203.736.109,23 sehingga piutang pajak daerah disajikan dengan nilai netto sebesar Rp232.561.918.897,27 yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 40 Penyisihan Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2017 dan 2018

dalam Rupiah

| No | JENIS PAJAK | SALDO AKHIR 31/12/2017 | SALDO AKHIR 31/12/2018 |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| DINAS PENDAPATAN | | | |
| 1 | Pajak Hotel Bruto | 364.304.332,00 | 4.355.113.758,17 |
| | Penyisihan | 273.835.182,00 | 763.385.274,62 |
| | Jumlah Netto | 90.469.150,00 | 3.591.728.483,55 |
| 2 | Pajak Hiburan Bruto | 1.102.588.043,00 | 9.680.602.389,44 |
| | Penyisihan | 1.000.249.043,00 | 1.960.389.477,64 |
| | Jumlah Netto | 102.339.000,00 | 7.720.212.911,80 |
| 3 | Pajak Air Tanah Bruto | 255.431.180,00 | 634.681.803,00 |
| | Penyisihan | 10.320.712,20 | 30.265.816,82 |



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

| No | JENIS PAJAK | SALDO AKHIR 31/12/2017 | SALDO AKHIR 31/12/2018 |
|----|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Jumlah Netto | 245.110.467,80 | 604.415.986,18 |
| 4 | Pajak Restoran Bruto | 1.295.108.789,00 | 2.272.550.773,36 |
| | Penyisihan | 1.295.108.789,00 | 1.390.152.987,44 |
| | Jumlah Netto | - | 882.397.785,92 |
| 5 | Pajak Parkir Bruto | 41.531.050,00 | 1.684.396.142,20 |
| | Penyisihan | 41.531.050,00 | 203.230.059,22 |
| | Jumlah Netto | - | 1.481.166.082,98 |
| 6 | PPJ non jalan Bruto | 6.696.222,00 | 6.696.222,00 |
| | Penyisihan | 2.241.223,40 | 4.055.051,00 |
| | Jumlah Netto | 4.454.998,60 | 2.641.171,00 |
| 7 | Pajak Reklame Bruto | 7.153.142.227,00 | 7.186.824.529,00 |
| | Penyisihan | 1.744.438.256,75 | 2.340.991.674,30 |
| | Jumlah Netto | 5.408.703.970,25 | 4.845.832.854,71 |
| 8 | PBB Bruto | 297.444.859.271,09 | 397.944.789.389,24 |
| | Penyisihan | 151.480.157.661,18 | 184.511.265.768,20 |
| | Jumlah Netto | 145.964.701.609,91 | 213.433.523.621,04 |
| | Total Pajak Bruto | 307.663.661.114,09 | 423.765.655.006,50 |
| | Total Penyisihan | 155.847.881.917,53 | 191.203.736.109,23 |
| | Total Pajak Netto | 151.815.779.196,56 | 232.561.918.897,27 |

Adapun Rincian Piutang Pajak dan Penyisihannya selama 2017 dan 2018 berdasarkan umur piutangnya dapat dilihat pada *Lampiran 7*.

Penjelasan masing-masing atas Saldo Akhir Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2018 diuraikan sebagai berikut.

a. Pajak Hotel

Saldo awal piutang Pajak Hotel yang disajikan pada Neraca per 1 Januari 2018 sebesar Rp364.304.332,00. Terdapat penambahan piutang sebesar Rp3.990.809.426,17 sampai 31 Desember 2018, sehingga saldo akhir piutang pajak hotel per 31 Desember 2018 sebesar Rp4.355.113.758,17. Dengan penyisihan sebesar Rp763.385.274,62,00 maka piutang pajak hotel disajikan netto sebesar Rp3.591.728.483,55.

Adapun gambaran piutang pajak hotel per masa pajak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 41 Piutang Pajak Hotel Per 31 Desember 2018

| No | Masa Pajak | Saldo Awal | Mutasi Tahun 2018 | | | Saldo |
|----|------------|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| | | | Penambahan Reklasifikasi Aset Lain-lain | Pengurangan | | |
| | | | | Pelunasan | Penghapusan | |
| 1 | 2007 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 2 | 2008 | 21.817.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.817.000,00 |
| 3 | 2009 | 42.469.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.469.395,00 |
| 4 | 2010 | 56.045.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.045.054,00 |
| 5 | 2011 | 61.834.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.834.583,00 |
| 6 | 2012 | 180.938.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.938.300,00 |
| 7 | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 2017 | 0,00 | 3.990.809.426,17 | 0,00 | 0,00 | 3.990.809.426,17 |
| | | 364.304.332,00 | 3.990.809.426,17 | 0,00 | 0,00 | 4.355.113.758,17 |



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

b. Pajak Restoran

Saldo awal piutang Pajak Restoran yang disajikan pada Neraca per 1 Januari 2018 sebesar Rp1.295.108.789,00. Terdapat penambahan piutang sebesar Rp980.441.984,36 sampai 31 Desember 2018 dan pengurangan piutang pajak restoran yang secara kumulatif berjumlah sebesar Rp3.000.000,00. Pengurangan ini bersumber dari pelunasan piutang pajak restoran untuk masa pajak tahun 2010, sehingga saldo akhir piutang pajak restoran per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.272.550.773,36. Dengan penyisihan piutang sebesar Rp1.390.152.987,44, maka piutang pajak restoran disajikan netto sebesar Rp882.397.785,92.

Adapun rincian piutang pajak restoran per masa pajak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 42 Piutang Pajak Restoran Per 31 Desember 2018

dalam Rupiah

| No | Masa Pajak | Saldo Awal | Mutasi Tahun 2018 | | | | Saldo Akhir |
|----|------------|-------------------------|---|--------------|-------------|---------------|-------------------------|
| | | | Penambahan Reklasifikasi Aset Lain-lain | Pengurangan | | | |
| | | | | Pelunasan | Penghapusan | Reklasifikasi | |
| 1 | 2007 | 26.486.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.486.277,00 |
| 2 | 2008 | 126.637.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.637.322,00 |
| 3 | 2009 | 72.773.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.773.267,00 |
| 4 | 2010 | 492.510.948,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 489.510.948,00 |
| 5 | 2011 | 275.994.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.994.600,00 |
| 6 | 2012 | 300.706.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.706.375,00 |
| 7 | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 2017 | 0,00 | 980.441.984,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980.441.984,36 |
| | | 1.295.108.789,00 | 980.441.984,36 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.272.550.773,36 |

c. Pajak Hiburan

Saldo awal piutang Pajak Hiburan yang disajikan pada Neraca per 1 Januari 2018 adalah sebesar Rp1.102.588.043,00 Terdapat penambahan sebesar Rp8.578.014.346,44 sampai akhir 31 Desember 2018 sehingga saldo akhir nilai piutang pajak hiburan per 31 Desember 2018 senilai Rp9.680.602.389,44. Dengan penyisihan piutang sebesar Rp1.960.389.477,64 sehingga pajak hiburan disajikan netto sebesar Rp7.720.212.911,80.

Adapun Rincian piutang pajak hiburan per masa pajak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 43 Piutang Pajak Hiburan Per 31 Desember 2018

dalam Rupiah

| No | Masa Pajak | Saldo Awal | Mutasi Tahun 2018 | | | Saldo Akhir |
|----|------------|---------------|---|-------------|-------------|---------------|
| | | | Penambahan Reklasifikasi Aset Lain-lain | Pengurangan | | |
| | | | | Pelunasan | Penghapusan | |
| 1 | 2008 | 39.117.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.117.552,00 |



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

| | | | | | | |
|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 2 | 2009 | 156.927.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.927.237,00 |
| 3 | 2010 | 270.417.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.417.118,00 |
| 4 | 2011 | 431.448.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431.448.136,00 |
| 5 | 2012 | 204.678.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.678.000,00 |
| 6 | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 2017 | 0,00 | 8.578.014.346,44 | 0,00 | 0,00 | 8.578.014.346,44 |
| | | 1.102.588.043,00 | 8.578.014.346,44 | 0,00 | 0,00 | 9.680.602.389,44 |

d. Pajak Reklame

Saldo awal piutang Pajak Reklame yang disajikan pada Neraca per 1 Januari 2018 sebesar Rp7.153.142.226,09. Terdapat penambahan piutang pada tahun 2018 sebesar Rp2.785.412.299,00 yang merupakan piutang murni ditahun 2018. Selain penambahan piutang juga terdapat pengurangan piutang yang bersumber dari pelunasan piutang pajak tahun sebelumnya dengan nilai sebesar Rp2.751.729.997,00. Sehingga saldo akhir piutang pajak reklame adalah sebesar Rp7.186.824.529,00. Dengan penyisihan sebesar Rp2.340.991.674,30 sehingga pajak reklame disajikan netto sebesar Rp4.845.832.854,71.

Adapun Rincian piutang pajak per masa pajak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 44 Piutang Pajak Reklame Per 31 Desember 2018
dalam Rupiah

| No | Masa Pajak | Saldo Awal | Mutasi Tahun 2018 | | | Saldo |
|----|------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | Penambahan | | Pengurangan | |
| | | | Koreksi Saldo Awal | Tahun berjalan | | |
| 1 | 2010 | 563.637.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563.637.000,00 |
| 2 | 2011 | 219.316.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.316.400,00 |
| 3 | 2012 | 252.325.550,00 | 0,00 | 0,00 | 4.670.000,00 | 247.655.550,00 |
| 4 | 2013 | 643.106.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643.106.072,00 |
| 5 | 2014 | 509.669.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509.669.475,00 |
| 6 | 2015 | 441.780.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441.780.200,00 |
| 7 | 2016 | 694.494.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694.494.480,00 |
| 8 | 2017 | 3.828.813.050,00 | 0,00 | 0,00 | 2.747.059.997,00 | 1.081.753.053,00 |
| 9 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 2.785.412.299,00 | 0,00 | 2.785.412.299,00 |
| | | 7.153.142.227,00 | 0,00 | 2.785.412.299,00 | 2.751.729.997,00 | 7.186.824.529,00 |

e. Pajak Parkir

Saldo awal piutang Pajak Parkir yang disajikan pada Neraca per 1 Januari 2018 sebesar Rp41.531.050,00. Terdapat penambahan sebesar Rp1.645.740.092,20, dan pengurangan sebesar Rp2.875.000,00 sehingga saldo akhir per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.684.396.142,20. Dengan penyisihan sebesar Rp203.230.059,22 sehingga pajak parkir



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

disajikan netto sebesar Rp1.481.166.082,98. Adapun Rincian piutang pajak parkir per masa pajak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 45 Piutang Pajak Parkir Per 31 Desember 2018

dalam Rupiah

| No | Masa Pajak | Saldo Awal | Mutasi Tahun 2018 | | | Saldo |
|----|------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------|-------------------------|
| | | | Penambahan | Pengurangan | | |
| | | | | Pelunasan | Penghapusan | |
| 1 | 2007 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| 2 | 2008 | 3.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.160.000,00 |
| 3 | 2009 | 3.462.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.462.500,00 |
| 4 | 2010 | 7.389.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.389.800,00 |
| 5 | 2011 | 14.365.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.365.250,00 |
| 6 | 2012 | 13.018.500,00 | 0,00 | 2.875.000,00 | 0,00 | 10.143.500,00 |
| 7 | 2017 | 0,00 | 1.645.740.092,20 | 0,00 | 0,00 | 1.645.740.092,20 |
| | | 41.531.050,00 | 1.645.740.092,20 | 2.875.000,00 | 0,00 | 1.648.396.142,20 |

f. Pajak Penerangan Non PLN

Saldo awal piutang Pajak Penerangan Non PLN yang disajikan pada Neraca per 1 Januari 2018 sebesar Rp6.696.222,00. Dari saldo awal tersebut tidak terdapat penambahan maupun pengurangan piutang pajak. Dengan penyisihan sebesar Rp4.055.051,00, maka Pajak Penerangan Non PLN disajikan netto sebesar Rp2.641.171,00.

Adapun Rincian piutang pajak per masa pajak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 46 Piutang PPJ Non PLN Per 31 Desember 2018

dalam Rupiah

| No | Masa Pajak | Saldo Awal | Mutasi Tahun 2018 | | Saldo Akhir |
|---------------|------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | | | Penambahan | Penghapusan | |
| 1 | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2013 | 1.413.880,00 | 0,00 | 0,00 | 1.413.880,00 |
| 3 | 2014 | 2.515.122,00 | 0,00 | 0,00 | 2.515.122,00 |
| 4 | 2015 | 2.767.220,00 | 0,00 | 0,00 | 2.767.220,00 |
| 5 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | | 6.696.222,00 | 0,00 | 0,00 | 6.696.222,00 |

g. Pajak Air Bawah Tanah

Saldo awal piutang Pajak Air Bawah Tanah yang disajikan pada Neraca per 1 Januari 2018 sebesar Rp255.431.180,00. Terdapat penambahan piutang pajak Air Bawah Tanah khusus tahun 2018 sebesar Rp461.486.563,00 dan pengurangan piutang sebesar Rp82.235.940,00 yang merupakan pelunasan atas piutang tahun 2014 sampai tahun 2017. Sehingga saldo akhir piutang Pajak Air Bawah Tanah yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2018



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

sebesar Rp634.681.803,00,00. Dengan penyisihan sebesar Rp30.265.816,82, maka pajak air bawah tanah disajikan netto sebesar Rp604.415.986,19.

Adapun Rincian piutang pajak Air Bawah Tanah per masa pajak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 47 Piutang Pajak Air Bawah Tanah Per 31 Desember 2018

dalam Rupiah

| No | Masa Pajak | Saldo Awal | Mutasi Tahun 2018 | | Saldo Akhir |
|---------------|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Penambahan | Penghapusan | |
| 1 | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2013 | 349.000,00 | 0,00 | 0,00 | 349.000,00 |
| 3 | 2014 | 5.477.300,00 | 0,00 | 225.000,00 | 5.252.300,00 |
| 4 | 2015 | 20.859.600,00 | 0,00 | 300.000,00 | 20.559.600,00 |
| 5 | 2016 | 43.977.640,00 | 0,00 | 435.000,00 | 43.542.640,00 |
| 6 | 2017 | 184.767.640,00 | 0,00 | 81.275.940,00 | 103.491.700,00 |
| 7 | 2018 | 0,00 | 461.486.563,00 | 0,00 | 461.486.563,00 |
| Jumlah | | 255.431.180,00 | 461.486.563,00 | 82.235.940,00 | 634.681.803,00 |

h. Pajak Bumi dan Bangunan

Saldo awal per 1 Januari 2018 sebesar Rp297.444.859.271,09. Adapun mutasi penambahan selama 2018 sebesar Rp115.463.451.649,24 dan mutasi pengurangan selama 2018 sebesar Rp14.963.521.531,00. Sehingga saldo akhir piutang pajak PBB adalah sebesar Rp397.944.789.389,33.

Dengan demikian, saldo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2018 sebesar Rp397.944.789.389,33 dengan penyisihan sebesar Rp184.511.265.768,20 sehingga pajak bumi dan bangunan disajikan netto sebesar Rp213.433.523.621,04.

7.5.3.1.1.8 Piutang Retribusi

| 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|----------------------------|----------------------------|
| Rp22.749.598.980,00 | Rp16.587.299.443,00 |

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2018 sebesar Rp22.749.598.980,00 dicatat berdasarkan nilai nominal sesuai Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang diterbitkan dan belum dilunasi oleh wajib retribusi. Rincian mutasi dan penyesuaian saldo awal piutang retribusi tahun 2018 dapat diuraikan pada tabel berikut.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Tabel 48 Rincian Mutasi dan Penyesuaian Saldo Awal Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

| NO | SKPD/Jenis Retribusi | SALDO AKHIR 31/12/2017 | KOREKSI SALDO AWAL | SALDO AWAL PER 01/01/2018 | MUTASI DI TAHUN 2018 | | SALDO AKHIR 31/12/2018 |
|---------------|--|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | | | | PENAMBAHAN | PENGURANGAN | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 = (3+4)-5 |
| I | PIUTANG RETRIBUSI UMUM | | | | | | |
| A. | Badan Pendapatan Daerah | | | | | | |
| - | Retribusi Pelataran | 2.176.522.483,00 | | 2.176.522.483,00 | 408.776.397,00 | 88.645.360,00 | 2.496.653.520,00 |
| | Retribusi Titik Reklame | 6.366.683.200,00 | | 6.366.683.200,00 | 21.000.000,00 | 249.500.000,00 | 6.138.183.200,00 |
| B. | DPMPSTP | | | | | | |
| - | Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) | 4.544.995.000,00 | 83.767.000,00 | 4.628.762.000,00 | 1.080.428.000,00 | 419.233.000,00 | 5.289.957.000,00 |
| - | Retribusi Kompensasi Lahan Pekuburan | 0,00 | | 0,00 | 2.117.023.000,00 | 0,00 | 2.117.023.000,00 |
| C | Dinas Lingkungan Hidup Daerah | | | | | | |
| - | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 373.672.000,00 | | 373.672.000,00 | 0,00 | 0,00 | 373.672.000,00 |
| D. | Dinas Komunikasi dan Informatika | | | | | | |
| - | Retribusi Menara Telekomunikasi | 183.355.000,00 | | 183.355.000,00 | 0,00 | 0,00 | 183.355.000,00 |
| E. | Dinas Pemadam Kebakaran | | | | | | |
| - | Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam | 3.420.000,00 | | 3.420.000,00 | 11.670.000,00 | 3.420.000,00 | 11.670.000,00 |
| F. | Dinas Perumahan dan Gedung | | | | | | |
| - | Retribusi Sewa Kamar Penghuni Rusunawa | 47.600.000,00 | 185.725.000,00 | 233.325.000,00 | 379.865.000,00 | 46.610.000,00 | 566.580.000,00 |
| G. | PIUTANG RETRIBUSI SAMPAH KECAMATAN | | | | | | |
| - | Kecamatan Bontoala | 0,00 | | 0,00 | 290.355.500,00 | 0,00 | 290.355.500,00 |
| - | Kecamatan Biringkanaya | 32.000.000,00 | | 32.000.000,00 | 0,00 | 32.000.000,00 | 0,00 |
| - | Kecamatan Makassar | 400.351.000,00 | | 400.351.000,00 | 413.490.000,00 | 1.000.000,00 | 812.841.000,00 |
| - | Kecamatan Mamajang | 22.700.000,00 | | 22.700.000,00 | 482.740.000,00 | 0,00 | 505.440.000,00 |
| - | Kecamatan Mariso | 365.000.760,00 | | 365.000.760,00 | 369.750.000,00 | 122.357.000,00 | 612.393.760,00 |
| - | Kecamatan Panakukang | 221.630.000,00 | | 221.630.000,00 | 454.155.000,00 | 82.053.000,00 | 593.732.000,00 |
| - | Kecamatan Wajo | 821.433.000,00 | | 821.433.000,00 | 301.330.000,00 | 19.362.000,00 | 1.103.401.000,00 |
| - | Kecamatan Manggala | 29.448.000,00 | | 29.448.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.448.000,00 |
| - | Kecamatan Tamalanrea | 120.029.000,00 | | 120.029.000,00 | 0,00 | 54.700.000,00 | 65.329.000,00 |
| - | Kecamatan Rappocini | 324.072.000,00 | | 324.072.000,00 | 774.204.000,00 | 219.352.000,00 | 878.924.000,00 |
| - | Kecamatan Tallo | 171.515.000,00 | | 171.515.000,00 | 47.426.000,00 | 56.559.000,00 | 162.382.000,00 |
| - | Kecamatan Tamalate | 172.921.000,00 | | 172.921.000,00 | 23.638.000,00 | 65.170.000,00 | 131.389.000,00 |
| - | Kecamatan Ujung Tanah | 209.952.000,00 | | 209.952.000,00 | 87.232.000,00 | 11.776.000,00 | 285.408.000,00 |
| - | Kecamatan Ujung Pandang | 0,00 | | 0,00 | 101.462.000,00 | 0,00 | 101.462.000,00 |
| JUMLAH | | 16.587.299.443,00 | 269.492.000,00 | 16.856.791.443,00 | 7.364.544.897,00 | 1.471.737.360,00 | 22.749.598.980,00 |



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Penyisihan Piutang Retribusi | 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
| | (Rp9.344.412.246,58) | (Rp6.554.156.738,33) |

Atas Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp22.749.598.980,00, tersebut dilakukan analisis umur piutang. Nilai penyisihan piutang retribusi tidak tertagih per 31 Desember 2018 sebesar Rp9.344.412.246,58 sehingga piutang retribusi daerah disajikan dengan nilai netto sebesar Rp13.405.186.733,42 yang dirinci sebagai berikut.

Tabel 49 Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2017 dan 2018

dalam rupiah

| No | JENIS RETRIBUSI | SALDO AKHIR 31/12/2018 | SALDO AKHIR 31/12/2017 |
|----------|---|---------------------------|---------------------------|
| 1 | BADAN PENDAPATAN | | |
| - | Pelataran Bruto | 2.496.653.520,00 | 2.176.522.483,00 |
| | Penyisihan | 1.228.090.527,59 | 995.780.887,34 |
| | Jumlah Netto | 1.268.562.992,42 | 1.180.741.595,66 |
| - | Titik Reklame Bruto | 6.138.183.200,00 | 6.366.683.200,00 |
| | Penyisihan | 5.451.294.200,00 | 4.618.364.100,00 |
| | Jumlah Netto | 686.889.000,00 | 1.748.319.100,00 |
| 2 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH | | |
| - | Pelayanan Persampahan/Kebersihan Bruto | 373.672.000,00 | 373.672.000,00 |
| | Penyisihan | 373.672.000,00 | 373.672.000,00 |
| | Jumlah Netto | - | - |
| 3 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | | |
| - | IMB dan Pelataran Bruto | 5.289.957.000,00 | 4.544.995.000,00 |
| | Penyisihan | 1.929.043.540,00 | 438.158.725,00 |
| | Jumlah Netto | 3.360.913.460,00 | 4.106.836.275,00 |
| - | Retribusi Kompensasi Lahan Pekuburan | 2.117.023.000,00 | |
| | Penyisihan | 10.585.115,00 | |
| | Jumlah Netto | 2.106.437.885,00 | |
| 4 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | |
| - | Menara Telekomunikasi Bruto | 183.355.000,00 | 183.355.000,00 |
| | Penyisihan | 91.677.500,00 | 91.677.500,00 |
| | Jumlah Netto | 91.677.500,00 | 91.677.500,00 |
| 5 | DINAS DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG | | |
| - | Sewa Kamar Penghuni Rusunawa Bruto | 566.580.000,00 | 47.600.000,00 |
| | Penyisihan | 20.570.825,00 | 238.000,00 |
| | Jumlah Netto | 546.009.175,00 | 47.362.000,00 |
| 6 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN | | |
| - | Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam | 11.670.000,00 | 3.420.000,00 |



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

| No | JENIS RETRIBUSI | SALDO AKHIR 31/12/2018 | SALDO AKHIR 31/12/2017 |
|----------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Penyisihan | 58.350,00 | 17.100,00 |
| | Jumlah Netto | 11.611.650,00 | 3.402.900,00 |
| B | PIUTANG RETRIBUSI SAMPAH | | |
| 1 | Kecamatan Bontoala | 290.355.500,00 | - |
| 2 | Kecamatan Biringkanaya | - | 32.000.000,00 |
| 3 | Kecamatan Makassar | 812.841.000,00 | 400.351.000,00 |
| 4 | Kecamatan Mamajang | 505.440.000,00 | 22.700.000,00 |
| 5 | Kecamatan Mariso | 612.393.760,00 | 365.000.760,00 |
| 6 | Kecamatan Panakukang | 593.732.000,00 | 221.630.000,00 |
| 7 | Kecamatan Wajo | 1.103.401.000,00 | 821.433.000,00 |
| 8 | Kecamatan Manggala | 29.448.000,00 | 29.448.000,00 |
| 9 | Kecamatan Tamalanrea | 65.329.000,00 | 120.029.000,00 |
| 10 | Kecamatan Rappocini | 878.924.000,00 | 324.072.000,00 |
| 11 | Kecamatan Tallo | 162.382.000,00 | 171.515.000,00 |
| 12 | Kecamatan Tamalate | 131.389.000,00 | 172.921.000,00 |
| 13 | Kecamatan Ujung Tanah | 285.408.000,00 | 209.952.000,00 |
| 14 | Kecamatan Ujung Pandang | 101.462.000,00 | - |
| | Jumlah Piutang Retribusi Sampah Bruto | 5.572.505.260,00 | 2.891.051.760,00 |
| | Penyisihan | 239.420.188,50 | 36.248.426,00 |
| | Jumlah Netto | 5.333.085.071,50 | 2.854.803.334,00 |
| | Total Retribusi Bruto | 22.749.598.980,00 | 16.587.299.443,00 |
| | Penyisihan | 9.344.412.246,58 | 6.554.156.738,34 |
| | Total Retribusi Netto | 13.405.186.733,42 | 10.033.142.704,67 |

Adapun rincian piutang retribusi dan perhitungan penyisihannya dapat dilihat pada *Lampiran 8*.

| | | | |
|--------------------|--|----------------------------|---------------------------|
| 7.5.3.1.1.9 | Piutang Hasil | 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
| | Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Rp44.532.083.159,67 | Rp1.953.283.273,25 |

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2018 sebesar Rp44.532.083.159,67 merupakan kekurangan Bagian Laba Tahun Buku 2017 yang harus disetor ke Kas Daerah dari PD Pasar Makassar Raya, PD. Rumah Pemotongan Hewan, PD Parkir Makassar Raya, dan PDAM Kota Makassar. Rincian dapat dilihat pada tabel berikut dan dapat dilihat pada *Lampiran 9*.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Tabel 50 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

| No. | Jenis Retribusi | Saldo Awal 01/01/2018 (Rp) | Mutasi (Rp) | | Saldo Akhir 31/12/2018 (Rp) |
|---------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | | | Penambahan | Pengurangan | |
| 1. | PD. Pasar Makassar Raya | 256.025.005,75 | 802.874.541,55 | 256.025.000,00 | 802.874.547,30 |
| 2. | PD. Rumah Pematongan Hewan | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 |
| 3. | PD. Parkir Makassar Raya | 1.667.258.267,51 | 662.993.082,95 | 1.093.581.936,79 | 1.236.669.413,67 |
| 5. | PDAM Kota Makassar | 0,00 | 42.462.539.198,70 | 0,00 | 42.462.539.198,70 |
| Jumlah | | 1.953.283.273,25 | 43.928.406.823,20 | 1.349.606.936,79 | 44.532.083.159,67 |

7.5.3.1.1.10 **Piutang Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak**

| 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|-----------------------------|----------------------------|
| Rp112.209.388.826,00 | Rp67.425.425.289,00 |

Piutang Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp112.209.388.826,00 dan sebesar Rp67.425.425.289,00. Piutang tersebut merupakan kurang bayar Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi yang belum di transfer s.d 31 Desember 2018 terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, PBBKB, Pajak Bahan Bakar, dan Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok Tahun 2018 sebesar Rp112.209.388.826,00.

Adapun Rincian Piutang Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dapat dilihat pada *Lampiran 10*.

7.5.3.1.1.11 **Belanja Dibayar Dimuka**

| 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|-------------------------|---------------------------|
| Rp146.783.359,17 | Rp1.062.957.858,83 |

Belanja Dibayar Dimuka sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp146.783.359,17. Belanja dibayar dimuka timbul karena terdapat pembayaran sewa/kontrak yang telah terbayarkan namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 masa kontrak belum habis. Adapun rincian Belanja Dibayar Dimuka dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Tabel 51 Rincian Belanja Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2018

dalam Rupiah

| NO | Jenis Sewa Dibayar Dimuka | Saldo Awal 01/01/2018 | Penyesuaian di Tahun 2018 | | Saldo Akhir 31/12/2018 |
|----|---|--------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | Penambahan | Pengurangan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3+4)-5 |
| 1 | Sekretariat DPRD | 40.861.125,00 | 25.334.925,00 | 40.861.125,00 | 25.334.925,00 |
| | Asuransi Kendaraan Dinas dan Gedung - DPRD | 40.861.125,00 | 25.334.925,00 | 40.861.125,00 | 25.334.925,00 |
| 2 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset | 585.583.333,33 | - | 585.583.333,33 | 0,00 |
| | - Asuransi Barang Milik Daerah | 326.333.333,33 | - | 326.333.333,33 | 0,00 |
| | - Asuransi Gedung | 259.250.000,00 | - | 259.250.000,00 | 0,00 |
| 4 | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 118.493.733,83 | 58.333.333,33 | 106.578.633,00 | 70.248.434,16 |
| | - Sewa Rumah | 118.493.733,83 | 58.333.333,33 | 106.578.633,00 | 70.248.434,16 |
| 5 | KECAMATAN RAPPOCINI | 5.416.666,67 | 0,00 | 5.416.666,67 | 0,00 |



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

| NO | Jenis Sewa Dibayar Dimuka | Saldo Awal 01/01/2018 | Penyesuaian di Tahun 2018 | | Saldo Akhir 31/12/2018 |
|----------|--|--------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | Penambahan | Pengurangan | |
| | - Sewa gedung | 5.416.666,67 | 0,00 | 5.416.666,67 | 0,00 |
| 6 | DINAS PEKERJAAN UMUM | 31.250.000,00 | - | 31.250.000,00 | 0,00 |
| | - Sewa Gedung | 31.250.000,00 | - | 31.250.000,00 | 0,00 |
| 7 | DINAS KESEHATAN | 281.353.000,00 | 21.055.000,00 | 93.137.943,00 | 51.200.000,00 |
| | - Uang muka kerja kegiatan RSUD (BLUD) | 30.145.000,00 | 21.055.000,00 | - | 51.200.000,00 |
| | - Uang muka perjalanan dinas RSUD (BLUD) | 165.808.000,00 | - | 165.808.000,00 | 0,00 |
| | - Uang muka peningkatan mutu SDM RSUD (BLUD) | 7.500.000,00 | - | 7.500.000,00 | 0,00 |
| | - Pembayaran dimuka lainnya RSUD (BLUD) | 77.900.000,00 | - | 77.900.000,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 1.062.957.858,33 | 992.124.525,00 | 769.689.758,00 | 146.783.359,16 |

Rincian dapat dilihat pada *Lampiran 14*.

| | | |
|---|---------------------------|---------------------------|
| 7.5.3.1.1.12 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi | 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
| | Rp1.536.522.736,01 | Rp1.899.815.791,90 |

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp1.536.522.736,01 dan sebesar Rp1.899.815.791,90. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi adalah Tuntutan Ganti Rugi yang telah ada SKTJM dan akan jatuh tempo dalam 12 bulan.

Adapun rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dapat dilihat pada *Lampiran 11*.

| | | |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 7.5.3.1.1.13 Piutang Lainnya | 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
| | Rp55.943.814.382,32 | Rp3.912.419.859,48 |

Piutang Lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 yang belum disetorkan ke Kas Daerah atau dipertanggungjawabkan oleh pihak ketiga sebesar Rp55.943.814.382,32 dengan penyisihan sebesar (Rp8.988.996.271,76) sehingga Piutang Lainnya disajikan netto sebesar Rp46.954.818.110,56, seperti pada tabel berikut.

Tabel 52 Piutang Lainnya

| No | Jenis Piutang Lainnya | Saldo Awal 01/01/2018 (Rp) | Mutasi (Rp) | | Saldo Akhir 31/12/2018 (Rp) |
|----|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | Penambahan | Pengurangan | |
| 1 | PT. Pelitagro Mustika Karya | 923.484.445,48 | 0,00 | 0,00 | 923.484.445,48 |
| 2 | PT. Putra-Putra Nusantara | 2.267.550.374,00 | 0,00 | 0,00 | 2.267.550.374,00 |
| 4 | PT. Dwi Karya Putra | 103.293.650,00 | 0,00 | 103.293.650,00 | 0,00 |
| 6 | Fasum/Fasos | 580.759.440,00 | 0,00 | 0,00 | 580.759.440,00 |
| 7 | Piutang Denda Pajak | 37.331.950,00 | 52.172.020.122,84 | 37.331.950,00 | 52.172.020.122,84 |
| | Jumlah | 3.912.419.859,48 | 52.172.020.122,84 | 140.625.600,00 | 55.943.814.382,32 |



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Adapun Rincian Piutang Lainnya dan Penyisihannya dapat dilihat pada **Lampiran 12** dan **Lampiran 13**.

- a. Piutang Lainnya pada PT Pelitagro Mustika Karya (PT PMK) sebesar Rp923.484.445,48 merupakan tunggakan piutang tahun-tahun sebelumnya yang belum disetor yaitu berupa kontribusi dari aset yang dikerjasamakan antara Pemerintah Kota Makassar dengan PT PMK. Sesuai surat Nomor 005/1350/BKS/XI/2015 tentang rapat evaluasi kerjasama Pemerintah Kota Makassar dengan PT PMK dalam pengelolaan pusat pergudangan/terminal cargo, bahwa Pemerintah Kota Makassar telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan PT PMK untuk membahas tunggakan piutang kontribusi yang belum terselesaikan.
- b. Piutang Lainnya pada PT Putra-Putra Nusantara sebesar Rp2.267.550.374,00 yang terdiri atas Piutang Royalti sebesar Rp2.002.751.872,00 dan Piutang Denda TA 2012 sebesar Rp264.798.502,00, sehingga total sebesar Rp2.267.550.374,40. Piutang ini merupakan kewajiban kontribusi PT PPN dalam kerjasama pengelolaan Pulau Kayangan untuk TA 2006 s.d. TA 2012. Pada TA 2012, Pemkot Makassar memutuskan kerjasama dengan PT PPN. Sampai dengan saat ini penyelesaian kewajiban piutang royalti masih belum ada perkembangan. Piutang Lainnya pada PT PPN per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.267.550.374,00 dengan penyisihan sebesar Rp2.267.550.374,00 sehingga Piutang PT PPN disajikan netto sebesar Rp0,00.
- c. Piutang Lainnya sebesar Rp580.759.440,00, merupakan piutang dana kompensasi sarana pemakaman umum oleh developer atas fasum/fasus pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan yang sumber obyeknya sudah tidak diketahui.

**Penyisihan Piutang
Lainnya**

| 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|-----------------------------|-----------------------------|
| (Rp8.988.996.271,76) | (Rp3.878.821.104,48) |

Atas Piutang Lainnya tersebut di atas dilakukan analisis umur piutang. Nilai penyisihan piutang retribusi tidak tertagih per 31 Desember 2018 sebesar Rp8.988.996.271,76 sehingga piutang lainnya disajikan dengan nilai netto sebesar Rp46.954.818.110,56 yang dirinci dalam **Lampiran 13**.

7.5.3.1.1.14 Piutang BLUD

| 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|----------------------------|---------------------------|
| Rp21.166.004.130,00 | Rp9.108.434.320,00 |

Piutang Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kota Makassar merupakan piutang tahun 2018 sebesar Rp21.166.004.130,00. Piutang tersebut terdiri dari Piutang BPJS, adapun Piutang *In-Health* sebesar Rp640.000,00 dan Piutang Sewa Lahan sebesar Rp10.000.000,00 pada tahun 2017 telah terbayarkan pada tahun 2018. Rincian piutang BLUD dapat dilihat pada **Lampiran 15**.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

7.5.3.1.1.15 Persediaan

| 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|---------------------|---------------------|
| Rp61.125.063.379,00 | Rp58.120.913.887,89 |

Persediaan barang pakai habis/material adalah barang yang dipakai habis dalam satu periode akuntansi, persediaan barang pakai habis/material terdiri dari Obat-obatan, Alat Tulis Kantor (ATK), Barang Cetak, Alat Listrik dan Lain-lain. Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai dan diukur berdasarkan hasil inventarisasi fisik barang yang belum terpakai yang dicantumkan ke dalam neraca daerah.

Persediaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp61.125.063.379,00. Jika dibandingkan dengan Persediaan per 31 Desember 2017 sebesar Rp58.120.913.887,89 maka Persediaan Tahun Anggaran 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp3.004.149.491,11 atau 5,16%, hal ini disebabkan bertambahnya sisa barang pakai habis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Makassar.

Tabel 53 Saldo Persediaan Per 31 Desember 2018 dan 2017

| No. | Jenis Persediaan | Saldo Per 31 Des 2018 (Rp) | Saldo Per 31 Des 2017 (Rp) |
|---------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. | Obat-Obatan | 27.248.315.004,00 | 24.815.133.347,89 |
| 2. | ATK | 7.227.311.732,00 | 973.503.961,00 |
| 3. | Barang Cetak | 274.432.011,00 | 1.147.938.850,00 |
| 4. | Alat Listrik | 13.351.675.350,00 | 8.081.419.790,00 |
| 5. | Tabung Gas | 0,00 | 48.048.000,00 |
| 6. | Alat Kontrasepsi | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Alat Pembersih | 1.621.374.382,00 | 29.812.828,00 |
| 8. | Alat Kesehatan | 288.073.990,00 | 3.802.511.520,00 |
| 9. | Alat Bengkel | 1.362.137.461,00 | 1.145.971.500,00 |
| 10. | Lain-lain | 9.751.743.449,00 | 17.676.681.491,00 |
| 11. | Persediaan Hibah | 0,00 | 399.892.600,00 |
| Jumlah | | 61.125.063.379,00 | 58.120.913.887,89 |

Rincian persediaan per jenis dan per OPD disajikan dalam *Lampiran 16*.

7.5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

| 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|----------------------|----------------------|
| Rp740.892.292.395,80 | Rp743.190.974.478,73 |

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal Pemerintah Kota Makassar dan investasi permanen lainnya.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Saldo Investasi jangka panjang per 31 Desember 2018 sebesar Rp740.892.292.395,80 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp743.190.974.478,73 yang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen.

7.5.3.1.2.1 **Investasi Non Permanen**

| 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|-------------------------|-------------------------|
| Rp443.186.850,00 | Rp442.993.850,00 |

Investasi Non Permanen Lainnya adalah pengeluaran pembiayaan berupa pinjaman kepada kelompok masyarakat dalam rangka peningkatan permodalan dan perekonomian masyarakat dengan jangka waktu pengembalian lebih dari 1 tahun. Investasi Non Permanen Pemerintah Kota Makassar merupakan Pinjaman Modal pada Dinas Koperasi dan UKM kepada Koperasi dan Kelompok Usaha Kecil Menengah.

Saldo pinjaman modal per 31 Desember 2018 sebesar Rp3.650.700.000,00 berasal dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp442.993.850,00 dikurangi pelunasan pinjaman modal pada tahun 2018 sebesar Rp4.350.000,00 dan penurunan saldo akibat penggunaan metode NRV sebesar Rp2.206.706.050,00. Rincian pada *Lampiran 17*.

7.5.3.1.2.2 **Investasi Permanen**

| 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Rp740.449.105.545,80 | Rp742.747.980.628,73 |

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dan dicatat berdasarkan harga perolehan. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp740.449.105.545,80 atau bertambah sebesar Rp2.298.875.082,93 dari saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp742.747.980.628,73. Diantaranya merupakan penyertaan dalam bentuk saham pada perusahaan swasta sebesar Rp24.300.000.000,00 dan penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp716.149.105.545,80.

Dalam Investasi Permanen yang berupa Penyertaan Modal terhadap Perusahaan Daerah/BUMD Pemerintah Kota Makassar sudah menggunakan *equity method* sehingga nilai investasinya berpedoman dari laba/rugi Perusa/BUMD. Untuk perhitungan nilai investasi atas penyertaan modal Perusahaan Daerah per 31 Desember 2018, berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah *Audited*, dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Tabel 54 Investasi Permanen

| No | Uraian | % Kepemilikan | Saldo Awal (Rp) | Penambahan 2018 (Rp) | Laba /Rugi TA.2018 (Rp) | Pembayaran Dividen TA.2018 (Rp) | Saldo Akhir (Rp) |
|-----------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Metode Biaya | | | | | | | |
| 1 | PT. GMTD | 6,50% | 3.300.000.000,00 | 0,00 | | 105.600.000,00 | 3.300.000.000,00 |
| 2 | PT. KIMA | 10,00% | 4.000.000.000,00 | 0,00 | | 170.077.556,00 | 4.000.000.000,00 |
| 3 | SULSELBAR | 1,90% | 17.000.000.000,00 | 0,00 | | 6.246.770.479,00 | 17.000.000.000,00 |
| Jumlah I | | | 24.300.000.000,00 | 0,00 | | 6.522.448.035,00 | 24.300.000.000,00 |
| Metode Ekuitas | | | | | | | |
| 1 | PD. Pasar Makassar Raya | 100,00% | 192.856.036.191,54 | 0,00 | 1.459.771.813,00 | 256.025.000,00 | 194.059.783.004,54 |
| 2 | PD. Rumah Pemotongan Hewan | 100,00% | 4.760.576.101,59 | 0,00 | (95.711.320,00) | 0,00 | 4.664.864.781,59 |
| 3 | PD. Terminal Makassar Metro | 100,00% | 61.527.762.732,37 | 0,00 | (225.375.991,69) | 0,00 | 61.302.386.740,68 |
| 4 | PD. Parkir Makassar Raya | 100,00% | 5.861.238.976,24 | 0,00 | 1.205.441.969,00 | 1.093.581.936,79 | 5.973.099.008,45 |
| 5 | PD. Bank Perkreditan Rakyat | 100,00% | 4.515.156.107,41 | 0,00 | (706.095.365,48) | 0,00 | 3.809.060.741,93 |
| 6 | PD. Air Minum (PDAM) | 96,33% | 448.927.210.519,58 | 0,00 | 40.490.733.785,00 | 41.591.065.653,50 | 446.339.911.268,61 |
| Jumlah II | | | 718.447.980.628,73 | 0,00 | 42.128.764.889,83 | 42.940.672.590,29 | 716.149.105.545,80 |
| TOTAL | | | 742.747.980.628,73 | 0,00 | 42.128.764.889,83 | 49.463.120.625,29 | 740.892.292.395,80 |

Penjelasan penyertaan modal Pemerintah Kota Makassar pada perusahaan daerah dengan menggunakan Metode Ekuitas diuraikan sebagai berikut. Rincian dapat dilihat dalam *Lampiran 18 dan 19*.

- 1) **PD. Pasar Makassar Raya** **Rp 194.059.783.004,54**
Rincian sebagai berikut:
 - Saldo Awal Rp 192.856.036.191,54
 - Penambahan investasi disebabkan laba/rugi tahun berjalan Rp 1.459.771.813,00
 - Pengurangan investasi disebabkan laba/rugi tahun berjalan Rp (194.059.783.004,54)
- 2) **PD. Rumah Potong Hewan** **Rp 4.664.864.781,59**
Rincian sebagai berikut:
 - Saldo Awal Rp 4.760.576.101,59
 - Penambahan investasi dari laba/rugi tahun berjalan Rp 0,00
 - Pengurangan investasi disebabkan adanya laba/rugi tahun berjalan Rp (95.711.320,00)
- 3) **PD. Terminal Makassar Metro** **Rp 61.302.386.740,68**
Rincian sebagai berikut:
 - Saldo Awal Rp 61.527.762.732,37
 - Penambahan investasi dari laba/rugi tahun Rp 0,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

| | | |
|--|-----------|---------------------------|
| - Pengurangan investasi disebabkan adanya laba/rugi tahun berjalan | Rp | (225.375.991,69) |
| - Pengurangan investasi disebabkan penarikan deviden | Rp | (0,00) |
| 4) PD. Parkir Makassar Raya | Rp | 5.973.099.008,45 |
| Rincian sebagai berikut: | | |
| - Saldo Awal | Rp | 5.861.238.976,24 |
| - Penambahan investasi disebabkan adanya laba/rugi tahun berjalan | Rp | 1.205.441.969,00 |
| - Pengurangan investasi disebabkan adanya penarikan deviden | Rp | (1.093.581.936,79) |
| 5) PD. Bank Perkreditan Rakyat | Rp | 3.809.060.741,93 |
| Rincian sebagai berikut : | | |
| - Saldo Awal | Rp | 4.515.156.107,41 |
| - Penambahan investasi disebabkan akumulasi laba/rugi | Rp | (706.095.365,00) |
| - Pengurangan investasi disebabkan laba/rugi tahun berjalan | Rp | (0,00) |
| 6) PD. Tirta PDAM | Rp | 446.339.911.268,61 |
| Rincian sebagai berikut : | | |
| - Saldo Awal | Rp | 448.927.210.519,58 |
| - Penambahan investasi disebabkan akumulasi laba/rugi | Rp | 40.490.733.785,00 |
| - Pengurangan investasi disebabkan penarikan deviden | Rp | 41.591.065.653,50 |

Penjelasan penyertaan modal Pemerintah Kota Makassar pada perusahaan swasta dan perusahaan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

1) PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk

Penyertaan awal pada PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk. (PT. GMTD Tbk.) yang bergerak pada bidang investasi dan pengembangan real estate dan properti dilakukan pada tahun 1991. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 1992 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tanggal 26 Juni 2017 sampai dengan 31 Desember 2018, penyertaan modal Pemerintah Kota Makassar pada PT GMTD Tbk. adalah sebesar Rp3.300.000.000,00 atau 6,5% dari seluruh modal disetor sedangkan nilai investasinya dengan menggunakan metode biaya. Pada tahun 2018 Pemerintah Kota Makassar menerima deviden dari penyertaan modal pada PT GMTD Tbk. sebesar Rp105.600.000,00.

2) PT KIMA

Penyertaan awal pada PT Kawasan Industri Makassar (PT KIMA) yang bergerak pada bidang usaha penyediaan prasarana pembangunan, pengurusan, pengusahaan dan pengembangan serta melakukan kegiatan di bidang kawasan industri dan jasa dilakukan pada tahun 1986. Atas penyertaan awal sebesar Rp4.000.000.000,00. Telah ditetapkan Peraturan Daerah



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Pemerintah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Kawasan Industri Ujung Pandang tanggal 16 Mei 1988. Nilai penyertaan modal Pemerintah Kota Makassar pada PT KIMA sebesar Rp4.000.000.000,00 atau 10,00% dari seluruh modal disetor sedangkan nilai investasinya dengan menggunakan metode biaya adalah sebesar Rp4.000.000.000,00. Pada tahun 2018 Pemerintah Kota Makassar menerima deviden dari penyertaan modal pada PT KIMA sebesar Rp170.077.566,00.

3) PT Bank Sulselbar

Penyertaan awal pada PT Bank Sulselbar yang bergerak dalam bidang usaha perbankan dilakukan pada tahun 2015 dengan penyertaan awal sebesar Rp17.000.000.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2018 nilai penyertaan modal kepada PT Bank Sulselbar adalah sebesar Rp17.000.000.000,00 atau 1,90% dari seluruh modal disetor sedangkan nilai investasinya dengan menggunakan metode biaya sebesar Rp17.000.000.000,00. Pada tahun 2018 Pemerintah Kota Makassar menerima deviden dari penyertaan modal pada PT Bank Sulselbar senilai Rp6.246.770.479,00.

4) PD Pasar Makassar Raya

Penyertaan awal pada PD Pasar Makassar Raya (PD PMR) yang bergerak pada bidang pembangunan dan peremajaan pengelolaan pasar tradisional dilakukan pada tahun 1999. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar No.17 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2004 tentang Pengurusan Pasar dalam Wilayah Daerah Kota Makassar. Sampai dengan 31 Desember 2018, penyertaan modal Pemerintah Kota Makassar pada PD PMR adalah sebesar Rp194.059.783.004,54 atau 100% dari seluruh modal disetor sedangkan penilaian investasinya dengan menggunakan metode ekuitas. Pada tahun 2018 Pemerintah Kota Makassar menerima deviden dari penyertaan modal pada PD PMR sebesar Rp256.025.000,00 Perusahaan yang masih aktif dan memperoleh keuntungan ini telah diaudit oleh KAP Yaniswar & rekan dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian. Terdapat permasalahan hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi jual beli *lots* dan lahan parkir pasar tradisional milik Pemkot Makassar yang sedang dalam penyidikan kejaksaan negeri Kota Makassar.

5) PD Rumah Potong Hewan

Penyertaan awal pada PD Rumah Potong hewan (PD RPH) yang bergerak pada bidang pemotongan hewan adalah penyediaan daging dan melindungi konsumen, memperbaiki sarana dan prasarana dan pengamanan dan keamanan kepada pengusaha dilakukan pada tahun 1999. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Tingkat II Ujung Pandang. Sampai dengan 31 Desember 2018, penyertaan modal Pemerintah Kota Makassar pada PD RPH adalah sebesar Rp4.760.576.101,59 atau 100% dari seluruh modal disetor sedangkan penilaian investasinya dengan menggunakan metode ekuitas. Pada tahun 2018 Pemerintah Kota Makassar tidak menerima deviden dari penyertaan modal pada PD RPH karena merugi. Untuk TB 2018 laporan keuangan PD RPH belum dilakukan audit oleh kantor akuntan publik.

6) PD Terminal Makassar Metro

Penyertaan awal pada PD Terminal Makassar Metro (PD TMM) yang bergerak pada bidang pelayanan umum kepada masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhan jasa dan sarana serta fasilitas dibidang Terminal dilakukan pada tahun 1999. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Makassar Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Terminal Makassar Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang. Sampai dengan 31 Desember 2018, penyertaan modal Pemerintah Kota Makassar pada PD TMM adalah sebesar Rp61.309.923.074,37 atau 100% dari seluruh modal disetor sedangkan penilaian investasinya dengan menggunakan metode ekuitas. Pada tahun 2018 Pemerintah Kota Makassar tidak menerima deviden dari PD TMM.

7) PD Parkir Makassar Raya

Penyertaan awal pada PD Parkir Makassar Raya (PD PMK) yang bergerak pada bidang pelayanan umum kepada masyarakat di bidang sarana parkir dilakukan pada tahun 1999. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Terminal Makassar Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang. Sampai dengan 31 Desember 2018, penyertaan modal Pemerintah Kota Makassar pada PD PMK adalah sebesar Rp6.036.339.846,90 atau 100% dari seluruh modal disetor. Pada tahun 2018 Pemerintah Kota Makassar menerima deviden dari penyertaan modal pada PD PMK sebesar Rp1.093.581.936,79.

8) PT Bank Perkreditan Rakyat Makassar Sombere'

Penyertaan awal pada PD Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) yang bergerak pada bidang perbankan dilakukan pada tahun 1996. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dengan modal pertama sebesar Rp2.000.000.000,00 selanjutnya diubah dengan Perda No.7 Tahun 2017 tanggal 2 November 2017 tentang Perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar menjadi perusahaan perseroan terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar dengan modal dasar menjadi sebesar Rp20.000.000.000,00 dan modal disetor sebesar Rp5.202.382.300,00 dan berubah nama menjadi PT BPR Makassar Sombere'. Sampai dengan 31 Desember 2018, penyertaan modal Pemerintah Kota Makassar pada PT BPR adalah sebesar Rp3.809.060.741,93 atau 100% dari seluruh modal disetor. Pada tahun 2018 Pemerintah Kota Makassar tidak



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

menerima deviden dari penyertaan modal pada PD BPR karena PD BPR merugi. Perusahaan yang masih aktif dan memperoleh merugi ini belum diaudit oleh KAP karena modalnya masih dibawah Rp5.000.000.000,00. Terdapat permasalahan terkait peraturan perbankan karena permodalannya 4% dari ATMR bank minimal 8% dan merupakan Bank Dalam Pengawasan Khusus oleh OJK.

9) Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar

Penyertaan awal pada PD Air Minum (PDAM) yang bergerak pada bidang pelayanan air minum dilakukan pada tahun 1974. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 6 tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Ujung Pandang. Sampai dengan 31 Desember 2018, penyertaan modal Pemerintah Kota Makassar pada PDAM adalah sebesar Rp458.654.869.419,12 atau 100% dari seluruh modal disetor. Pada tahun 2018, Pemerintah Kota Makassar menerima deviden dari penyertaan modal pada PDAM sebesar Rp41.591.065.653,50.

7.5.3.1.3 Aset Tetap

| 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Rp25.445.272.602.925,10 | Rp25.037.408.151.902,10 |

Aset tetap adalah aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap meliputi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Saldo Aset tetap Pemerintah Kota Makassar per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp25.445.272.602.925,10 dan Rp25.037.408.151.902,10 yang terdiri dari.

Tabel 55 Mutasi Aset Tetap

| NO | ASSET TETAP | SALDO AKHIR 31 Desember 2017 | Penyesuaian Saldo Awal | | SALDO AWAL 01 Januari 2018 |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------------|
| | | | Bertambah | Berkurang | |
| 1 | Tanah | 23.986.237.821.604,30 | | | 23.986.237.821.604,30 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 1.200.061.657.747,72 | | | 1.200.061.657.747,72 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 1.250.123.287.292,04 | | | 1.250.123.287.292,04 |
| 4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 4.937.756.486.229,55 | | | 4.937.756.486.229,55 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | 70.228.511.237,00 | | 1000,00 | 70.228.510.237,00 |
| 6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 60.468.734.917,88 | | | 60.468.734.917,88 |
| 7 | Akumulasi Penyusutan | (6.467.468.347.126,42) | | | (6.467.468.347.126,42) |
| JUMLAH ASET TETAP | | 25.037.408.151.902,10 | - | 1000,00 | 25.037.408.150.902,10 |



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

| SALDO AWAL 01 Januari 2018 | MUTASI TAHUN 2018 | | | | | PENYESUAIAN AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2018 | SALDO AKHIR 31/12/2018 |
|-------------------------------|--------------------|------------|-------------|--------------------|--------------------|--|---------------------------|
| | (LRA TA 2018) | BLUD (PKM) | BLUD (RSUD) | Bertambah | Berkurang | | |
| 23.986.237.821.604,30 | 1.287.268.520,00 | | | 9.478.000.000,00 | 3.580.285.320,00 | 0,00 | 23.993.422.804.804,30 |
| 1.200.061.657.747,72 | 147.739.934.901,00 | | | 66.108.613.106,69 | 66.959.832.946,00 | 0,00 | 1.346.950.372.809,41 |
| 1.250.123.287.292,04 | 148.354.692.939,00 | | | 76.304.591.427,70 | 112.634.512.985,00 | 0,00 | 1.362.148.058.673,74 |
| 4.937.756.486.229,55 | 412.524.720.881,00 | | | 30.417.951.088,08 | 115.176.296.962,75 | 0,00 | 5.265.522.861.235,88 |
| 70.228.510.237,28 | 32.063.671.698,09 | | | 1.662.286.495,99 | 28.522.697.041,56 | 0,00 | 75.431.771.389,52 |
| 60.468.734.917,88 | | | | 203.205.015.727,51 | 44.944.899.438,20 | 0,00 | 218.728.851.207,19 |
| (6.467.468.347.126,42) | | | | | | (349.463.770.068,53) | (6.816.932.117.194,95) |
| 25.037.408.150.902,30 | 741.970.288.939,09 | | | 387.176.457.845,97 | 371.818.524.693,52 | (349.463.770.068,58) | 25.445.272.602.925,10 |

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 20**.

7.5.3.1.3.1 Tanah

| 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|-------------------------|-------------------------|
| Rp23.993.422.804.804,30 | Rp23.986.237.821.604,30 |

Saldo Tanah per 31 Desember 2018 dan 2017 milik Pemerintah Kota Makassar sebesar Rp23.993.422.804.804,30 dan sebesar Rp23.986.237.821.604,30 mengalami peningkatan sebesar Rp7.184.983.200,00 dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan Tanah dipengaruhi oleh belanja modal dan hibah dari pemerintah propinsi pada tahun anggaran 2018. Rincian Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada **Lampiran 20a**.

Barang milik daerah berupa tanah tercatat sebagai aset tetap sebanyak 4.186 bidang tanah nilai Rp23.993.422.804.805,00 yang terklasifikasi berdasarkan penggunaannya. Komposisinya sebagian besarnya senilai Rp20,363,763,987,918 atau 84.87% merupakan tanah untuk jalan. Pada Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Kota Makassar melaksanakan kegiatan Inventarisasi dan Penilaian Tanah Ruang Milik Jalan dan Properti di atas tanah taman. Hasilnya kemudian menambah jumlah bidang dan nilai tanah secara signifikan. Selain dari kegiatan tersebut, tanah jalan juga sebagian merupakan hasil pembebasan lahan melalui kegiatan belanja modal beberapa tahun sebelumnya. Adapun sisanya 15.13% selain dari pada tanah untuk jalan tersebut, sebagian besar merupakan tanah taman di luar perumahan Rp807.209.129.260,00 atau 3.36%. Tercatat beberapa taman yang tersebar di wilayah Kota Makassar. Beberapa taman tersebut diantaranya tidak dalam penggunaan SKPD, misalnya Tanah Taman Tello Baru yang saat ini sedang dalam proses gugatan hukum, Tanah Taman Karunrung di bawah penggunaan Kepolisian, Tanah Jalan Ujung dan Tanah Taman Pualam dalam status



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

pemanfaatan sewa oleh pihak lain, Tanah Taman Karebosi masih dalam ikatan kerjasama pemanfaatan.

Tanah untuk bangunan pendidikan/pelatihan dengan total nilai Rp666.980.565.000,00 atau 2.78%. Terdiri dari tanah untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, terdaftar sebagai unit kerja Dinas Pendidikan Kota Makassar. Selain itu terdapat pula sebidang Tanah Milik Dinas Sosial sebagai tempat pelatihan.

Terdapat diantaranya Tanah fasum fasos dalam kompleks perumahan sebesar Rp391.808.684.180 atau 1.63%. Perolehan Tanah fasum fasos tersebut merupakan tanah yang diserahkan oleh sebanyak 12 pihak pengembang perumahan. Saat ini masih terdapat 2 kompleks perumahan yang telah diserahkan tetapi belum dapat disajikan karena belum dilakukan pendataan dan verifikasi rinci terkait jenis properti yang diserahkan, termasuk masih harus menunggu dilakukannya penilaian terhadap asset tersebut sebagai persyaratan dicatat dan disajikan sebagai asset tetap.

Terdapat lima pulau kecil yang dicatat sebagai tanah dalam daftar aset tetap yaitu Pulau Kodingareng, Pulau Barang Lompo, Pulau Lae-Lae, Pulau Samalona, dan Pulau Khayangan. Tanah pulau tersebut total senilai Rp360.674.788.000,00 atau komposisinya 1.50% dari seluruh asset tanah. Pulau Kodingareng merupakan pulau berpenghuni, bahkan sebagian sudah bersertifikat atas nama warga. Demikian pula halnya dengan Pulau Barrang Lompo. Ada beberapa pihak yang meyakini bahwa tercatatnya kedua pulau tersebut secara keseluruhan sebagai asset tanah merupakan kekeliruan, karena merupakan wilayah berpenduduk yang telah turun temurun menetap, bahkan sebelum wilayah tersebut masuk menjadi wilayah administratif Kota Makassar berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.

Hingga saat ini, Pemerintah Kota Makassar masih menunggu adanya petunjuk yang jelas tentang penyelesaian pencatatan kedua pulau tersebut. Sedangkan untuk Pulau Lae-Lae dan Samalona, Pemerintah Kota Makassar memiliki bukti kepemilikan yang jelas berupa Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL). Adapun Pulau Kayangan saat ini sedang dalam proses sengketa dengan pihak yang mengelola setelah dilakukan pemutusan kontrak kerjasama pengelolaan pulau kayangan secara sepihak oleh Pemerintah Kota Makassar.

Adapun tanah perkantoran senilai Rp512.168.888.075,00 atau 2.13%, tanah pemakaman Rp473.720.178.000,00 atau 1.97%, Sisanya merupakan tanah bangunan museum, tanah fasilitas umum, tanah pelataran, tanah pembuangan sampah, tanah pengolahan/industri/penyimpanan, tanah perniagaan, tanah perumahan, tanah rumah sakit/puskesmas/klinik, tanah sarana ibadah, dan tanah sarana olahraga, yang masing-masing komposisi nilainya di bawah 1%. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

**Tabel 56 Klasifikasi Tanah Pemerintah Kota Makassar
Per 31 Desember 2018**

| Klasifikasi Tanah | Jumlah Bidang | Nilai | Persentase |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------|----------------|
| Tanah Bangunan Museum | 1 | 11.190.000.000,00 | 0,05% |
| Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan | 264 | 666.980.565.000,00 | 2,78% |
| Tanah Fasilitas Umum | 5 | 16.019.070.000,00 | 0,07% |
| Tanah Fasum Fasos Perumahan | 309 | 391.808.684.180,00 | 1,63% |
| Tanah Pelataran | 1 | 875.306.000,00 | 0,00% |
| Tanah Pemakaman | 9 | 473.720.178.000,00 | 1,97% |
| Tanah Pembuangan Sampah | 9 | 91.579.412.020,00 | 0,38% |
| Tanah Pengolahan/Industri/Penyimpanan | 5 | 9.096.400.000,00 | 0,04% |
| Tanah Perkantoran | 190 | 512.168.888.075,00 | 2,13% |
| Tanah Perniagaan | 5 | 47.790.937.734,00 | 0,20% |
| Tanah Perumahan | 30 | 181.976.948.950,00 | 0,76% |
| Tanah Pulau | 5 | 360.674.788.000,00 | 1,50% |
| Tanah Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik | 84 | 56.533.509.668,00 | 0,24% |
| Tanah Sarana Ibadah | 1 | 412.500.000,00 | 0,00% |
| Tanah Sarana olahraga | 1 | 1.622.500.000,00 | 0,01% |
| Tanah Taman Non Perumahan | 40 | 807.209.129.260,00 | 3,36% |
| Tanah Untuk Jalan | 3227 | 20.363.763.987.918,00 | 84,87% |
| Total | 4186 | 23.993.422.804.805,00 | 100,00% |

Adapun daftar permasalahan Aset Tanah Pemerintah Kota Makassar sampai dengan Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 57 Rincian Progress Penyelesaian Permasalahan
Aset Tanah dan Aset Lainnya**

| No | Permasalahan aset | Uraian | Status |
|----|--------------------------------------|--|--------|
| 1 | Tanah tidak bersertifikat | Masih terdapat tanah belum bersertifikat sebanyak 3.936 bidang .Usul Persertifikatan beberapa bidang tanah masih sementara berproses di BPN sebanyak 36 bidang tanah. | Proses |
| 2 | Pencatatan pulau-pulau kecil | Terdapat 5 pulau kecil yang dicatat dalam daftar aset tetap (berpenghuni & sebagian bersertifikat an. warga). | Proses |
| 3 | Tanah Kampung Nelayan Dinas Kelautan | Aset tanah Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Peternakan Kota Makassar (DKP3) dikuasai oleh pihak lain. | Proses |
| 4 | Tanah Paotere Dinas Kelautan | Sebidang tanah dengan luas 350,00 m2 tercatat pada KIB A (Daftar Inventaris Tanah) OPD DKP3 Kota Makassar,namun kepemilikan tanah tersebut juga diklaim oleh PT PELINDO. | Proses |
| 5 | Taman Tello Baru | Sebidang tanah dengan Luas 2.175 m2 Letak Jalan Urip Sumohardjo merupakan aset tanah Taman | Proses |



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

| No | Permasalahan aset | Uraian | Status |
|----|---|---|--------|
| | | Tello Baru. Saat ini kepemilikan tanah tersebut diklaim oleh Ahli Waris pemegang hak bersertifikat an. Ishak Kalia. | |
| 6 | Taman Pasar Cidu | Sebidang tanah dengan luas 1500,00 m2 terletak di Jalan Ujung/Jalan Pasar Cidu tercatat pada KIB A (Daftar Inventaris Tanah) OPD Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar. Atas lahan tersebut berdiri bangunan SPBU milik PT. Karya Dwi Putra (PT KDP) atas perjanjian selama 20 tahun namun tidak mengatur besarnya kompensasi pemanfaatan lahan milik Pemerintah Kota Makassar berupa nilai kontribusi yang harus dibayarkan oleh PT KDP kepada Pemerintah Kota Makassar. | Proses |
| 7 | Taman Karunrung/pos polisi | Sebidang tanah taman dengan Luas 3430,00 m2 Alamat Jalan Karunrung tercatat pada OPD Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, namun kepemilikan tanah tersebut juga diklaim oleh pihak Polrestabes Makassar karena memiliki dokumen kepemilikan | Proses |
| 8 | Pemanfaatan gedung oleh sekolah swasta | Beberapa Lembaga Pendidikan Sekolah Swasta memanfaatkan gedung sekolah milik Pemerintah, dalam hal ini aset gedung Dinas Pendidikan. | Proses |
| 9 | Pemanfaatan tanah untuk mesin atm | Beberapa aset tanah dibangun mesin ATM dari beberapa Bank, namun belum semuanya diterbitkannya perjanjian kerjasama pemanfaatan dalam bentuk sewa tanah. | Proses |
| 10 | Sebagian tanah eks THR dikuasai oleh pihak lain | Tanah seluas 63.206 m2, alamat Jalan Kerungkerung, Nama Aset Tanah Eks THR yang diperoleh informasi bahwa sebagian dari lahan tersebut dikuasai oleh warga secara tidak sah. | Proses |
| 11 | Tanah perumahan karyawan kec. Manggala | Sebidang tanah dengan total Luas 220.790 m2 Lokasi Jalan Kampung Nipa-Nipa Kecamatan Manggala tercatat pada OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar tengah menjadi kawasan hunian/perumahan sebagian akibat pengelolaan lahan oleh Koperasi Beringin untuk dibangun menjadi kawasan perumahan pegawai. Saat ini, di atas lahan tersebut telah banyak terbit sertifikat atas nama pihak lain. | Proses |
| 12 | Tanah perumahan karyawan jl. Rajawali | BPKA mencatat aset tetap tanah rumah dinas seluas 2.880 m2, penduduk yang bertempat tinggal menyatakan bahwa lokasi tersebut merupakan hak milik warga dan kepemilikannya telah lama beralih. | Proses |



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

| No | Permasalahan aset | Uraian | Status |
|----|--|--|--------|
| 13 | Terdapat tanah fasum fasos yang telah bersertifikat pihak lain | Aset fasum fasos milik Pemkot Makassar atas hasil klarifikasi BPN diketahui bahwa sebanyak 4 bidang tanah telah terbit SHM pribadi. | Proses |
| 14 | Tanah dalam status sengketa (bagian hukum) tahun 2017 | Terdapat 12 bidang tanah dalam status sengketa dengan pihak ketiga (warga). | Proses |
| 15 | Perkembangan status kasus-kasus aset sebelumnya | Terdapat 8 bidang tanah yang belum bersertifikat yang tercatat dalam aset Kota Makassar dan masih dalam proses sengketa di pengadilan. | Proses |

Permasalahan aset tetap dan aset lainnya berdasarkan tabel tersebut diatas, diungkapkan secara rinci baik dalam proses penyelesaian maupun yang sudah selesai dalam proses. Rincian pengungkapan ada dalam bagian **Lampiran Pengungkapan Permasalahan Aset** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari LKPD Tahun Anggaran 2018.

7.5.3.1.3.2 **Peralatan dan Mesin**

| 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Rp1.346.950.372.809,41 | Rp1.200.061.657.747,72 |

Peralatan dan mesin milik Pemerintah Kota Makassar sampai dengan periode 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp1.346.950.372.809,41 dan sebesar Rp1.200.061.657.747,72. Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp146.888.715.061,69 dibandingkan tahun sebelumnya.

Nilai aset tetap peralatan dan mesin tersebut diatas, sebesar Rp10.212.315.222,00 atau 0,75% dari total aset tetap peralatan dan mesin merupakan nilai yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) Tahun Anggaran 2018.

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada **Lampiran 20b**.

7.5.3.1.3.3 **Gedung dan Bangunan**

| 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Rp1.362.148.058.673,74 | Rp1.250.123.287.292,04 |

Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Kota Makassar sampai dengan periode 31 Desember 2018 dan 2017 Rp1.362.148.058.673,74 dan sebesar Rp1.250.123.287.292,04. Saldo Gedung dan Bangunan mengalami peningkatan sebesar Rp112.024.771.381,70 dibandingkan tahun sebelumnya.

Nilai aset tetap gedung dan bangunan tersebut diatas, sebesar Rp71.593.000,00 atau 0,01% dari total aset tetap gedung dan bangunan merupakan nilai yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) Tahun Anggaran 2018.

Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada **Lampiran 20c**.

Pada aset tetap gedung dan bangunan terdapat penguasaan penggunaannya dikuasai oleh pihak ketiga yaitu PT. Pelitagro Mustika Karya (PT



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PMK) yang belum dimasukkan di dalam kemitraan dengan pihak ketiga sebesar Rp6.756.120.000,00 karena masih dalam proses revisi/adendum bentuk kerja sama menyangkut penggunaan aset tetap antara Pemerintah Kota Makassar dengan PT PMK. Rincian bangunan yang dimanfaatkan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 58 Gedung dan Bangunan yang Digunakan Dalam Kemitraan Terminal Kargo

dalam Rupiah

| No | Jenis Barang | Bahan | Asal Perolehan | Ukuran Barang | Kondisi/Satuan | Kondisi | Jumlah Barang | Nilai (Rp) |
|---------------|--------------------------------|-------|----------------|---------------|----------------|---------|---------------|-------------------------|
| 1 | Gedung Cargo Terminal | Beton | APBD | 90 | m2 | B | 1 | 75.600.000,00 |
| 2 | Gedung Unit I Cargo Terminal | Beton | APBD | 1.440 | m2 | B | 1 | 1.108.800.000,00 |
| 3 | Gedung Unit II Cargo Terminal | Beton | APBD | 1.440 | m2 | B | 1 | 1.108.800.000,00 |
| 4 | Gedung Unit III Cargo Terminal | Beton | APBD | 1.440 | m2 | B | 1 | 1.108.800.000,00 |
| 5 | Gedung Unit IV Cargo Terminal | Beton | APBD | 1.440 | m2 | B | 1 | 1.108.800.000,00 |
| 6 | Gedung Unit V Cargo Terminal | Beton | APBD | 1.440 | m2 | B | 1 | 1.108.800.000,00 |
| 7 | Gedung Unit VI Cargo Terminal | Beton | APBD | 1.440 | m2 | B | 1 | 1.108.800.000,00 |
| 8 | Mushallah Cargo Terminal | Beton | APBD | 24 | m2 | B | 1 | 18.480.000,00 |
| 9 | Pos Jaga Terminal | Beton | APBD | 12 | m2 | B | 1 | 9.240.000,00 |
| JUMLAH | | | | | | | | 6.756.120.000,00 |

7.5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

| 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Rp5.265.522.861.235,88 | Rp4.937.756.486.229,55 |

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp5.268.019.734.436,64 dan sebesar Rp4.937.756.486.229,55 mengalami kenaikan sebesar Rp327.766.375.006,33 dibandingkan tahun sebelumnya.

Rincian Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada *Lampiran 20d*.

7.5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

| 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|----------------------------|----------------------------|
| Rp75.431.771.389,52 | Rp70.228.511.237,00 |

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan.

Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Kota Makassar sampai dengan periode 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp75.431.771.389,52 dan sebesar Rp70.228.511.237,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.203.260.152,52 dibandingkan tahun sebelumnya. Rincian Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada *Lampiran 20e*.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Nilai aset tetap lainnya tersebut diatas, sebesar Rp3.368.873.654,00 atau 4,41% dari total aset tetap lainnya merupakan nilai yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) Tahun Anggaran 2018.

| | | | |
|-------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 7.5.3.1.3.6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
| | | Rp218.728.851.207,18 | Rp60.468.734.917,88 |

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah Bangunan milik Pemerintah Kota Makassar yang masih dalam pembangunan/penyelesaian fisik sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp218.728.851.207,18 dan sebesar Rp60.468.734.917,88.

Pengakuan konstruksi dalam pengerjaan (KDP) menjadi aset tetap gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan dilakukan apabila aset tersebut sudah diselesaikan seratus persen dengan penyerahan berita acara pertama atau PHO, dan secara substansi sudah dimanfaatkan Pemerintah Kota Makassar, dapat dilihat pada *Lampiran 20f*.

Pemerintah Kota Makassar menerapkan kebijakan akuntansi batas minimum kapitalisasi dalam penyajian aset tetap. Dengan demikian perolehan aset tetap yang berada dibawah kapitalisasi disajikan dalam *extra comptable* aset dan disajikan sebagai beban lain-lain (*capital expenditure*) pada Laporan Operasional. Rincian dapat dilihat pada *Lampiran 20g*.

| | | | |
|-------------|--|---------------------------------|---------------------------------|
| 7.5.3.1.3.7 | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
| | | (Rp6.816.932.117.194,95) | (Rp6.467.468.347.126,42) |

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kota Makassar sampai dengan periode 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar (Rp6.816.932.117.194,95) dan sebesar (Rp6.467.468.347.126,42) mengalami kenaikan sebesar (Rp349.463.770.068,53) dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dapat dilihat pada *Lampiran 21*.

| | | | |
|-----------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 7.5.3.1.4 | Dana Cadangan | 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
| | | Rp0,00 | Rp0,00 |

Pada Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kota Makassar tidak membentuk Dana Cadangan.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

7.5.3.1.5 Aset Lainnya

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
| Rp165.710.712.726,36 | Rp167.841.985.973,58 |

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset lainnya pada Pemerintah Kota Makassar per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp165.710.712.726,36 dan Rp167.841.985.973,58 yang terdiri atas:

Tabel 59 Mutasi Aset Lainnya

dalam Rupiah

| No. | Uraian | Saldo per 31 Des 2017 | Mutasi (Rp) | | Saldo Per 31 Des 2018 |
|---------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | Bertambah | Berkurang | |
| 1 | Tuntutan Ganti Rugi | 196.140.507,11 | 0,00 | 196.140.507,11 | 0,00 |
| 2 | Kemitraan Dengan Pihak Ketiga | 157.439.639.815,00 | 0,00 | 0,00 | 157.439.639.815,00 |
| 3 | Aset Tak Berwujud | 23.060.348.851,00 | 865.970.000,00 | 0,00 | 23.926.318.851,00 |
| 4 | Akumulasi Amortisasi | (19.288.331.810,00) | (2.172.358.840,00) | 0,00 | (21.460.690.650,00) |
| 5 | Aset Lain-lain | 6.434.188.610,47 | 0,00 | 628.743.900,11 | 5.805.444.710,36 |
| Jumlah | | 167.841.985.973,58 | (1.306.388.840,00) | 824.884.407,22 | 165.710.712.726,36 |

7.5.3.1.5.1 Tagihan Penjualan
Angsuran

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
| Rp0,00 | Rp0,00 |

Pada Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kota Makassar tidak memiliki Tagihan Penjualan Angsuran.

7.5.3.1.5.2 Tuntutan Ganti Rugi

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
| Rp0,00 | Rp196.140.507,11 |

Tuntutan Ganti Rugi adalah Tuntutan Ganti Rugi yang telah ada SKTJM dan akan jatuh tempo lebih dari 12 bulan.

Tuntutan Ganti Rugi – Aset Lainnya pada Pemerintah Kota Makassar per 31 Desember 2018 sebesar Rp57.162.953,67 direklas ke Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi karena akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan. Daftar Tuntutan Ganti Rugi dapat dilihat pada *Lampiran 23*.

7.5.3.1.5.3 Kemitraan Dengan
Pihak Ketiga

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
| Rp157.439.639.815,00 | Rp157.439.639.815,00 |

Merupakan Aset Tetap Pemerintah Kota Makassar pada:

- Terminal Regional Daya yang dikelola oleh PT Kalla Inti Karsa (KIK) sebesar Rp15.874.101.000,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Pembangunan Terminal Regional Daya (TRD) Dilaksanakan oleh PT KIK berdasarkan Perjanjian Kerjasama Bersyarat (PKS) Nomor 551.22/02/S.Perja/HK tanggal 05 April 1997:

- 1) Pihak Pertama (Pemerintah Kota Makassar) menyediakan modal berupa Lahan di Terminal Regional Daya seluas 12 Ha dengan nilai Rp4.628.754.000,00 dan Tanah serta Bangunan di Eks Terminal Panaikang seluas 32.349 m² dengan nilai Rp11.245.347.000,00;
 - 2) Pihak Kedua (PT KIK) menyediakan modal berupa pembangunan TRD baik sarana dan prasarana sesuai Gambar, Spesifikasi Teknik dan RAB dengan nilai sebesar Rp27.493.526.500,00. Atas pelaksanaan oleh Pihak Kedua sampai dengan 31 Desember 2018, PT KIK belum menyelesaikan pembangunan 157 toko dengan nilai sebesar Rp8.240.324.000,00.
- b. Terminal Cargo yang dikelola oleh PT Pelitagro Mustika Karya sebesar Rp78.869.000.000,00;
 - c. Lapangan Karebosi yang dikelola oleh PT Tosan Permai Lestari sebesar Rp58.794.538.815,00;
 - d. Taman Pualam yang dikelola oleh H Abdul Latief Makka sebesar Rp1.600.000.000,00; dan
 - e. Taman Pasar Cidu dikelola oleh PT Karya Dwi Putra sebesar Rp2.302.000.000,00.

Saldo Akhir Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2018 tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017. Rincian dapat dilihat pada *Lampiran 24*.

7.5.3.1.5.4 Aset Tidak Berwujud

| 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|----------------------------|----------------------------|
| Rp23.926.318.851,00 | Rp23.060.348.851,00 |

Merupakan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 sebesar Rp23.926.318.851,00 adalah aset berupa perangkat lunak atau aplikasi yang ada pada OPD terkait, untuk menunjang kelancaran dalam mengoptimalkan dan mempermudah kerja untuk menghindari *trouble error*.

Pemerintah Kota Makassar menyajikan nilai Akumulasi Amortisasi pada neraca per 31 Desember 2018 sebesar (Rp21.460.690.650,00). Kebijakan penerapan Amortisasi Aset Tak Berwujud pada Neraca Pemerintah Daerah mulai tahun 2017 dilakukan berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar.

Rincian mutasi Aset Tak Berwujud dan Amortisasinya dapat dilihat pada *Lampiran 25*.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

7.5.3.1.5.5 Akumulasi Amortisasi

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
| (Rp21.460.690.650,00) | (Rp19.288.331.810,00) |

Akumulasi Amortisasi Aset Tetap Pemerintah Kota Makassar sampai dengan periode 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar (Rp21.460.690.650,00) dan (Rp19.288.331.810,00) mengalami kenaikan sebesar (Rp2.172.358.840,00) dibandingkan tahun sebelumnya.

7.5.3.1.5.6 Aset Lain-Lain

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
| Rp5.805.444.710,36 | Rp6.434.188.610,47 |

Aset lain-lain merupakan aset lainnya yang dimiliki Pemerintah Kota Makassar per 31 Desember 2018 dengan rincian mutasi sebagai berikut.

Tabel 60 Mutasi Aset Lain-lain

| No. | Uraian | Saldo Per 31 Des 2017 (Rp) | Mutasi (Rp) | | Saldo Per 31 Des 2018 (Rp) |
|---------------|---|----------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------|
| | | | Bertambah | Berkurang | |
| 1 | Piutang Sisa UYHD | 775.151.955,00 | 0,00 | 0,00 | 775.151.955,00 |
| 2 | Tuntutan Ganti Rugi yang Belum ada Penetapan Pembebanan | 81.889.900,00 | 0,00 | 850.200,00 | 81.039.700,00 |
| 3 | Reklasifikasi dari Aset Tetap | 5.558.966.755,97 | 0,00 | 609.713.700,61 | 4.949.253.055,36 |
| 4 | Reklasifikasi dari Persediaan | 18.180.000,00 | 0,00 | 18.180.000,00 | 0,00 |
| Jumlah | | 6.434.188.610,97 | 0,00 | 628.743.900,61 | 5.805.444.710,36 |

Penjelasan dari masing-masing aset lainnya adalah sebagai berikut.

a. Piutang Tunggakan Pajak Rp0,00

Piutang Tunggakan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan yang belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2018, yang jika dibandingkan dengan Piutang Tunggakan Pajak Tahun Anggaran 2017 mengalami pengurangan sebesar Rp0,00.

b. Piutang Tunggakan Retribusi Rp0,00

Piutang Tunggakan Retribusi adalah merupakan Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, Retribusi Penyeberangan diatas air dan Retribusi Alat Pemadam Kebakaran tahun 2007 yang telah dilakukan pembayaran pada tahun 2018.

c. Piutang Sisa UYHD Rp775.151.955,00

Piutang Sisa UYHD adalah saldo sisa UYHD baik Rutin maupun Pembangunan mulai tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun anggaran 2010 yang belum dikembalikan/dipertanggungjawabkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp775.151.955,00 yang jika



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

dibandingkan dengan Piutang sisa UYHD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp775.151.955,00 tidak mengalami perubahan.

d. Tuntutan Ganti Rugi Rp81.039.700,00

Tuntutan Ganti Rugi sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp81.039.700,00 Nilai tersebut berasal dari reklasifikasi dari Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi karena masih bersifat informasi yang belum ada pembebanannya.

e. Piutang Lainnya Rp 0,00

Piutang Lainnya adalah piutang dana bergulir pada Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan yang sudah dihapus pada tahun 2014 karena sudah tidak dapat tertagih sesuai SK Walikota Nomor 900/1593/KEP/XII/2014. Pada tahun 2018 tidak ada penambahan Aset Lain-lain yang berasal dari Piutang Lainnya.

f. Reklasifikasi dari Piutang Lainnya Rp0,00

Pada Tahun Anggaran 2018 tidak terdapat Aset Lain-Lain yang berasal dari Reklasifikasi dari Piutang Lainnya.

g. Reklasifikasi dari Aset Tetap Rp4.949.253.056,47

Reklasifikasi aset tetap merupakan aset tetap sampai dengan desember 2018 yang sudah rusak berat yang dalam proses pengusulan penghapusan.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 26**.

7.5.3.2 Kewajiban

| 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Rp184.477.439.366,06 | Rp111.121.128.235,58 |

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Kota Makassar juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Kota Makassar atau dengan pemberi jasa lainnya.

Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Jumlah Kewajiban Pemerintah Kota Makassar per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp184.477.439.366,06 dan Rp111.121.128.235,58 yang terdiri dari:



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Tabel 61 Kewajiban

| No. | Uraian | 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|-----|--------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1 | Kewajiban Jangka Pendek | 105.855.971.761,72 | 32.499.660.631,24 |
| 2 | Kewajiban Jangka Panjang | 78.621.467.604,34 | 78.621.467.604,34 |
| | Jumlah | 184.477.439.366,06 | 111.121.128.235,588 |

7.5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

| 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|-----------------------------|----------------------------|
| Rp105.855.971.761,72 | Rp32.499.660.631,24 |

Kewajiban Jangka Pendek merupakan penilaian utang dengan menggunakan nilai nominal yang harus dibayar pada tanggal jatuh tempo.

Tabel 62 Kewajiban Jangka Pendek

| No. | Uraian | 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|-----|---|---------------------------|--------------------------|
| 1 | Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 240.154.710,71 | 547.385.486,91 |
| 2 | Utang Bunga | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Pendapatan Diterima Dimuka | 9.243.306.960,51 | 10.375.061.778,33 |
| 5 | Utang Beban | 20.495.213.413,00 | 14.737.858.180,00 |
| 6 | Utang Kepada Pihak Ketiga | 75.871.411.677,50 | 6.833.470.186,00 |
| 7 | Utang Jangka pendek Lainnya | 5.885.000,00 | 5.885.000,00 |
| | Jumlah | 105.855.971.761,72 | 32.499.660.631,24 |

7.5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

| 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|-------------------------|-------------------------|
| Rp240.154.710,71 | Rp547.385.486,91 |

Merupakan utang Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Askes, Taspen, dan Taperum. Pada Tahun 2018 Utang Perhitungan Fihak Ketiga sebesar Rp240.154.710,71. Rincian mutasi dapat dilihat pada *Lampiran 27*.

7.5.3.2.1.2 Utang Bunga

| 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|------------------|------------------|
| Rp0,00 | Rp0,00 |

Saldo utang bunga Pemerintah Kota Makassar tidak terdapat lagi per 31 Desember 2018.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

| 7.5.3.2.1.3 | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|-------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| | | Rp0,00 | Rp0,00 |

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat merupakan kewajiban angsuran pokok yang seharusnya dibayarkan setelah Tahun Anggaran berjalan.

| 7.5.3.2.1.4 | Pendapatan Diterima Dimuka | 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|-------------|----------------------------|--------------------|---------------------|
| | | Rp9.243.306.960,52 | Rp10.375.061.778,33 |

Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp9.243.306.960,52 terdiri dari:

- Pendapatan pajak reklame yang lebih dibayarkan oleh wajib pajak sampai tanggal 31 Desember 2018 Rp3.552.900,00;
- Pendapatan diterima dimuka berupa retribusi pemakaman sebesar Rp267.371.309,52;
- Retribusi Ijin Kendaraan Bermotor sebesar Rp579.150.415,00;
- Retribusi Ijin Gangguan sebesar Rp7.833.387.936,00;
- Retribusi Ijin Minol Rp492.916.667,00;
- Retribusi Ijin Trayek Rp47.677.733,00; dan
- Retribusi Taman Pasar Cidu PT. Karya Dwi Putra Rp19.250.000,00.

Adapun rincian Pendapatan diterima Dimuka dapat dilihat pada *Lampiran 28*.

| 7.5.3.2.1.5 | Utang Beban | 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | | Rp20.495.213.413,00 | Rp14.737.858.180,00 |

Utang Beban berasal dari kontrak atau perolehan barang/jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. Utang Beban Pemerintah Kota Makassar tersebut merupakan sisa Utang Beban Tahun sebelumnya sebesar Rp10.760.918.120,00,00 yang telah terbayar dan penambahan utang beban di tahun berjalan berupa utang listrik, telepon, air, surat kabar dan utang pajak kendaraan bermotor dengan total sebesar Rp9.734.295.291,00, dengan rincian Utang Beban dapat dilihat pada *Lampiran 29*.

| 7.5.3.2.1.6 | Utang Kepada Pihak Ketiga | 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|-------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| | | Rp75.871.411.677,50 | Rp6.833.470.186,00 |

Utang kepada Pihak Ketiga dinilai sebesar kewajiban entitas pemerintah terhadap barang/jasa yang belum dibayar sesuai kesepakatan atau perjanjian. Utang kepada Pihak Ketiga Pemerintah Kota Makassar per 31 Desember 2018 sebesar Rp75.871.411.677,50 yaitu pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan Dinas Pekerjaan Umum, Sekretariat Daerah Kota Makassar, dan Seretariat DPRD Kota Makassar. Adapun rincian Utang Kepada Pihak Ketiga dapat dilihat pada *Lampiran 30*.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

| | | | |
|-------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| 7.5.3.2.1.7 | Utang Jangka Pendek Lainnya | 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
| | | Rp5.885.000,00 | Rp5.885.000,00 |

Merupakan utang belanja Dinas Pendidikan yang belum terbayar sebesar Rp5.885.000,00. Rincian utang jangka pendek lainnya dapat dilihat dalam *Lampiran 31*.

| | | | |
|-----------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| 7.5.3.2.2 | Kewajiban Jangka Panjang | 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
| | | Rp78.621.467.604,35 | Rp78.621.467.604,34 |

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban jangka panjang Pemerintah Kota Makassar merupakan utang kepada Pemerintah Pusat yang belum jatuh tempo sampai dengan tahun 2018 yang sudah dilakukan Amandemen Tahun 2013. Atas utang kepada Pemerintah Pusat tersebut saat ini sedang dalam proses administrasi untuk penghapusan mutlak. Posisi utang Pemerintah Kota Makassar per 31 Desember 2018, sesuai berita acara Rekonsiliasi Nomor 007/WPB.24/2018.

Tabel 63 Kewajiban Jangka Panjang

| No. | Jenis Pinjaman | Jumlah (Rp) |
|---------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | AMA-470/SLA-12/009 | 648.973.388,83 |
| 2 | AMA-472/SLA-833/2013 | 29.810.883.371,05 |
| 3 | AMA-471/SLA-159/2013 | 9.129.376.239,04 |
| 4 | AMA-169/RDI-185/2013 | 11.106.120.129,40 |
| 5 | AMA-166/RDA.P5-115/2013 | 27.597.167.476,03 |
| 6 | DEPKEU-17/02/1982 | 328.947.000,00 |
| Jumlah | | 78.621.467.604,35 |

Rincian Kewajiban jangka Panjang dapat dilihat pada *Lampiran 32*.

| | | | |
|---------|---------|-------------------------|-------------------------|
| 7.5.3.3 | Ekuitas | 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
| | | Rp26.875.875.904.592,00 | Rp26.412.007.699.548,10 |

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Saldo Ekuitas sampai dengan per 31 Desember 2018 Rp26.875.904.592,00 dan per 31 Desember 2017 Rp26.412.007.699.548,10. Saldo Ekuitas mengalami kenaikan sebesar Rp463.868.205.043,89 dibandingkan Tahun sebelumnya.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

7.5.4 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional

7.5.4.1 Pendapatan – LO

| TA 2018 | TA 2017 |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Rp3.724.733.145.474,14 | Rp3.426.883.704.407,36 |

Pendapatan - LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kota Makassar dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi TA 2018 dan TA 2017 sebagai berikut.

Tabel 64 Rincian Pendapatan-LO TA 2018 dan 2017

| No. | Uraian | 2018 (Rp) | 2017 (Rp) |
|-----|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. | Pendapatan Asli Daerah | 1.415.032.396.772,14 | 1.384.993.085.883,36 |
| 2. | Pendapatan Transfer | 2.142.919.586.050,00 | 2.009.872.099.724,00 |
| 3. | Lain-lain Pendapatan yang Sah | 166.781.162.652,00 | 32.018.518.800,00 |
| | Jumlah | 3.724.733.145.474,14 | 3.426.883.704.407,36 |

Realisasi Pendapatan - LO tahun 2018 adalah sebesar Rp3.724.733.145.474,14.

Masing-masing akun Pendapatan - LO dapat diuraikan sebagai berikut.

7.5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

| TA 2018 | TA 2017 |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Rp1.415.032.396.772,14 | Rp1.384.993.085.883,36 |

Akun PAD ini merupakan realisasi PAD pada Laporan Operasional untuk periode TA 2018 PAD pada tahun 2018 terealisasi sebesar Rp1.415.032.396.772,14 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 65 Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO TA 2018 dan 2017

| No. | Uraian | 2018 (Rp) | 2017 (Rp) |
|-----|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. | Pendapatan Pajak Daerah | 1.058.652.772.873,41 | 979.039.251.351,06 |
| 2. | Pendapatan Retribusi Daerah | 64.565.443.139,82 | 70.964.186.024,90 |
| 3. | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan | 92.041.920.511,71 | 44.645.827.520,41 |
| 4. | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 199.772.260.247,20 | 290.343.820.986,99 |
| | Jumlah | 1.415.032.396.772,14 | 1.384.993.085.883,36 |

Masing-masing realisasi jenis PAD TA 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar.

Pendapatan Pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

pendapatan pada tahun 2018, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada tahun 2018 ditambah dengan penerimaan pajak tanpa ketetapan tahun 2018. Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada pendapatan LRA.

Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2018 terealisasi sebesar Rp1.058.652.772.873,41 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 66 Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO TA 2018 dan 2017

| Jenis pajak | 2018 (Rp) | 2017 (Rp) |
|--|-----------------------------|---------------------------|
| Pajak Hotel – LO | 107.133.111.984,17 | 93.008.413.185,06 |
| Pajak Restoran – LO | 167.264.361.510,36 | 140.849.506.567,00 |
| Pajak Hiburan – LO | 47.288.041.089,44 | 31.601.993.375,00 |
| Pajak Reklame – LO | 44.879.531.313,00 | 44.368.896.234,00 |
| Pajak Penerangan Jalan – LO | 212.023.911.244,00 | 193.852.475.168,00 |
| Pajak Pengambilan Tambang Galian Gol. C – LO | 0,00 | 0,00 |
| Pajak Parkir – LO | 18.553.557.317,20 | 16.494.885.771,00 |
| Pajak Air Bawah Tanah – LO | 2.764.086.466,00 | 1.850.006.866,00 |
| Pajak Sarang Burung Walet – LO | 47.026.000,00 | 58.217.917,00 |
| Pajak BPHTB – LO | 210.360.574.161,00 | 272.826.084.740,00 |
| Pajak Bumi dan Bangunan Sek. P2 – LO | 248.338.571.788,24 | 183.968.163.679,00 |
| Perkiraan Penerimaan Melalui Rekanan - LO | 0,00 | 98.634.599,00 |
| Pajak Air Permukaan - LO | 0,00 | 61.973.250,00 |
| Jumlah | 1.058.652.772.873,41 | 979.039.251.351,06 |

2. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan retribusi daerah pada Pemerintah Kota Makassar dipungut dan dikelola oleh 25 OPD penghasil. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kota Makassar. Pemungutan Retribusi Daerah Kota Makassar didasarkan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan besarnya retribusi daerah ditetapkan melalui Perda.

Pendapatan Retribusi Daerah pada tahun 2018 terealisasi sebesar Rp64.565.443.139,82 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 67 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO TA 2018 dan 2017

| Jenis Retribusi | 2018 (Rp) | 2017 (Rp) |
|---|-------------------|-------------------|
| Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO | 2.972.996.350,00 | 3.081.321.700,00 |
| Retribusi Penyediaan/Penyedotan Kakus – LO | 362.345.000,00 | 371.027.750,00 |
| Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO | 7.016.062.623,00 | 11.973.456.957,56 |
| Retribusi Pelayanan Alat Pemadam Kebakaran – LO | 548.802.000,00 | 521.102.500,00 |
| Retribusi I M B – LO | 34.274.449.145,33 | 33.023.097.200,00 |



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

| Jenis Retribusi | 2018 (Rp) | 2017 (Rp) |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO | 1.671.003.317,84 | 2.127.795.797,84 |
| Retribusi Penyeberangan diatas Air – LO | 28.654.000,00 | 24.000.000,00 |
| Retribusi Izin Trayek – LO | 79.623.800,00 | 152.759.900,00 |
| Retribusi Pelayanan Pelayanan/Kebersihan – LO | 14.269.766.783,00 | 12.963.952.880,00 |
| Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat – LO | 608.064.543,65 | 510.154.146,83 |
| Retribusi Menara Telekomunikasi - LO | 0,00 | 0,00 |
| Retribusi Tempat Pelelangan Ikan – LO | 1.264.806.000,00 | 1.320.660.800,00 |
| Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol – LO | 1.010.000.000,00 | 486.716.666,67 |
| Retribusi Izin Gangguan/Keramaian – LO | 0,00 | 4.201.060.872,00 |
| Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LO | 0,00 | 207.078.854,00 |
| Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Tenaga Kerja Asing - LO | 363.738.540,00 | 0,00 |
| Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal – LO | 95.131.037,00 | 0,00 |
| Jumlah | 64.565.443.139,82 | 70.964.186.024,90 |

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan ini adalah PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Makassar pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar dengan realisasi pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp92.041.920.511,51 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 68 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO TA 2018 dan 2017

| No. | Uraian | 2018 (Rp) | 2017 (Rp) |
|-----|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Perusahaan Daerah | 85.519.472.476,51 | 36.562.746.177,34 |
| 1. | PDAM | 82.703.997.915,20 | 34.520.862.608,69 |
| 2. | PD. BPR | 0,00 | 0,00 |
| 3. | PD. Pasar Makassar Raya | 1.058.899.541,57 | 250.000.000,00 |
| 4. | PD. RPH | 0,00 | 0,00 |
| 5. | PD. Parkir | 1.756.575.019,74 | 1.625.869.672,80 |
| 6. | PD. Terminal | 0,00 | 166.013.895,85 |
| | Perusahaan Pemerintah | 6.416.848.035,00 | 7.918.081.343,08 |
| 7. | PT. Bank Sulselbar | 6.246.770.479,00 | 7.782.620.020,08 |
| 8. | PT. KIMA | 170.077.556,00 | 135.461.323,00 |
| | Perusahaan Swasta | 105.600.000,00 | 165.000.000,00 |
| 9. | PT. GMTD | 105.600.000,00 | 165.000.000,00 |
| | Jumlah | 92.041.920.511,51 | 44.645.827.520,41 |

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Pendapatan tersebut merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan realisasi penerimaan Lain-Lain PAD untuk periode TA 2018 dengan realisasi sebesar Rp199.772.260.247,20 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 69 Rincian Lain-lain PAD yang Sah – LO per TA 2018 dan 2017

| Jenis Lain-Lain PAD yang Sah | 2018 (Rp) | 2017 (Rp) |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD – LO | 71.827.191.576,00 | 45.395.963.462,00 |
| Pendapatan UPTD Bank Sampah – LO | 2.190.695.400,00 | 3.068.323.895,00 |
| Penerimaan Jasa Giro – LO | 9.190.032.362,00 | 7.952.414.534,00 |
| Penerimaan TP / TGR – LO | 3.629.790.871,34 | 2.378.235.922,01 |
| Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO | 2.844.139.449,00 | 3.039.506.058,00 |
| Penerimaan dari Pengembalian – LO | 7.899.940.375,00 | 5.796.853.971,41 |
| Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pembayaran Pajak dan Retribusi | 52.172.020.122,84 | 0,00 |
| Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO | 6.950.000,00 | 13.453.886.995,00 |
| Pendapatan Penjualan Tanah - LO | 479.505.293,00 | 877.084.336,00 |
| Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin - LO | 258.744.447,00 | 205.201.000,00 |
| Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan – LO | 267.047.978,00 | 101.380.000,00 |
| Pendapatan Bunga Deposito | 21.012.328.623,02 | 20.265.722.292,57 |
| Dana BOS – LO | 0,00 | 131.067.782.921,00 |
| Dana Kapitasi JKN FKTP | 27.993.873.750,00 | 56.741.465.600,00 |
| Jumlah | 199.772.260.247,20 | 290.343.820.986,99 |

7.5.4.1.2 Pendapatan Transfer

| | TA 2018 | TA 2017 |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| | Rp2.142.919.586.050,00 | Rp2.009.872.099.724,00 |

Pendapatan ini merupakan Pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi yang diterima dan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar. Adapun realisasi Pendapatan Transfer untuk periode TA 2018 sebesar Rp2.142.919.586.050,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 70 Rincian Pendapatan Transfer – LO TA 2018 dan 2017

| No. | Uraian | 2018 (Rp) | 2017 (Rp) |
|-----|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. | Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan | 1.808.260.589.494,00 | 1.672.967.166.403,00 |
| 2. | Transfer Pemerintah Pusat Lainnya | 17.875.000.000,00 | 7.500.000.000,00 |
| 3. | Transfer Pemerintah Provinsi | 316.783.996.556,00 | 329.404.933.321,00 |
| | Jumlah | 2.142.919.586.050,00 | 2.009.872.099.724,00 |



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Pemerintah Kota Makassar untuk periode tahun 2018 secara total terealisasi sebesar Rp1.808.260.589.494,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 71 Rincian Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO
TA 2018 dan 2017**

| No. | Uraian | 2018 (Rp) | 2017 (Rp) |
|-----|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. | Dana Bagi Hasil Pajak | 102.913.565.625,00 | 114.981.453.962,00 |
| 2. | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) | 4.366.784.880,00 | 3.735.395.178,00 |
| 3. | Dana Alokasi Umum | 1.299.554.321.692,00 | 1.300.764.306.000,00 |
| 4. | Dana Alokasi Khusus | 401.425.917.297,00 | 253.486.011.263,00 |
| | Jumlah | 1.808.260.589.494,00 | 1.672.967.166.403,00 |

2. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya untuk tahun 2018 sebesar Rp17.875.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 72 Rincian Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO
TA 2018 dan 2017**

| No. | Uraian | 2018 (Rp) | 2017 (Rp) |
|-----|---------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1. | Dana Otonomi Khusus | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Dana Penyesuaian | 17.875.000.000,00 | 7.500.000.000,00 |
| | Jumlah | 17.875.000.000,00 | 7.500.000.000,00 |

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya pada tahun 2018 berupa Dana Penyesuaian sebesar Rp17.875.000.000,00 yang merupakan Dana Penyesuaian untuk insentif daerah.

3. Transfer Pemerintah Provinsi

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi untuk periode tahun anggaran 2018 sebesar Rp316.783.996.556,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 73 Rincian Transfer Pemerintah Provinsi – LO
TA 2018 dan 2017**

| No. | Uraian | 2018 (Rp) | 2017 (Rp) |
|-----|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 316.783.996.556,00 | 329.404.933.321,00 |
| 2. | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 316.783.996.556,00 | 329.404.933.321,00 |

Pendapatan Bagi Hasil Pajak terdiri dari:

- Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp128.976.698.600,00;
- BBN Kendaraan Bermotor sebesar Rp66.029.781.585,00;
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp66.825.260.946,00;



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABT/AP sebesar Rp740.449.533,00;
- e. Pajak Cukai Hasil Tembakau Rp219.833.000,00;
- f. Pajak Rokok sebesar Rp53.991.972.892,00.

| Lain-lain | TA 2018 | TA 2017 |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 7.5.4.1.3 Pendapatan yang Sah | Rp166.781.162.652,00 | Rp32.018.518.800,00 |

Lain-lain Pendapatan yang Sah ini pada tahun 2018 terealisasi sebesar Rp166.781.162.652,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 74 Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah

| No. | Uraian | 2018 (Rp) | 2017 (Rp) |
|-----|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1. | Pendapatan Hibah | 150.619.436.579,00 | 15.000.000.000,00 |
| 2. | Pendapatan Dana Darurat | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pendapatan Lainnya | 16.161.726.073,00 | 17.018.518.800,00 |
| | Jumlah | 166.781.162.652,00 | 32.018.518.800,00 |

Pendapatan Hibah merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah sebesar Rp150.619.436.579,00

Pendapatan Lainnya sebesar Rp16.161.726.073,00 merupakan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

| 7.5.4.2 Beban – LO | TA 2018 | TA 2017 |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | Rp3.208.229.355.402,46 | Rp3.685.474.759.191,58 |

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama satu tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi beban tersebut tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut.

| 7.5.4.2.1 Beban Pegawai | TA 2018 | TA 2017 |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | Rp1.208.429.551.320,00 | Rp1.187.843.426.330,00 |

Beban pegawai - LO disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai - LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2018 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada tahun 2018.

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 yang terealisasi sebesar Rp1.208.429.551.320,00, dengan rincian pada tabel berikut.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Tabel 75 Rincian Beban Pegawai- LO TA 2018 dan 2017

| No. | Uraian | 2018 (Rp) | 2017 (Rp) |
|-----|---|--------------------|--------------------|
| 1 | Gaji Pokok PNS / Uang Representasi – LO | 557.461.216.472,00 | 573.379.527.319,00 |
| 2 | Tunjangan Keluarga – LO | 45.831.180.368,00 | 43.630.166.121,00 |
| 3 | Tunjangan Jabatan – LO | 14.448.097.100,00 | 13.523.096.000,00 |
| 4 | Tunjangan Fungsional – LO | 38.794.388.900,00 | 37.504.649.340,00 |
| 5 | Tunjangan Fungsional Umum - LO | 7.596.437.500,00 | 7.552.539.499,00 |
| 6 | Tunjangan Beras – LO | 25.350.526.573,00 | 27.082.586.324,00 |
| 7 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO | 3.224.993.664,00 | 2.680.566.776,00 |
| 8 | Pembulatan Gaji – LO | 7.087.046,00 | 7.110.026,00 |
| 9 | Iuran Jaminan Kesehatan - LO | 15.524.676.709,00 | 15.996.690.881,00 |
| 10 | Uang Paket – LO | 5.605.173.193,00 | 2.651.901.736,00 |
| 11 | Tunjangan Badan Musyawarah - LO | 205.529.469.000,00 | 205.403.803.640,00 |
| 12 | Tunjangan Komisi – LO | 2.070.000.000,00 | 2.566.000.000,00 |
| 13 | Tunjangan Badan Anggaran - Pimpinan dan Anggota DPRD - LO | 32.246.550,00 | 31.972.500,00 |
| 14 | Tunjangan Badan Kehormatan - Pimpinan dan Anggota DPRD - LO | 7.856.100,00 | 7.856.100,00 |
| 15 | Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya - Pimpinan dan Anggota DPRD – LO | 22.106.700,00 | 22.654.800,00 |
| 16 | Tunjangan Perumahan - Pimpinan dan Anggota DPRD - LO | 6.606.000.000,00 | 7.218.000.000,00 |
| 17 | Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD – LO | 1.718.518.230,00 | 1.633.534.440,00 |
| 18 | Tunjangan Asuransi Ketenagakerjaan - LO | 1.382.940,00 | 0,00 |
| 19 | Tambahan penghasilan untuk tunjangan kesejahteraan -LO | 7.242.000,00 | 5.343.040,00 |
| 20 | Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja – LO | 48.947.550,00 | 43.200.000,00 |
| 21 | Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas - LO | 6.852.657,00 | 5.502.000,00 |
| 22 | Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja - LO | 85.252.500,00 | 70.740.000,00 |
| 23 | Tambahan Penghasilan Guru | 1.284.032.360,00 | 2.103.262.849,00 |
| 24 | Tunjangan Profesi Guru | 515,00 | 360,00 |
| 25 | Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD - LO | 1.085.595.000,00 | 1.104.810.000,00 |
| 26 | Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH – LO | 2.197.402.800,00 | 1.464.046.800,00 |
| 27 | Insentif Pemungutan Pajak Daerah - LO | 8.599.500.000,00 | 4.977.000.000,00 |
| 28 | Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - Pimpinan dan Anggota DPRD | 4.443.180,00 | 2.317.860,00 |
| 29 | Beban Iuran Jaminan Kesehatan - Pimpinan dan Anggota DPRD | 21.183.120,00 | 25.584.741,00 |
| 30 | Beban Iuran Jaminan Ketenagakerjaan - Pimpinan dan Anggota DPRD | 8.972.208,00 | 7.067.592,00 |
| 31 | Beban Uang Paket - Pimpinan dan Anggota DPRD | 93.114.000,00 | 94.563.000,00 |
| 32 | Beban Tunjangan Badan Musyawarah - Pimpinan dan Anggota DPRD | 31.789.800,00 | 31.972.500,00 |
| 33 | Beban Tunjangan Komisi - Pimpinan dan Anggota DPRD | 59.925.600,00 | 60.839.100,00 |
| 34 | Beban Uang Jasa Pengabdian - Pimpinan dan Anggota DPRD | 0,00 | 3.150.000,00 |
| 35 | Beban Penunjang Operasional - Pimpinan dan Anggota DPRD | 366.361.800,00 | 393.120.000,00 |



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

| No. | Uraian | 2018 (Rp) | 2017 (Rp) |
|---------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 36 | Beban Tunjangan Reses - Pimpinan dan Anggota DPRD | 2.160.900.000,00 | 720.300.000,00 |
| 37 | Beban Tunjangan Transportasi - Pimpinan dan Anggota DPRD | 5.400.000.000,00 | 1.350.000.000,00 |
| 38 | Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan - LO | 1.339.800,00 | 1.461.600,00 |
| 39 | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - LO | 33.890.578.215,00 | 38.317.677.616,00 |
| 40 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 191.338.578.778,00 | 187.653.208.400,00 |
| 41 | Beban Pegawai Dana BOS | 6.936.899.967,00 | 7.481.053.370,00 |
| 42 | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa | 988.100.000,00 | 1.034.550.000,00 |
| 43 | Beban Pegawai BLUD | 23.981.182.425,00 | 0,00 |
| JUMLAH | | 1.208.429.551.320,00 | 1.187.843.426.330,00 |

7.5.4.2.2 Beban Persediaan

| TA 2018 | TA 2017 |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Rp207.834.833.814,89 | Rp237.627.198.375,11 |

Beban Persediaan merupakan saldo Beban Persediaan periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp207.834.833.814,89. Beban persediaan-LO disajikan dengan basis akrual, yaitu beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Dengan penggunaan metode fisik maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan metode masuk pertama keluar pertama (MPKP atau FIFO), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 76 Rincian Beban Persediaan LO TA 2018 dan 2017

| No. | Uraian | 2018 (Rp) | 2017 (Rp) |
|-----|---|-------------------|-------------------|
| 1 | Beban Persediaan alat tulis kantor | 20.471.361.732,89 | 49.426.205.356,00 |
| 2 | Beban Persediaan dokumen/administrasi tender | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) | 21.988.792.073,00 | 26.693.670.110,00 |
| 4 | Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya | 12.000.000,00 | 23.100.000,00 |
| 5 | Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih | 7.776.975.440,00 | 7.761.275.200,00 |
| 6 | Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas | 2.657.243.075,00 | 2.068.908.800,00 |
| 7 | Beban Persediaan pengisian tabung pemadam kebakaran | 10.078.000,00 | 19.750.000,00 |
| 8 | Beban Persediaan pengisian isi tabung gas | 122.986.000,00 | 121.249.000,00 |
| 9 | Beban Persediaan plakat dan cenderamata | 2.706.844.325,00 | 3.892.538.350,00 |
| 10 | Beban Persediaan bendera dan spanduk | 3.177.334.000,00 | 4.157.807.500,00 |
| 11 | Beban Persediaan hadiah barang | 1.054.946.000,00 | 3.904.491.000,00 |
| 12 | Beban Persediaan barang persediaan | 0,00 | 0,00 |



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

| No. | Uraian | 2018 (Rp) | 2017 (Rp) |
|---------------|---|---------------------------|---------------------------|
| 13 | Beban Persediaan rumah tangga | 462.174.700,00 | 603.953.500,00 |
| 14 | Beban Persediaan bahan baku bangunan | 21.955.225.205,00 | 4.219.516.500,00 |
| 15 | Beban Persediaan bahan/bibit tanaman | 3.630.408.500,00 | 6.605.395.000,00 |
| 16 | Beban Persediaan bibit ternak | 108.750.000,00 | 901.700.000,00 |
| 17 | Beban Persediaan bahan obat-obatan | 31.906.528.333,00 | 4.304.666.859,11 |
| 18 | Beban Persediaan bahan kimia | 1.086.074.000,00 | 1.273.655.075,00 |
| 19 | Beban Persediaan bahan material dlm rangka peringatan hari-hari besar | 154.203.000,00 | 133.983.000,00 |
| 20 | Beban Persediaan bahan material | 0,00 | 28.917.814.740,00 |
| 21 | Beban Persediaan bahan makanan dan minuman | 15.007.005.916,00 | 16.327.148.899,00 |
| 22 | Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas | 44.886.658.002,00 | 43.138.976.832,00 |
| 23 | Beban Persediaan Cetak | 19.069.566.793,00 | 26.193.072.154,00 |
| 24 | Beban Persediaan peralatan/perlengkapan pelatihan | 96.096.000,00 | 308.689.600,00 |
| 25 | Beban Persediaan peralatan/perlengkapan pelatihan/praktek | 3.295.662.100,00 | 2.250.489.200,00 |
| 26 | Beban Persediaan peralatan/perlengkapan kerja lapangan | 539.829.000,00 | 792.365.500,00 |
| 27 | Beban Persediaan Alat/Bahan Tanggap Darurat | 909.490.000,00 | 889.604.600,00 |
| 28 | Beban Persediaan bahan pakai habis olahraga | 47.690.000,00 | 92.600.000,00 |
| 29 | Beban Pesediaan PMKS/Rumah Shelter | 153.800.000,00 | 282.800.000,00 |
| 30 | Beban Persediaan bahan pakai habis perlengkapan mayat | 396.720.000,00 | 288.915.000,00 |
| 31 | Beban Persediaan bahan pakai habis pemadam | 1.110.040.000,00 | 1.057.795.000,00 |
| 33 | Beban Persediaan bahan material praktek/pratikum | 901.869.200,00 | 975.061.600,00 |
| | Beban bahan habis pakai pengelolaan bank sampah | 2.138.482.420,00 | 0,00 |
| JUMLAH | | 207.834.833.814,89 | 237.627.198.375,11 |

7.5.4.2.3 Beban Jasa

| TA 2018 | TA 2017 |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Rp1.113.952.641.666,67 | Rp898.978.284.710,16 |

Beban Jasa adalah Beban Jasa yang meliputi jasa konsultan, listrik, air, telepon, internet, premi asuransi, sewa, beban makanan dan minuman periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 yang terealisasi sebesar Rp1.113.952.641.666.67.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

7.5.4.2.4 **Beban Pemeliharaan**

| TA 2018 | TA 2017 |
|----------------------------|----------------------------|
| Rp51.119.397.093,00 | Rp59.017.570.752,00 |

Beban Pemeliharaan adalah Beban yang meliputi Pemeliharaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, dan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 yang terealisasi sebesar Rp51.119.397.093,00, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 77 Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2018 dan 2017

| No. | Uraian | 2018 (Rp) | 2017 (Rp) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Beban Jasa Service | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Beban Penggantian Suku Cadang | 27.667.021.334,00 | 30.910.853.835,00 |
| 3 | Beban Jasa KIR | 43.043.000,00 | 44.590.000,00 |
| 4 | Beban Pajak Kendaraan Bermotor | 1.622.103.129,00 | 1.466.079.156,00 |
| 5 | Beban Pemeliharaan Tanah | 757.670.650,00 | 1.359.165.550,00 |
| 6 | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 8.488.046.600,00 | 8.691.534.500,00 |
| 7 | Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 11.584.166.781,00 | 11.140.436.211,00 |
| 8 | Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 957.345.599,00 | 2.632.288.000,00 |
| 9 | Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 2.772.623.500,00 |
| JUMLAH | | 51.119.397.093,00 | 59.017.570.752,00 |

7.5.4.2.5 **Beban Perjalanan Dinas**

| TA 2018 | TA 2017 |
|----------------------------|----------------------------|
| Rp80.847.385.191,00 | Rp82.490.254.388,00 |

Beban Perjalanan Dinas meliputi Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dimana pada tahun 2018 realisasi Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp80.847.385.191,00 terdiri atas:

- Beban perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp983.232.281,00; dan
- Beban perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp79.864.152.910,00.

7.5.4.2.6 **Beban Bunga**

| TA 2018 | TA 2017 |
|---------------|-------------------------|
| Rp0,00 | Rp254.324.108,38 |

Beban Bunga adalah Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah pada periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018. Tidak terdapat realisasi beban bunga di tahun 2018.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

7.5.4.2.7 Beban Hibah

| TA 2018 | TA 2017 |
|-----------------------------|----------------------------|
| Rp141.901.940.096,00 | Rp76.924.413.515,00 |

Beban Hibah terdiri dari Beban yang akan diserahkan kepada masyarakat dan pihak ketiga, Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi, Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat, dan Hibah BOP PAUD masyarakat/swasta yang terjadi pada periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 yang terealisasi sebesar Rp137.471.785.280,00, terdiri atas:

Tabel 78 Rincian Beban Hibah Tahun 2018 dan 2017

| No. | Uraian | 2018 (Rp) | 2017 (Rp) |
|---------------|---|---------------------------|--------------------------|
| 1 | Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat | 4.614.673.516,00 | 0,00 |
| 2 | Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Beban Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi | 119.911.666.580,00 | 45.014.728.000,00 |
| 4 | Beban Hibah kepada kelompok/anggota masyarakat | 6.385.000.000,00 | 22.623.485.515,00 |
| 5 | Beban Hibah BOP PAUD Masyarakat/Swasta | 10.959.600.000,00 | 9.286.200.000,00 |
| 6 | Beban barang dan jasa dana pendidikan gratis tingkat SD/SMP/SMA/SMK | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Beban barang dan jasa dana kesehatan gratis rumah sakit/Puskesmas | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Beban Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 31.000.000,00 | 0,00 |
| Jumlah | | 141.901.940.096,00 | 76.924.413.515,00 |

7.5.4.2.8 Beban Bantuan Sosial

| TA 2018 | TA 2017 |
|-------------------------|---------------|
| Rp495.618.700,00 | Rp0,00 |

Beban Bantuan Sosial adalah Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 yang terealisasi sebesar Rp.495.618.700,00.

7.5.4.2.9 Beban Penyusutan

| TA 2018 | TA 2017 |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Rp351.774.828.958,09 | Rp959.325.303.874,41 |

Beban ini merupakan Beban Penyusutan Aset Tetap, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-Lain pada tahun 2018 dengan total nilai Beban Penyusutan sebesar Rp351.774.828.958,09 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 79 Rincian Beban Penyusutan Tahun 2018 dan 2017

| No. | Uraian | 2018 (Rp) | 2017 (Rp) |
|-----|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 157.942.476.146,00 | 146.497.912.069,41 |
| 2 | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 26.634.171.742,00 | 22.319.368.435,00 |



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

| No. | Uraian | 2018 (Rp) | 2017 (Rp) |
|---------------|---|---------------------------|---------------------------|
| 3 | Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan | 163.297.212.976,00 | 786.410.762.449,00 |
| 4 | Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya | 1.589.909.204,09 | 1.121.470.781,00 |
| 5 | Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud | 2.311.058.890,00 | 2.975.790.140,00 |
| JUMLAH | | 351.774.828.958,09 | 959.325.303.874,41 |

7.5.4.2.10 **Beban Penyisihan Piutang**

| TA 2018 | TA 2017 |
|----------------------------|----------------------------|
| Rp43.602.977.147,23 | Rp25.336.257.391,29 |

Beban Penyisihan Piutang adalah Beban Penyisihan Piutang pada periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dimana pada tahun 2018 realisasi Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp43.602.977.147,23 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 80 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2018 dan 2017

| No. | Uraian | 2018 (Rp) | 2017 (Rp) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Beban Penyisihan Piutang Pajak | 35.355.854.191,69 | 24.332.051.637,10 |
| 2 | Beban Penyisihan Piutang Retribusi | 2.790.255.508,25 | 1.004.205.754,19 |
| 3 | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya | 5.456.867.447,28 | 0,00 |
| JUMLAH | | 43.602.977.147,23 | 25.336.257.391,29 |

7.5.4.2.11 **Beban Lain-lain**

| TA 2018 | TA 2017 |
|---------------------------|-----------------------------|
| Rp5.175.643.415,59 | Rp161.086.279.274,23 |

Beban Lain-Lain periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 yang terealisasi sebesar Rp5.175.643.415,59 meliputi:

- Beban Penurunan Nilai Investasi sebesar Rp1.027.182.677,48;
- Beban lain-lain sebesar Rp4.027.806.458;
- Beban Tak Terduga sebesar Rp120.654.280,00.

7.5.4.2.12 **Beban Transfer**

| TA 2018 | TA 2017 |
|---------------------------|---------------------------|
| Rp3.094.538.000,00 | Rp1.091.333.000,00 |

Beban Transfer adalah Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 yang terealisasi sebesar Rp3.094.538.000,00.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

7.5.4.3 Surplus/Defisit dari Operasi

| TA 2018 | TA 2017 |
|---------------------------|-----------------------------|
| 516.503.790.071,68 | (258.591.054.784,22) |

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban-LO selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi selama periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel 81 Rincian Surplus/Defisit dari Operasi Tahun 2018 dan 2017

| No | Uraian | 2018 (Rp) | 2017 (Rp) |
|---------------|------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1 | Pendapatan | 3.724.733.145.474,14 | 3.426.883.704.407,36 |
| 2 | Beban | 3.208.229.355.402,46 | 3.685.474.759.191,58 |
| Jumlah | | 516.503.790.071,68 | (258.591.054.784,22) |

7.5.4.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

| TA 2018 | TA 2017 |
|-------------|-------------|
| 0,00 | 0,00 |

Tidak terdapat realisasi Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada tahun 2018.

7.5.4.5 Pos Luar Biasa

| TA 2018 | TA 2017 |
|---------------|---------------|
| Rp0,00 | Rp0,00 |

Pada tahun 2018 tidak terdapat realisasi Pos luar Biasa baik berupa pendapatan maupun beban luar biasa.

7.5.4.6 Surplus/Defisit – LO

| TA 2018 | TA 2017 |
|---------------------------|-----------------------------|
| 516.503.790.071,68 | (258.591.054.784,22) |

Surplus/Defisit - LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban-LO selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2018 terdapat surplus sebesar Rp516.503.790.071,68.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

7.5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

7.5.5.1 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran selama satu periode akuntansi serta memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

| | TA. 2018 | TA. 2017 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 7.5.5.1.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi | Rp648.704.994.295,65 | Rp726.567.803.015,06 |

Merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas dari aktivitas operasi terdiri dari:

1. Arus Kas Masuk **Rp3.427.953.936.737,65**

Arus Kas Masuk adalah jumlah realisasi penerimaan kas yang berkenaan dengan kegiatan operasional dalam periode TA 2018.

Arus Kas Masuk dari aktivitas operasi terdiri dari :

| | | |
|--|-----------|-----------------------------|
| a. Pajak Daerah | Rp | 942.551.891.961,00 |
| b. Retribusi Daerah | Rp | 57.277.225.805,00 |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Rp | 49.463.120.625,29 |
| d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah | Rp | 135.634.980.173,36 |
| e. Dana Bagi Hasil Pajak | Rp | 102.913.565.625,00 |
| f. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) | Rp | 4.366.784.880,00 |
| g. Dana Alokasi Umum | Rp | 1.299.554.321.692,00 |
| h. Dana Alokasi khusus | Rp | 401.425.917.297,00 |
| i. Dana Penyesuaian | Rp | 17.875.000.000,00 |
| j. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi | Rp | 272.000.033.019,00 |
| k. Hibah | Rp | 128.588.743.987,00 |
| l. Dana Darurat | Rp | 0,00 |
| m. Bantuan Keuangan | Rp | 0,00 |
| n. Pendapatan Lainnya | Rp | 16.302.351.673,00 |
| Jumlah | Rp | 3.427.953.936.737,65 |

2. Arus Kas Keluar **Rp2.779.248.942.442,00**



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Arus Kas Keluar adalah jumlah realisasi pengeluaran kas yang berkenaan dengan kegiatan operasional dalam periode TA 2018, terdiri dari

| | | |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp | 1.208.192.744.067,00 |
| b. Belanja Barang | Rp | 1.430.119.739.515,00 |
| c. Belanja Bunga | Rp | 0,00 |
| d. Belanja Hibah | Rp | 137.256.266.580,00 |
| e. Belanja Bantuan Sosial | Rp | 465.000.000,00 |
| f. Belanja Bantuan Keuangan | Rp | 3.094.538.000,00 |
| g. Belanja Tidak Terduga | Rp | 120.654.280,00 |
| h. Belanja Bagi Hasil | Rp | 0,00 |
| Jumlah | Rp | 2.779.248.942.442,00 |

3. Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rp648.704.994.295,65

7.5.5.1.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

| TA. 2018 | TA. 2017 |
|----------------------|----------------------|
| (746.306.268.030,09) | (623.836.208.201,40) |

Arus Kas dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

Arus Kas dari aktivitas investasi Aset Non Keuangan terdiri dari:

1. Arus Kas Masuk Rp525.792.425,00

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan pada Tahun Anggaran 2018 terdiri dari:

| | | |
|--|----|----------------|
| a. Pencairan Dana Cadangan | Rp | 0,00 |
| b. Pendapatan Penjualan atas Tanah | Rp | 0,00 |
| c. Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin | Rp | 258.744.447,00 |
| d. Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan | Rp | 267.047.978,00 |
| e. Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan | Rp | 0,00 |
| f. Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap | Rp | 0,00 |
| g. Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya | Rp | 0,00 |
| h. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Rp | 0,00 |



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

| | | |
|--|----|-----------------------|
| i. Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen | Rp | 0,00 |
| Jumlah Arus Kas Masuk | | 525.792.425,00 |

2. Arus Kas Keluar Rp746.832.060.455,09

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan adalah jumlah pengeluaran kas atas realisasi belanja modal/ pembangunan/investasi dalam TA 2018 dirinci menurut objek belanja sebagai berikut.

| | | |
|---------------------------------|-----------|---------------------------|
| (1) Tanah | Rp | 1.287.268.520,00 |
| (2) Peralatan dan Mesin | Rp | 148.311.772.459,00 |
| (3) Gedung dan Bangunan | Rp | 148.354.692.939,00 |
| (4) Jalan, Irigasi dan Jaringan | Rp | 412.524.720.881,00 |
| (5) Aset Tetap Lainnya | Rp | 32.061.129.098,09 |
| (6) Aset Lainnya | Rp | 4.292.476.558,00 |
| Jumlah | Rp | 746.832.060.455,09 |

3. Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Investasi (Rp746.306.268.030,09)

| | | |
|---|--------------|----------------------|
| 7.5.5.1.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan | TA. 2018 | TA. 2017 |
| | 4.350.000,00 | (Rp3.786.506.165,04) |

Arus kas dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pemerintah daerah terhadap pihak lain dimasa yang akan datang.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan terdiri dari:

1. Arus Kas Masuk Rp4.350.000,00

Dalam Tahun Anggaran 2018 Penerimaan Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan diperoleh dari :

| | | |
|--------------------------------------|-----------|---------------------|
| a. Penerimaan Pinjaman Daerah | Rp | 0,00 |
| b. Pencairan Dana Cadangan | Rp | 0,00 |
| c. Penerimaan Kembali Piutang | Rp | 4.350.000,00 |
| d. Penerimaan Sisa UYHD Tahun Lalu | Rp | 0,00 |
| e. Penerimaan Kewajiban Pihak Ketiga | Rp | 0,00 |
| Jumlah | Rp | 4.350.000,00 |



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

2. Arus Kas Keluar

Rp0,00

Pengeluaran kas untuk membiayai pengeluaran pendanaan terdiri atas pembayaran angsuran penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah, belanja dibayar dimuka, dan pembayaran pokok utang pinjaman dan obligasi dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|--|-----------|-------------|
| a. Pemberian Pinjaman Daerah | Rp | 0,00 |
| b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | Rp | 0,00 |
| c. Pembayaran Pokok Pinjaman Jatuh Tempo | Rp | 0,00 |
| d. Belanja dibayar dimuka (sisanya UYHD) | Rp | 0,00 |
| Jumlah | Rp | 0,00 |

3. Jumlah Arus Kas Bersih dari

Aktivitas Pendanaan

Rp4.350.000

7.5.5.1.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

| TA. 2018 | TA. 2017 |
|-------------------------|-------------------------|
| Rp240.154.711,00 | Rp547.385.486,91 |

Arus kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah, arus kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang, PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum daerah Arus Kas dari Aktivitas Non anggaran terdiri dari:

1. Arus Kas Masuk Rp231.448.694.284,76

Dalam Tahun Anggaran 2018 terdapat Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga berupa pemotongan/pemungutan IWP, Taperum dan PPh 21 serta penyetorannya sebesar Rp231.448.694.284,76

2. Arus Kas Keluar Rp231.208.539.573,76

Dalam Tahun Anggaran 2018 terdapat pemotongan/pemungutan IWP, Taperum dan PPh 21 serta penyetorannya Rp231.208.539.573,76

3. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Rp240.154.711,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

| Kenaikan Bersih Kas | TA. 2018 | TA. 2017 |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 7.5.5.1.5 Selama Periode TA 2018 | (Rp97.356.769.023,44) | Rp99.492.474.135,53 |

Kenaikan terdiri dari:

| | | |
|---|------------|---------------------------|
| 1. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | Rp | 648.704.994.295,65 |
| 2. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi | (Rp | 746.306.268.030,09) |
| 3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan | Rp | 4.350.000,00 |
| 4. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris | Rp | 240.154.711,00 |
| Jumlah Kenaikan Bersih Kas | (Rp | 97.356.769.023,44) |

Periode Tahun Anggaran 2018

Saldo Akhir Kas terdiri dari:

| | | |
|---|-----------|---------------------------|
| - Saldo Awal Kas BUD dan Kas Bendahara Pengeluaran | Rp | 272.901.324.906,26 |
| - Saldo Akhir Kas BUD dan Kas Bendahara Pengeluaran | Rp | 175.544.555.882,82 |
| Jumlah | Rp | 175.544.555.882,82 |

Perbandingan saldo akhir kas di BUD antara Neraca dan Laporan Arus Kas (LAK) sebagai berikut.

| | | |
|---|-----------|-------------------------|
| Saldo Akhir Kas BUD di Neraca | Rp | 269.166.326.216,93 |
| Saldo Akhir Kas BUD di Laporan Arus Kas (LAK) | Rp | 272.901.324.906,26 |
| Selisih | Rp | 3.734.998.689,33 |

Perbandingan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) di Laporan Realisasi Anggaran dengan Sisa Saldo Akhir Kas di Laporan Arus Kas (LAK) sebagai berikut.

| | | |
|---|-----------|-----------------------|
| SiLPA di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) | Rp | 174.757.015.684,91 |
| Saldo Akhir Kas di Laporan Arus Kas (LAK) | Rp | 175.544.555.882,82 |
| Selisih | Rp | 787.540.197,91 |

Selisih tersebut diatas merupakan:

| | | |
|--------------------------------|-----------|-----------------------|
| 1. Kas Dana BOS Tahun 2017 | Rp | 381.210.642,91 |
| 2. Utang Pajak Dana BOS | Rp | 240.154.711,00 |
| 3. Utang Pajak SKPD Tahun 2017 | Rp | 166.174.844,00 |
| Jumlah | Rp | 787.540.197,91 |



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

7.5.6. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

7.5.5.1.1 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan kinerja keuangan terhadap pendapatan dan beban operasional selama 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018. Laporan Operasional merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2018 terdapat saldo awal ekuitas sebesar **Rp26.412.007.699.548,10** merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2017.
2. Surplus/defisit – LO tahun 2018 Pemerintah Kota Makassar sebesar **Rp516.503.790.071,68** merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca.
3. Pada LPE terdapat selisih sebesar **(Rp53.635.585.027,79)** hal ini sebagai dampak akumulatif karena koreksi yang disebabkan adanya perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar atas koreksi saldo awal karena kurang atau lebih catat yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. **Koreksi Aset Tetap** per 31 Desember 2018 sebesar (Rp54.646.044.710,84) merupakan mutasi penambahan dan pengurangan dari aset tetap tanah, aset tetap peralatan dan mesin, aset tetap gedung dan bangunan dan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap aset tetap lainnya per 31 Desember 2018, dengan rincian pada OPD sebagai berikut:

Tabel 82 Koreksi Aset Tetap

| No | OPD | Koreksi Aset Tetap | |
|----|--|---------------------|----------------------|
| | | 2018 | 2017 |
| 1 | Dinas Pendidikan | (10.334.811.552,32) | (680.929.846.754,66) |
| 2 | Dinas Kesehatan | 5.336.987.879,00 | (6.552.568.404,00) |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum | (49.052.208.518,72) | (6.868.849.094,42) |
| 4 | Dinas Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 0,00 | (2.235.000,00) |
| 6 | Satuan Polisi Pamong Praja | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Dinas Pemadam Kebakaran | (339.576.946,00) | (7.572.467.500,00) |
| 8 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0,00 | (9.577.288,06) |
| 9 | Dinas Sosial | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dinas Ketenagakerjaan | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0,00 | 37.842.000,00 |
| 12 | Dinas Ketahanan Pangan | 3.225.460,00 | 0,00 |
| 13 | Dinas Pertanahan | 13.500.000,00 | 23.015.520,00 |
| 14 | Dinas Lingkungan Hidup | 0,00 | 474.230.546,56 |
| 15 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | (222.690.250,00) | 446.083.570,00 |
| 17 | Dinas Perhubungan | 0,00 | (560.190.000,00) |



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

| No | OPD | Koreksi Aset Tetap | |
|----|--|----------------------------|-----------------------------|
| | | 2018 | 2017 |
| 18 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 150.000.000,00 |
| 19 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Dinas Pemuda dan Olahraga | (464.307.047,00) | (690.499.176,25) |
| 22 | Dinas Kebudayaan | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Dinas Perpustakaan | 55.488.000,00 | 0,00 |
| 24 | Dinas Kearsipan | (34.499.995,73) | 0,00 |
| 25 | Dinas Perikanan dan Pertanian | 23.590.000,00 | (331.106.570,00) |
| 26 | Dinas Pariwisata | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Dinas Perdagangan | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah | 0,00 | (282.395.000,00) |
| 30 | Badan Pendapatan Daerah | 0,00 | 30.060.000,00 |
| 31 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah | 0,00 | (15.000.000,00) |
| 32 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Sekretariat Daerah | 119.899.999,93 | (1.658.234.500,00) |
| 34 | Sekretariat DPRD | 296.888.260,00 | 0,00 |
| 35 | Inspektorat Daerah | 0,00 | (20.500.000,00) |
| 36 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Kecamatan Biringkanaya | 0,00 | 63.700.000,00 |
| 38 | Kecamatan Bontoala | 16.786.000,00 | (87.848.475,00) |
| 39 | Kecamatan Makassar | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Kecamatan Mamajang | 0,00 | 16.786.000,00 |
| 41 | Kecamatan Manggala | (39.900.000,00) | 0,00 |
| 42 | Kecamatan Mariso | 0,00 | (800.000,00) |
| 43 | Kecamatan Panakukang | 155.159.000,00 | 0,00 |
| 44 | Kecamatan Rappocini | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Kecamatan Tallo | 0,00 | 4.947.000,00 |
| 46 | Kecamatan Tamalanrea | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Kecamatan Tamalate | 0,00 | 39.000.000,00 |
| 48 | Kecamatan Ujung Pandang | (113.075.000,00) | 133.607.450,00 |
| 49 | Kecamatan Ujung Tanah | (80.000.000,00) | (18.000.000,00) |
| 50 | Kecamatan Wajo | 0,00 | (24.623.475,00) |
| 51 | Kecamatan Kepulauan Sangkarrang | 13.500.000,00 | 0,00 |
| | Jumlah | (54.646.044.710,84) | (704.205.469.150,83) |



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

- b. **Koreksi Investasi** per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.267.149.405,45 merupakan selisih penyesuaian nilai investasi terkait dengan adanya penambahan maupun pengurangan investasi pada perusahaan daerah karena mengalami laba atau rugi pada perusahaan daerah tersebut per 31 Desember 2018 yang dicatat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- c. **Koreksi Hutang** per 31 Desember 2018 sebesar Rp3.348.296.124,50 merupakan penyesuaian hutang terkait dengan adanya penambahan maupun pengurangan hutang per 31 Desember 2018 dan saldo awal per 31 Desember 2017 dengan rincian pada OPD sebagai berikut.

Tabel 83 Koreksi Hutang

| No | OPD | Koreksi Hutang | |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | 2018 (Rp) | 2017 (Rp) |
| 1 | Dinas Pendidikan | (286.566.685,00) | 0,00 |
| 2 | Dinas Pekerjaan Umum | 2.229.126.385,00 | 0,00 |
| 3 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 40.000.000,00 | 0,00 |
| 4 | Sekretariat DPRD | (451.716.287,50) | 0,00 |
| 5 | Dinas Kesehatan | 1.817.452.712,00 | (2.847.227.742,17) |
| 6 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset | 0,00 | 439.602.255,83 |
| Jumlah | | 3.348.296.124,50 | (2.407.625.486,17) |

- d. **Koreksi Amortisasi** per 31 Desember 2018 sebesar Rp144.448.000,00 merupakan penyesuaian saldo awal amortisasi aset tak berwujud pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp4.000.000,00 dan Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp140.448.000,00.
- e. **Koreksi Kas** pada bendahara dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) per 31 Desember 2018 sebesar (Rp57.064.979,00) yang dicatat pada Dinas Pendidikan yang merupakan penyesuaian saldo awal sebesar Rp59.607.578,00 dan koreksi atas kelebihan belanja pada SD Negeri Mangkura II sebesar (Rp2.542.600,00). Adapun rincian sekolah terdapat pada tabel berikut:

Tabel 84 Koreksi Kas

| NO | NAMA SEKOLAH | NILAI |
|----|----------------------------|---------------|
| 1 | SD NEGERI DAYA II | 30.600.000,00 |
| 2 | SD NEGERI SUDIANG | 669.685,00 |
| 3 | SD INPRES PAJJAIANG | (152.500,00) |
| 4 | SD NEGERI MACCINI 3 | (40.000,00) |
| 5 | SD INPRES BERT MAMAJANG II | 30.000.000,00 |
| 6 | SD INPRES KASSI | 20.000,00 |
| 7 | SD INPRES MARISO III | 12.000,00 |
| 8 | SD NEGERI KALUKUANG.IV | (22.500,00) |



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

| NO | NAMA SEKOLAH | NILAI |
|---------------|-------------------------------|----------------------|
| 9 | SD INPRES PANNAMPU 1 | (12.000,00) |
| 10 | SD NEGERI GOTONG-GOTONG 1 | (2.500,00) |
| 11 | SD INPRES GOTONG-GOTONG 2 | 25,00 |
| 12 | SD INPRES BARRANG LOMPO | (1.416.882,00) |
| 13 | SD NEGERI MELAYU MUHAMMADIYAH | (47.750,00) |
| 14 | SD NEGERI MANGKURA II | (2.542.600,00) |
| JUMLAH | | 57.064.979,00 |

- f. **Koreksi BLUD** pada Rumah Sakit Umum Daerah Daya per 31 Desember 2018 sebesar (Rp158.070.057,00) yang dicatat pada Dinas Kesehatan merupakan koreksi beban dibayar dimuka sesuai hasil audit Kantor Publik sebesar Rp51.200.000,00 yang sebelumnya dicatat sebesar Rp209.270.057,00.



7.6. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dibagi menjadi: 1) Urusan Pemerintahan Absolut (Pemerintah Pusat); 2) Urusan Pemerintahan Konkuren (Pemerintahan Daerah), dan 3) Urusan Pemerintahan Umum (kewenangan Presiden). Pengaturan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren dibagi berdasarkan kriteria:

- a. Pemerintah Pusat:
 - 1) Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
 - 2) Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
 - 3) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
 - 4) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
 - 5) Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.
- b. Pemerintahan Daerah Provinsi:
 - 1) Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
 - 2) Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
 - 3) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - 4) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.
- c. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
 - 1) Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
 - 2) Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
 - 3) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - 4) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Atas perubahan pembagian urusan pemerintahan tersebut, maka terjadi pula perubahan dalam bidang urusan pemerintah daerah, antara lain:

1. Pada Bidang Pendidikan sebelumnya untuk bidang pendidikan menengah adalah kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kini kewenangan tersebut diberikan kepada Pemerintah Provinsi. Dalam Bidang Pendidikan, kewenangan dalam pengelolaan pendidikan terdiri dari enam komponen dan dari komponen tersebut hanya lima komponen yang tetap menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yaitu manajemen pendidikan, kurikulum, pemindahan pendidik, perizinan, dan bahasa dan sastra. Namun kewenangan itu pun dibagi antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dimana Pemerintah Daerah Provinsi memiliki lima komponen kewenangan yang terkait pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus,



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

sedangkan Pemerintah kabupaten/Kota memiliki lima komponen kewenangan terkait pendidikan dasar dan non formal.

2. Pada Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sebelumnya kewenangan di bagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, namun kini hanya diberikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Provinsi. Kewenangan Kabupaten/Kota yang hilang diantaranya adalah membuat Perda terkait ESDM, pemberian izin (kecuali panas bumi), pembinaan dan pengawasan.
3. Pada Bidang Kelautan sebelumnya juga membagi kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, namun kini kewenangan tersebut hanya diberikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Provinsi. Kewenangan Kabupaten/Kota yang hilang diantaranya adalah pelaksanaan kebijakan, penataan ruang laut, pengawasan dan penegakan hukum, koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan, dan perizinan (kecuali ijin usaha perikanan).
4. Pada Bidang Kehutanan yang semula kewenangan di bagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kini hanya diberikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Provinsi. Kewenangan Kabupaten/Kota yang hilang diantaranya adalah inventarisasi hutan, pengelolaan taman hutan, pertimbangan teknis, dan perizinan.

Dampak dari penarikan kewenangan sebagaimana tersebut di atas berimplikasi luas terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah antara lain:

1. Aspek Kelembagaan
Pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, perubahan struktur organisasi perangkat daerah merupakan hal yang tidak terelakan sebagai dampak dari penarikan kewenangan tersebut. Meskipun tidak mengubah struktur organisasi perangkat daerah, penambahan kewenangan tersebut berdampak pada perubahan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dibawahnya.
2. Peraturan Perundang-undangan
Dengan perubahan kewenangan tersebut maka otomatis akan berdampak pada peraturan perundang-undangan di daerah. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang memuat kewenangan lama harus segera dicabut. Sedangkan Peraturan Daerah Provinsi yang belum mengakomodir kewenangan baru harus dibuat dan/atau direvisi.
3. Rencana Pembangunan
Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentunya telah menyusun rencana pembangunan yang telah ditetapkan sebelum Undang-Undang 23 tahun 2014 berlaku, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah. Oleh karena itu, diperlukan beberapa penyesuaian baik Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, maupun Indikator Kinerja disesuaikan dengan perubahan kewenangan tersebut.



7.7. PENUTUP

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2018 merupakan hasil konversi dari format menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ke format Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- b. Menyangkut kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Neraca ini sebagian besar telah mengacu kepada kebijakan akuntansi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 66 Tahun 2009 sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
- c. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 menggambarkan akun secara umum dan memuat transaksi dalam tahun anggaran ini.
- d. Neraca Daerah ini merupakan bagian berkelanjutan dari Neraca Daerah Tahun Anggaran 2017. Adapun akun-akun neraca yang dijelaskan hanya berkaitan pada pos-pos yang memiliki nilai transaksi dan telah dilakukan komparasi/pembandingan nilai Tahun Anggaran 2018 terhadap Tahun Anggaran 2017 untuk setiap pos-pos akun Neraca Pemerintah Kota Makassar.
- e. Dalam penyusunan Laporan Keuangan ini juga disajikan hasil temuan Tim Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan (BPK-RI) dalam rangka pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sampai dengan Tahun Anggaran 2018.
- f. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan ini akan menjadi informasi bagi pihak eksternal yaitu para *stakeholders* dalam memahami laporan keuangan Pemerintah Kota Makassar maupun pihak internal Pemerintah Kota sendiri dalam rangka pengambilan keputusan.

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2018 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.